PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



LKIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH





KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan LKIP ini mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja yang transparan, objektif, dan berorientasi pada hasil, dalam pelaksanaannya, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini telah diupayakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Kami berharap LKIP Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai referensi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Tengah.

Terima kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sulawesi Tengah, 31 Januari 2024.

Sekretaris Daerah

Dra. Novalina, MM

Pembina Utama

DAFTAR ISI

BAB I 1
Pendahuluan

Latar Belakang
Struktur Organisasi
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sekretariat Daerah
Proses Bisnis

BAB II 4
Perencanaan Kinerja

Cascading kinerja
perjanjian kinerja
Rencana Kerja Dan Anggaran

BAB III 9
Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja IKU Sekretariat Daerah
Akuntabilitas Kinerja Program Biro ADPIM
Akuntabilitas Kinerja Program Biro Hukum
Akuntabilitas Kinerja Program Biro PBJ
Akuntabilitas Kinerja Program Biro Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Program Biro Umum
Akuntabilitas Kinerja Program Biro Perekonomian
Akuntabilitas Kinerja Program Biro Pembangunan
Akuntabilitas Kinerja Program Biro PEMOTDA
Akuntabilitas Kinerja Program Biro KESRA

BAB IV 40
Penutup

Lampiran

BAB .1

PENDAHULUAN





LATAR BELAKANG

LKIP SETDA 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2025 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja.

LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

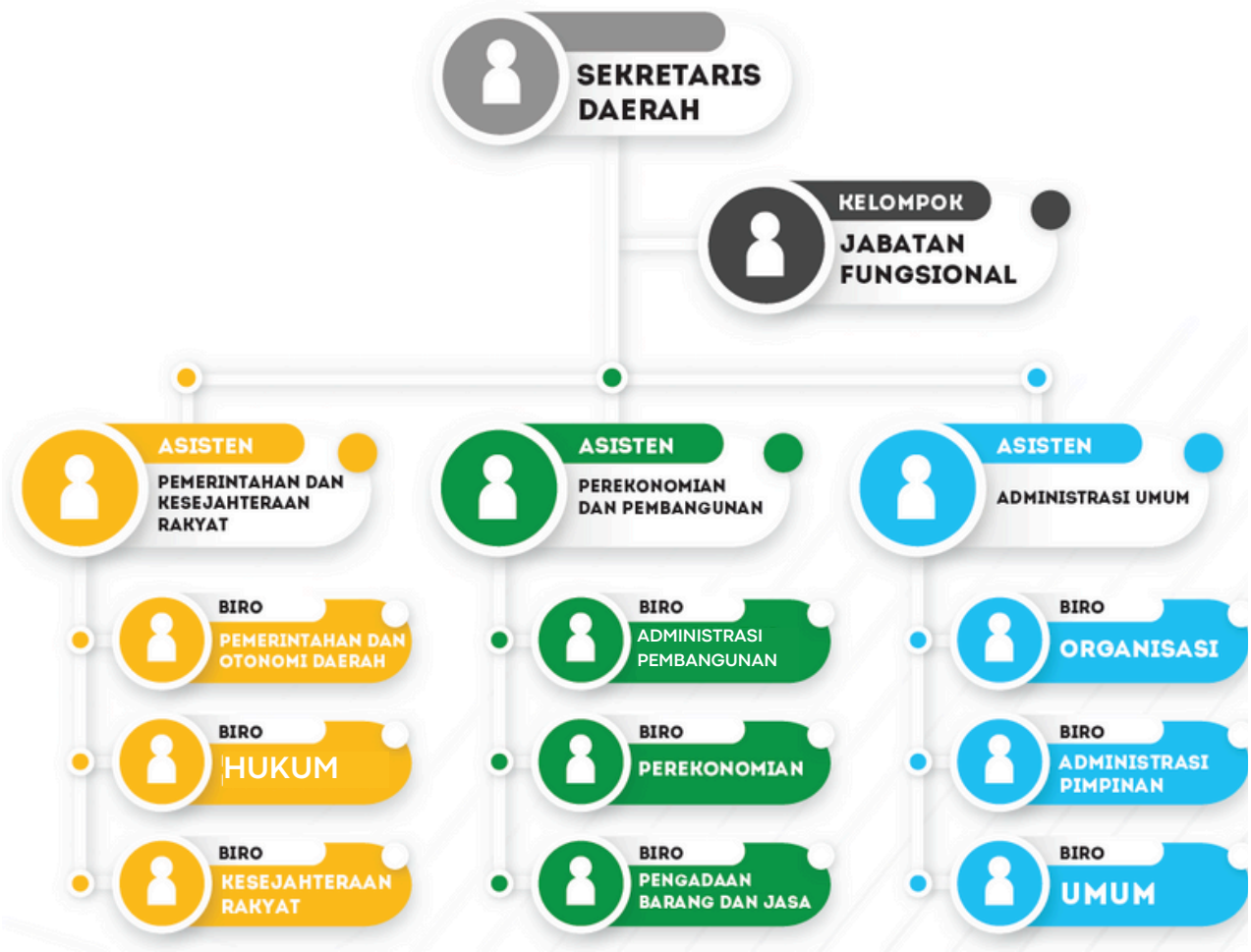
STRUKTUR ORGANISASI



Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dan Inspektorat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, membawahi 3 Asisten yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum serta Kelompok Jabatan fungsional. Adapun masing-masing Asisten membawahi 3 biro dengan susunan sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi; 1. Biro Kesejahteraan Rakyat; 2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi; 1. Biro Perekonomian; 2.Administrasi Pembangunan; dan 3.Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi ; 1.Biro Organisasi; 2. Biro Administrasi Pimpinan; dan 3. Biro Umum





TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah 'menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah Daerah dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif'

Selanjutnya Ayat (2) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan,pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi; Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah di dukung oleh 3 (tiga) unit Eselon IIb yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervisi perangkat daerah di sesuaikan dengan ruang lingkup asisten, serta 9 (sembilan) unit Eselon IIa yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 sebagai berikut:

- **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- **Biro Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;



- **Biro Hukum** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- **Biro Perekonomian** mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang perekonomian, meliputi sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- **Biro Administrasi Pembangunan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD Lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan;
- **Biro Organisasi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi;
- **Biro Administrasi Pimpinan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan, meliputi rumah tangga, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan;
- **Biro Umum** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dalam hal penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset dalam hal pemberian pelayanan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta bidang tata usaha dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada lingkup Sekretariat Daerah.







Proses Bisnis

Sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari penyusunan peta Probis adalah:

1. Agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
3. Agar instansi pemerintah terkait memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.



INDIKATOR KINERJA

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil angsung dari program -program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja.

Dalam pemerintahan daerah sendiri, perumusan kinerja perangkat daerah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Kinerja yang telah disusun tersebut diharapkan dapat menunjang atau mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang telah tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Untuk menggambarkan keterkaitan antara visi misi Gubernur Sulawesi Tengah dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



GUBERNUR SULAWESI TENGAH		SEKRETARIAT DAERAH
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN STRATEGIS**
Misi 2 Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM	**Tujuan 2** Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT)	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah
Misi 3 Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan	**Tujuan 4** Menurunkan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Kemiskinan
Misi 5 Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan	**Tujuan 6** Mewujudkan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Inflasi
Misi 7 Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam provinsi sulawesi tengah dan diluar provinsi bertetangga	**Tujuan 8** Mewujudkan Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pihak lainnya dalam Pembagunan Secara Bersinergi dan Terintegrasi	Meningkatnya Tata Kelola Kerjasama Daerah
Misi 9 Mendorong pembentukaan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah	**Tujuan 9** Mewujudkan Persiapan Pembentukan daerah Otonomi Baru	Meningkatnya Tata Kelola Persiapan Daerah Otonomi Baru

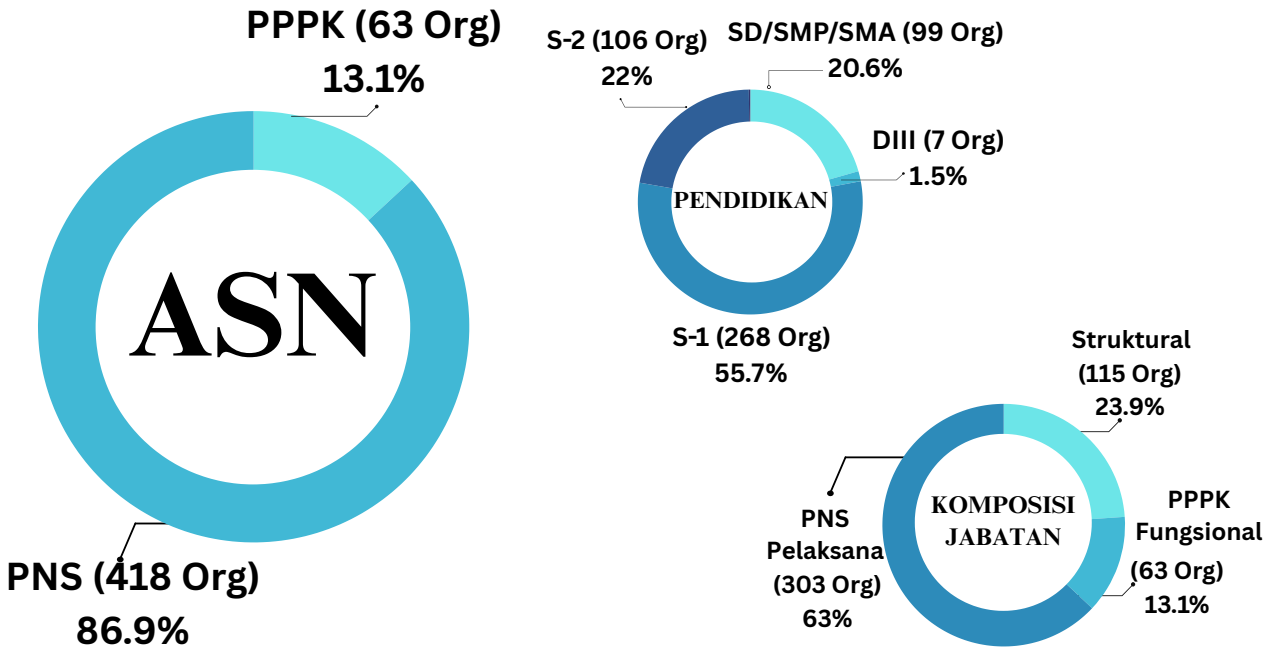


SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian s.d. bulan Desember 2024, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pegawai sebanyak 481 Orang

komposisi **481** ASN. ASN terdiri dari **418** PNS dan **63** PPPK. Dari sisi kualitas, potensi ASN pada Setda Prov Sulawesi Tengah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai didominasi jenjang S1 sebanyak **261** Pegawai **(56%)** dan S2 Sebanyak **106** Pegawai **(22%)**. Namun demikian, Setda Prov. SULTENG memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-III sebanyak **7** pegawai **(1%)**. Jumlah tersebut lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak **95** pegawai **(20%)**. Hal ini dibutuhkan perhatian lebih dikarenakan untuk meningkatkan kualitas kualifikasi pendidikan di di lingkup Setda Prov Sulteng Selanjutnya, apabila dilihat dari komposisi jabatan, mayoritas berada pada PNS Jabatan Pelaksana sebanyak **303** Orang **(63%)** dan untuk Jabatan Struktural sebanyak **115** orang ASN **(23,9%)** dan PPPK Jabatan Fungsional sebanyak **63** Orang **(13.1%)**. hal ini dibutuhkan perhatian dikarenakan belum ada pejabat fungsional dari kalangan PNS.

DIAGRAM SUMBER DAYA MANUSIA



SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terbagi ke dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan dokumen, tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah, SDM lingkup Sekretariat daerah, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penulisan dokumen LKIP.



BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Menjabarkan terkait perencanaan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang mencakup dasar perencanaan kinerja, Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, program dan anggaran yang dibutuhkan guna menunjang tercapainya sasaran kinerja di tahun 2024



BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan hasil capaian kinerja tahun 2024. Analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target 2024, target perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah, Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah antisipatif serta realisasi anggaran.



BAB 4. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.



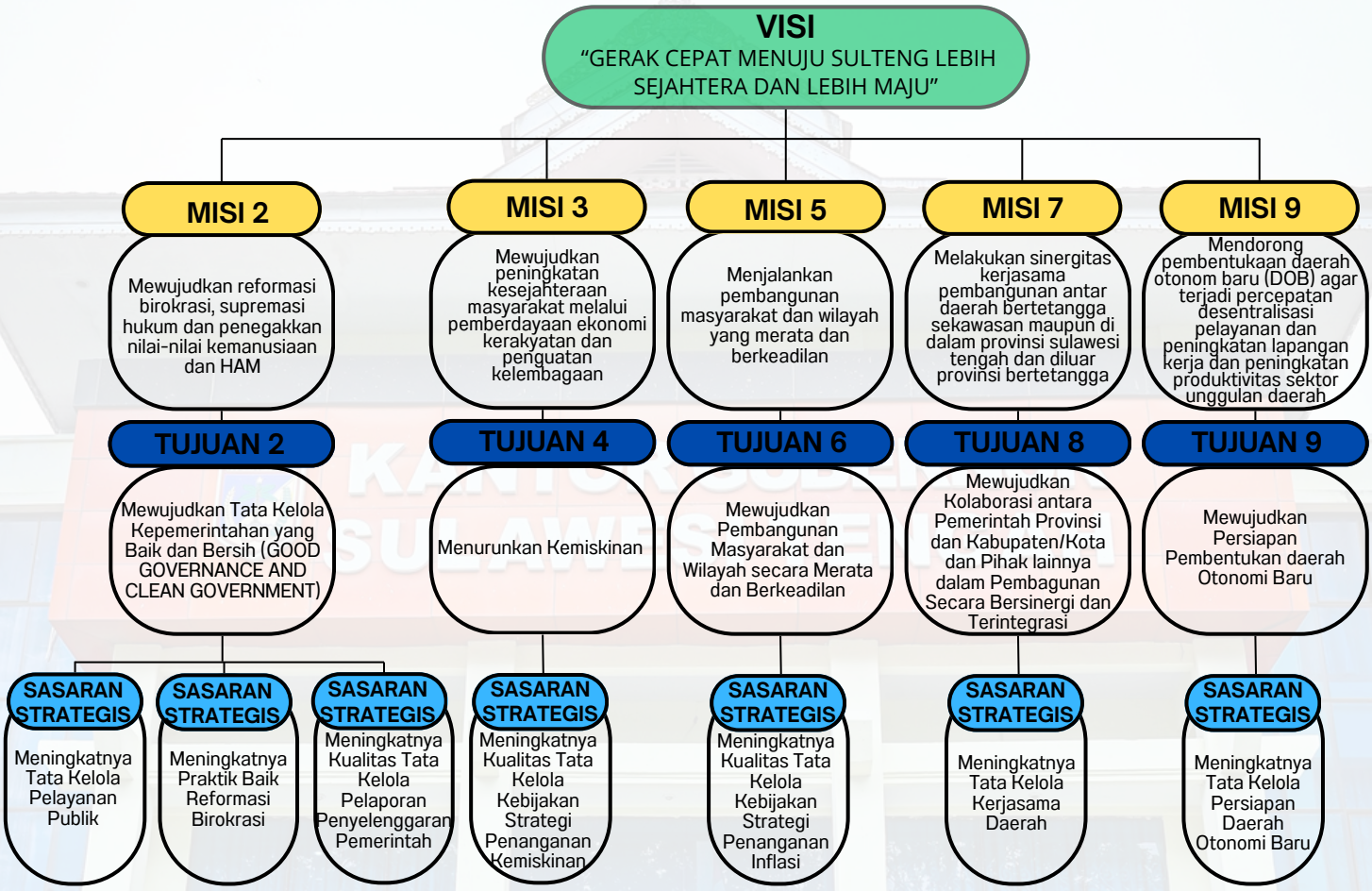
BAB .2

PERENCANAAN KINERJA



CASCADING KINERJA

Gambar 4. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Secara umum, peran sekretariat daerah sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pada penyediaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Secara spesifik, peran sekretariat daerah terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian lima (5) misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- Misi Dua "Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM"
- Misi Tiga "Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan"
- Misi Lima "Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan"
- Misi Tujuh "Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam provinsi sulawesi tengah dan diluar provinsi bertetangga"
- Misi Sembilan "Mendorong pembentukaan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah"

REALLYGREATSITE.COM

Pada level sasaran strategis, sekretariat daerah mendukung enam sasaran strategis pembangunan :

- Sasaran pertama, kedua dan ketiga adalah yang mendukung perwujudan Misi 2 (Dua) yaitu 'Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik' dan Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi.
- Sasaran keempat merupakan sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 3 (Ketiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Kemiskinan.
- Sasaran kelima merupakan sasaran yang mendukung terwujudnya misi 5 (Lima) yaitu 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Inflasi'.
- Sasaran keenam merupakan sasaran yang mendukung terwujudnya misi 7 (Tujuh) yaitu 'Meningkatnya Tata Kelola Kerjasama Daerah'
- Sasaran ketujuh merupakan sasaran yang mendukung terwujudnya misi 9 (sembilan) yaitu 'Meningkatnya Tata Kelola Persiapan Daerah Otonomi Baru'

PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun perjanjian kinerja dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi General Indikator Pelayanan Publik	4
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi General	61.5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Penyelenggaran	Skor Kinerja LPPD	68.5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Kemiskinan	Nilai Sub Komponen Strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Indikator Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Inflasi	Nilai Sub Komponen Strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Indikator Inflasi (Rencana	0.8
Meningkatnya Tata Kelola Kerjasama Daerah	(Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti)	100
Meningkatnya Tata Kelola Persiapan Daerah Otonomi Baru	Persentase Draft Kajian Akademik DOB yang disiapkan	100

KANTOR GUBERNUR SULAWESI TENGAH
REALLYGREATSITE.COM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan 8 program, 28 kegiatan, dan 86 subkegiatan yang didukung oleh anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya kenaikan belanja dalam struktur anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga total anggaran meningkat menjadi **Rp.185.458.215.900,-**.

Tabel 3.
Program & Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PENDANAAN
1	**Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	**Rp 3.457.929.270**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 2.509.448.464**
2	**Biro Hukum**	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Rp 2.495.384.300**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 2.684.615.700**
3	**Biro Kesejahteraan Rakyat**	Program Kesejahteraan Rakyat	**Rp 55.882.346.950**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 2.590.553.100**
4	**Biro Perekonomian**	Program Perekonomian dan Pembangunan	**Rp 1.686.075.500**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 1.084.484.260**
5	**Biro Administrasi Pembangunan**	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	**Rp 1.842.119.742**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 2.260.211.277**
6	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	**Rp 3.222.766.800**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 2.375.862.850**
7	**Biro Organisasi**	Program Penataan Organisasi	**Rp 2.875.821.925**
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 2.434.501.465**
8	**Biro Administrasi Pimpinan**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Rp 11.999.998.774**
9	**Biro Umum**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 86.056.095.523**

REALLYGREATSITE.COM

BAB .3

AKUNTABILITAS KINERJA

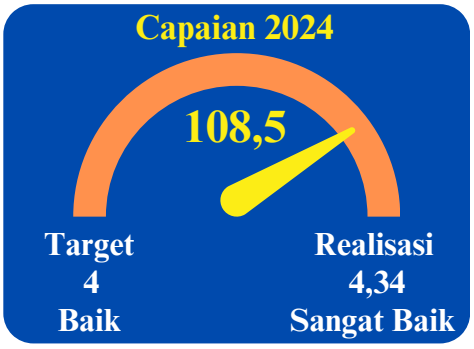


SASARAN 1.
MENINGKATNYA TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya tata kelola pelayanan publik dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja inti didukung dengan kondisi internal yang kondusif dan kondisi layanan yang prima di perangkat daerah lainnya. Bahwa layanan yang diberikan kepada internal setda akan berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja yang mendukung pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator : Nilai Reformasi Birokrasi General Indikator Pelayanan Publik, dengan indikator program Indeks Pelayanan Publik PEMDA, Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, dan Indeks kepuasaan masyarakat Internal pada (Biro Umum, Biro PBJ, Biro Kesra, Biro Adpim, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan OTDA, Biro Perekonomian dan Biro Umum).

1. KETERCAPAIAN IKU NILAI REFORMASI BIROKRASI GENERAL INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK

GAMBAR 5. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Perbandingan dengan tahun sebelumnya :	
Realisasi 2023 3.42 Baik	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 26%
Capaian 2023 97,71%	Capaian lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 11%

Perbandingan dengan target akhir renstra :	
Realisasi 2024 4.34 Sangat Baik	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 108,5%

Perbandingan dengan rata-rata nasional :	
Realisasi Nasional 4.00 Baik	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 8,5%

Kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah meningkat yang diperlihatkan dari penerapan kebijakan standar pelayanan publik oleh perangkat daerah sebanyak 100%. Penerapan kebijakan standar pelayanan publik oleh perangkat daerah didorong oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan yang diperlihatkan dari capaian nilai kepatuhan pelayanan publik oleh ombudsman RI.



Tahun 2024 dengan nilai 97.07 dengan predikat nilai kepatuhan (kualitas tertinggi) berada di peringkat ke 6 nasional dari 34 provinsi Se-Indonesia, pada evaluasi kepatuhan atas pelayanan publik ini terdapat 5 Lokus evaluasi yang terdiri dari Dinas Sosial dengan Nilai 97.07, RSUD undata meningkat dengan indeks kepatuhan 97,38, Dukcapil meningkat dengan nilai 92.80, DPMPTSP dengan nilai 97.89 dan Dinas Pendidikan dengan nilai 95.70.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan adalah pembinaan kepada 41 perangkat daerah dalam menerapkan Pergub Nomor 36 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja, Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.



Sementara itu upaya yang dilakukan dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah disusunnya peta proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen, dilakukan pembinaan kepada 41 perangkat daerah tentang penilaian SKM, dipantaunya implementasi pemenuhan SKM pada 39 perangkat daerah.

Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi rutin melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berkaitan dengan Kebijakan Pelayanan Publik setiap tahunnya baik dengan Metode Workshop, Bimtek, Desk maupun Coaching Clinic pada perangkat daerah lingkup provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota se Sulawesi Tengah;

Selain itu, Sekretariat daerah melalui Biro Organisasi juga setiap tahunnya melaksakan kegiatan monev dan pendampingan perbaikan kualitas pelayanan publik secara observasi lapangan baik di unit Pemerintah Provinsi maupun Unit Pemerintah Kabupaten/Kota se sulawesi tengah dengan memperioritaskan Pemerintah Kabupaten dengan Indeks Pelayanan Publik kategori Prioritas Perbaikan;



Sekretariat daerah membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Kementerian PAN RB pada Deputi Pelayanan Publik selaku Pembina Kebijakan Pelayanan Publik, juga pada pemerintah daerah yang pelayanan publiknya mejadi recomendasi Pusat sebagai daerah yang pelayanan publiknya maju dan berkembang. guna perbaikan kebijakan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kedepan.



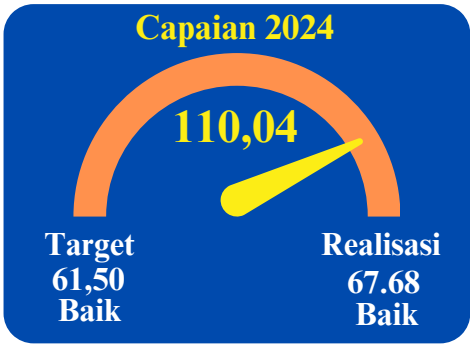
Pemerintah Provinsi telah Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi secara Mandiri Instansional pada seluruh UPP di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan instrumen PEKPPP Nasional. Diharapkan PEKPPP Mandiri bertujuan agar seluruh kebijakan pelayanan publik terimplementasi secara merata di semua perangkat, tidak terkecuali hanya pada Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Nasional untuk keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik

SASARAN 2.
MENINGKATNYA PRAKTIK BAIK REFORMASI BIROKRASI

Meningkatnya Praktik baik reformasi birokrasi dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan sesuai prinsip good government governance yaitu dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Dengan adanya praktik birokrasi yang lebih baik, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui Nilai Reformasi Birokrasi General, yang merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi reformasi birokrasi general. naiknya Indeks Reformasi Birokrasi General ditunjang dengan tercapainya indikator-indikator program yang diampu oleh masing-masing biro sebagai unit kerja dibawah naungan sekretariat derah seperti indikator program Indeks Reformasi Hukun di Biro Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa di Biro PBJ, Nilai SAKIP Aspek Pelaporan di Biro Organisasi, Indeks Kualitas Kebijakan di Biro Perekonomian, Biro Kesra dan Biro Adm Pembangunan.

2. KETERCAPAIAN IKU NILAI REFORMASI BIROKRASI GENERAL

GAMBAR 6. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Perbandingan dengan tahun sebelumnya :	
Realisasi 2023 56,52 Kurang	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 19%
Capaian 2023 91,90%	Capaian lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 19%

Perbandingan dengan target akhir renstra :	
Realisasi 2024 4.34 Sangat Baik	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 108,5%

Perbandingan dengan rata-rata nasional :	
Realisasi Nasional N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A

Fokus evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di tahun 2024 salah satunya adalah untuk melihat dampak pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap permasalahan strategis di masyarakat. Sehingga data hasil evaluasi lebih menyoroti dampak penyelenggaraan reformasi birokrasi general yang ditunjukkan melalui pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi tematik yang ditunjukkan melalui pencapaian penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, transformasi digital, laju inflasi, dan tingkat penggunaan produk dalam negeri.

fokus pencapaian indikator kinerja sekretariat daerah tertuju pada fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum diperlihatkan melalui pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang diwakili oleh pencapaian indikator program melalui skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indeks Reformasi Hukum, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Kualitas Kebijakan, Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja, Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas, Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah.



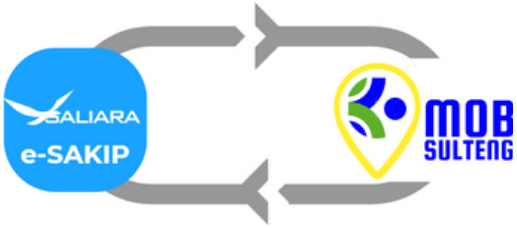
Upaya Peningkatan Praktik Baik Reformasi Birokrasi Melalui Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi General oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mendorong peningkatan praktik baik Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memastikan efektivitas implementasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, telah dibentuk Tim Strategi Transformasi Unggul (STU) melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur. Tim ini mendapat pembinaan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta pengarah dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov). Tim STU bertugas untuk memberikan pendampingan secara langsung kepada perangkat daerah terkait implementasi tata kelola pemerintahan guna memastikan pemenuhan 21 indikator dalam seluruh aspek RB.



Pendampingan Penyusunan Cascading Arsitektur Kinerja, Penyusunan cascading arsitektur kinerja merupakan langkah strategis yang dilakukan agar seluruh perangkat daerah dapat menyusun indikator kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan juga penyelarasan dan asistensi anggaran antara arsitektur kinerja yang berdampak kepada masyarakat dengan perbaikan tata kelola.

Melalui penerapan sistem digital yang baik, pelaporan kinerja menjadi lebih transparan dan terukur, sehingga memudahkan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi reformasi birokrasi. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan kinerja.



Sekretariat Daerah juga mendorong replikasi dan duplikasi sistem digitalisasi bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder.

Melalui penerapan sistem digital yang baik, pelaporan kinerja menjadi lebih transparan dan terukur, sehingga memudahkan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi reformasi birokrasi. Dengan berbagai upaya tersebut, Sekretariat Daerah terus berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh perangkat terkait, diharapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat segera terwujud demi pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas.

SASARAN 3.
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAPORAN PENYELENGGARAAN

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Penyelenggaraan Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan penyelenggaraan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Dengan tata kelola yang lebih baik, LPPD menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, peningkatan kualitas pelaporan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Capaian sasaran strategis ini diukur melalui Nilai Skor Kinerja LPPD naiknya Nilai Skor Kinerja LPPD ditunjang dengan tercapainya indikator-indikator program yang diampu oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai unit kerja dibawah naungan sekretariat daerah dengan indikator program *Persentase* Capaian SPM dan Nilai Kinerja LPPD

3. KETERCAPAIAN IKU NILAI SKOR KINERJA LPPD

GAMBAR 7. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Perbandingan dengan tahun sebelumnya :	
Realisasi 2023 N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A
Capaian 2023 N/A	Capaian lebih tinggi/Lebih Rendah N/A

Perbandingan dengan target akhir renstra :	
Realisasi 2024 N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A

Perbandingan dengan rata-rata nasional :	
Realisasi Nasional N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A

Sehubungan dengan adanya perubahan sistem evaluasi penilaian LPPD oleh Kemendagri RI, data tahun 2024 belum dirilis. Oleh karena itu, capaian kinerja belum dapat disajikan dikarenakan belum ada data pembanding. Namun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tetap melakukan *continuous improvement* perbaikan penilaian berkelanjutan yang diperlihatkan melalui tingkat ketepatan perangkat daerah dalam melakukan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) didalam pelaporan LPPD. Ketercapaian ketepatan pengisian 41 perangkat daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pelaporan LPPD, upaya yang telah dilakukan adalah menginternalisasi strategi kebijakan pemenuhan IKK melalui pendampingan kepada perangkat daerah terkait pemenuhan IKK dan Pembuktian pelaporan IKK serta mendampingi menginternalisasi strategi kebijakan implementasi pemenuhan IKK kepada 13 kabupaten/kota diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk meningkatkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan beberapa upaya strategis yang dilakukan antara lain:

1.Peningkatan Kualitas Data dan Pelaporan



- Memastikan setiap perangkat daerah memiliki data yang akurat, valid, dan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
- Menggunakan sistem informasi manajemen berbasis digital untuk mempermudah proses penyusunan dan pengolahan data.
- Melakukan verifikasi dan validasi data sebelum disampaikan ke tingkat provinsi dan pusat.

2.Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Perangkat Daerah



- Mengadakan forum koordinasi rutin antara perangkat daerah untuk menyelaraskan pemahaman dalam penyusunan LPPD.
- Meningkatkan sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam penyusunan laporan.
- Memastikan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penyampaian data lebih efektif.

3.Peningkatan Kapasitas SDM



- Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPPD.
- Meningkatkan pemahaman terkait regulasi terbaru mengenai pelaporan LPPD.
- Menerapkan sistem reward dan punishment untuk mendorong peningkatan kualitas kerja dalam penyusunan laporan.

4.Kepatuhan terhadap Regulasi dan Pedoman Teknis



- Memastikan setiap perangkat daerah memahami pedoman penyusunan LPPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan LPPD agar laporan sesuai standar yang ditetapkan.

SASARAN 4.
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEBIJAKAN STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Kemiskinan melalui indikator nilai sub komponen strategis pelaksanaan reformasi birokrasi tematik indikator kemiskinan (Rencana Aksi) bertujuan untuk Memperkuat Tata Kelola Kebijakan antara lain; (Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan strategis dalam penanganan kemiskinan melalui pendekatan reformasi birokrasi tematik, Mendorong sinergi antar perangkat daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan). Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi (Memastikan bahwa rencana aksi penanganan kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan standar reformasi birokrasi tematik dan Mengintegrasikan program-program prioritas daerah dalam strategi penurunan angka kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan) dan Meningkatkan Dampak Kebijakan Terhadap Pengurangan Kemiskinan (Memastikan kebijakan yang diimplementasikan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan Mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam mendukung kebijakan strategis pengentasan kemiskinan.

4. KETERCAPAIAN IKU NILAI SUB KOMPONEN STRATEGIS PELAKSANAAN RB TEMATIK INDIKATOR KEMISKINAN (RENCANA AKSI)

GAMBAR 7. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Perbandingan dengan tahun sebelumnya :	
Realisasi 2023 0,05	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah -
Capaian 2023 -	Capaian lebih tinggi/Lebih Rendah -

Perbandingan dengan target akhir renstra :	
Realisasi 2024 0.64	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah 80%

Perbandingan dengan rata-rata nasional :	
Realisasi Nasional N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A

Sehubungan dengan adanya perubahan penetapan sasaran dan Indikator di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi dan berdasarkan capaian strategi RB Tematik yang rendah, setelah indikator-indikator RB Tematik dijadikan IKU terdapat perubahan signifikan dari capaian-capaian RB Tematik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil:

1. **Aksi Konvergensi Program Lintas Perangkat Daerah:** Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui aksi konvergensi program lintas perangkat daerah. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, membuka kesempatan kerja, dan mendorong kemandirian masyarakat.

2. Penguatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial: Untuk memastikan data yang akurat dan terkini, pemerintah mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Langkah ini mencakup verifikasi dan validasi data, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.



3. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD): Untuk menyelaraskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah membentuk TKPKD. Tim ini bertugas meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



4. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun SPKD sebagai panduan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Strategi ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



5. Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan dalam Kebijakan Daerah: Pemerintah daerah mendorong pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga mendorong terciptanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.



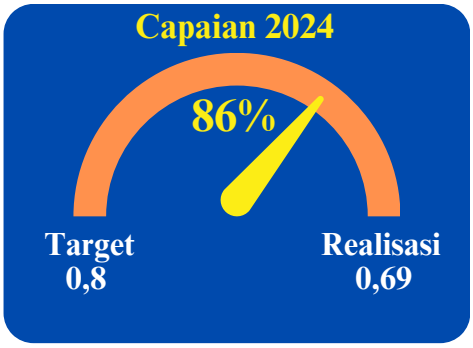
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

SASARAN 5.
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEBIJAKAN STRATEGI PENANGANAN INFLASI

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Inflasi melalui indikator nilai sub komponen strategis pelaksanaan reformasi birokrasi tematik indikator Inflasi (Rencana Aksi) bertujuan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Strategis dalam Penanganan Inflasi, (Penerapan pendekatan reformasi birokrasi tematik dalam strategi pengendalian inflasi, Meningkatkan sinergi antara perangkat daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi & Memastikan kebijakan yang diterapkan berbasis data dan analisis yang komprehensif untuk meminimalkan dampak inflasi terhadap perekonomian), Meningkatkan Dampak Kebijakan terhadap Pengendalian Inflasi (Memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berdampak langsung terhadap pengendalian inflasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam mendukung kebijakan strategis pengendalian inflasi & Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan).

5. KETERCAPAIAN IKU NILAI SUB KOMPONEN STRATEGIS PELAKSANAAN RB TEMATIK INDIKATOR INFLASI (RENCANA AKSI)

GAMBAR 8. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Perbandingan dengan tahun sebelumnya :	
Realisasi 2023 0,05	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah -
Capaian 2023 -	Capaian lebih tinggi/Lebih Rendah -

Perbandingan dengan target akhir renstra :	
Realisasi 2024 0.69	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah 86%

Perbandingan dengan rata-rata nasional :	
Realisasi Nasional N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A

Meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan strategi pengendalian inflasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga

- Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi.
- Meningkatkan kerja sama antara Bank Indonesia (BI), BPS, OPD terkait, dan pelaku usaha dalam mengelola stabilitas harga dan pasokan barang.
- Memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan berbagi praktik terbaik dalam pengendalian inflasi.

2. Peningkatan Ketersediaan dan Akurasi Data

- Mengembangkan sistem pemantauan harga komoditas secara real-time untuk mendeteksi kenaikan harga yang tidak wajar.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dan big data untuk analisis tren inflasi dan distribusi barang.
- Memastikan koordinasi dengan BPS dan BI dalam mengolah data inflasi untuk kebijakan yang berbasis bukti.

3. Penguatan Kebijakan Stabilitas Harga dan Distribusi Barang

- Meningkatkan ketahanan pangan dan stok cadangan komoditas strategis untuk mengantisipasi gejolak harga.
- Mengembangkan kebijakan subsidi transportasi untuk menekan biaya logistik, terutama bagi wilayah terpencil.
- Mengoptimalkan pasar murah, operasi pasar, dan subsidi harga untuk membantu masyarakat rentan terhadap inflasi.

4. Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Perdagangan

- Menyederhanakan perizinan dan regulasi distribusi barang agar lebih efisien.
- Memastikan adanya kebijakan yang mendukung produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
- Meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap praktik monopoli dan spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

5. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat

- Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pengelolaan harga dan stok barang.
- Mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam produksi pangan, misalnya dengan program urban farming dan ketahanan pangan keluarga.
- Meningkatkan edukasi publik tentang pola konsumsi bijak agar tidak terjadi panic buying saat inflasi meningkat.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.





SASARAN 6.
MENINGKATNYA TATA KELOLA KERJASAMA DAERAH

Tata kelola kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, ditandai dengan capaian kinerja sebesar 109% dari target 100%. Indikator ini hanya berlaku di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak dapat dibandingkan secara nasional. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya kerja sama yang terealisasi melalui penandatanganan naskah kerja sama, komitmen pemerintah daerah dan mitra, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Upaya yang dilakukan meliputi penyusunan kajian dan naskah kerja sama, serta evaluasi terhadap kerja sama aktif dan yang akan berakhir untuk memastikan manfaat bagi pembangunan daerah.

5. KETERCAPAIAN IKU PERSENTASE KERJASAMA YANG DITINDAKLANJUTI

GAMBAR 3. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Perbandingan dengan tahun sebelumnya :	
Realisasi 2023 100%	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 100%
Capaian 2023 100%	Capaian lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 100%

Perbandingan dengan target akhir renstra :	
Realisasi 2024 100%	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah 100%

Perbandingan dengan rata-rata nasional :	
Realisasi Nasional N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A



Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah turut berupaya membina pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama sebagai bagian dari implementasi kebijakan penyusunan naskah kerja sama. Pembinaan ini difokuskan pada penyusunan rencana kerja atau rencana kegiatan kerja sama, yang merupakan bagian integral dari naskah kerja sama dan menjadi lampiran resmi dalam dokumen yang ditandatangani. Selain itu, keberadaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

sehingga memastikan setiap kerja sama dapat ditindaklanjuti secara efektif.Kerja sama yang terbangun pada tahun 2024 sebanyak 12 naskah kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan daerah lain. Meningkatnya kerjasama Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didorong oleh komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pihak mitra kerja sama dalam melaksanakan ruang lingkup kerjasama. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga berupaya melakukan pembinaan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama sebagai bentuk implementasi kebijakan penyusunan naskah kerja sama. Pembinaan terutama dilakukan dalam penyusunan rencana kerja atau rencana kegiatan kerja sama.

SASARAN 7.
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSIAPAN DOB

Calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan yang dibuatkan Draft Akademiknya telah tersusun dengan memenuhi segala ketentuan. Hal ini diperlihatkan dari persentase dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yang dianalisis dapat tercapai sebanyak 100% dari target 100% dan terealisasi 100%. Dari segi realisasi, usulan calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan ke DPRD tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari realisasi tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi tahun 2023 sebesar 100%. Begitu pula dari segi capaian kinerja, usulan calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan ke DPRD tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu dari capaian kinerja tahun 2022 dan 2024 sebesar 100%. Indikator ini hanya digunakan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

5. KETERCAPAIAN IKU PERSENTASE DRAFT KAJIAN AKADEMIK DOB YANG DISIAPKAN

GAMBAR 3. DATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DAN PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL



Perbandingan dengan tahun sebelumnya :	
Realisasi 2023 100%	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 100%
Capaian 2023 100%	Capaian lebih tinggi/Lebih Rendah Tinggi 100%

Perbandingan dengan target akhir renstra :	
Realisasi 2024 100%	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah 100%

Perbandingan dengan rata-rata nasional :	
Realisasi Nasional N/A	Realisasi lebih tinggi/Lebih Rendah N/A

Ketercapaian kinerja pengusulan calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan ke DPRD didorong oleh usulan daerah otonomi baru kabupaten/kota memenuhi persyaratan sebesar 50%. Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengusulan daerah otonomi baru harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Pendorong lain adalah tingginya komitmen gubernur dan DPRD Sulawesi tengah dalam mendorong pembentukan daerah persiapan otonomi baru di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun upaya yang dilakukan dalam memberikan usulan calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan adalah penyusunan kajian verifikasi usulan daerah otonomi baru untuk Pemekaran di Kabupaten Parigi, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai.







AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO ADM PIMPINAN



AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (performance result) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (performance plan) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Pembandingan menghasilkan celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (performance improvement). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan :

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100$$

Capaian kinerja organisasi seperti dimaksudkan di atas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Dalam mengukur kinerja program tersebut, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut itu sendiri dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur

keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input dan indikator kinerja output. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program umumnya dihasilkan dari capaian output kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Dalam mengukur capaian kinerja, pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut dianggap lebih terbebas dari distorsi aritmatis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%. Keberhasilan capaian kinerja diukur dengan dua indikator, yaitu keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) berupa outcome dari pemanfaatan hasil Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan keberhasilan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2024

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Administrasi Pimpinan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Administrasi Pimpinan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pimpinan sebagaimana pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisa Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 pada dasarnya terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Kepegawaian Lingkup SETDA	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro**	**88.50 Indeks**	**80.09 Indeks**	**90.40%**	**Tinggi**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Administrasi Pimpinan tahun 2024 mencapai 80.09 dari target 88.50, dengan capaian 90% yang masih tergolong kategori tinggi. Meskipun demikian, terdapat selisih 8.41 poin yang mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target, seperti kualitas layanan, efektivitas prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek layanan yang belum optimal, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, serta pemantauan dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepuasan masyarakat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dan Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel. Capaian Kinerja beberapa Tahun

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Kepegawaian Lingkup SETDA	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro	78 Indeks	78 Indeks	100%	80 Indeks	80 Indeks	100%	88.50 Indeks	80.09 Indeks	90.40%

Dalam tiga tahun terakhir, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Administrasi Pimpinan terdapat peningkatan dari 78 pada tahun 2022, menjadi 80 pada tahun 2023, dan naik signifikan ke 88.50 pada tahun 2024. Realisasi capaian pada tahun 2022 dan 2023 mencapai target dengan nilai 78 dan 80, menghasilkan capaian 100% di kedua tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024, meskipun terjadi peningkatan realisasi menjadi 80.09, pencapaian hanya mencapai 90% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tren kepuasan masyarakat tetap stabil dan meningkat sedikit, lonjakan target yang cukup besar pada tahun 2024 belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Faktor yang mungkin memengaruhi pencapaian ini meliputi perubahan ekspektasi masyarakat, tantangan dalam peningkatan kualitas layanan, serta kemungkinan adanya faktor internal seperti keterbatasan sumber daya atau efektivitas kebijakan. Untuk mencapai target di tahun mendatang, diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait strategi peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi sumber daya agar realisasi kinerja lebih selaras dengan target yang ditetapkan.

C. Perbandingan Realisasi Tahun ini dan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel. Realisasi Tahun ini dan Target Jangka Menengah (Renstra)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 4/5x100*
	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Kepegawaian Lingkup SETDA	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro**	**80.09 Indeks**	**96 Indeks**	**83%**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Administrasi Pimpinan pada tahun 2024 mencapai 80.09, sedangkan target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026 ditetapkan sebesar 96, dengan tingkat kemajuan saat ini sebesar 83%.

Meskipun capaian tahun ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, masih terdapat selisih 15.91 poin yang harus dicapai dalam dua tahun ke depan untuk memenuhi target Renstra. Tantangan utama yang perlu diatasi meliputi peningkatan kualitas layanan, optimalisasi sistem administrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Untuk mencapai target Renstra 2026, diperlukan strategi percepatan berupa inovasi dalam layanan, digitalisasi administrasi, serta peningkatan kepuasan melalui umpan balik masyarakat yang lebih intensif. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan yang tepat, target akhir 96 indeks pada tahun 2026 dapat dicapai secara progresif.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Standard Nasional Tahun 2024.

Untuk Biro Administrasi Pimpinan belum memiliki perbandingan Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan Nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Tujuan dan sasaran Biro Adminitrasi Piminan Setda Prov. Sulteng dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun pertama Renstra, dengan tercapainya indikator tujuan maupun sasaran sebesar 100%.

Keberhasilan Pada tahun 2024, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan, serta koordinasi antar instansi pemerintahan. Dalam upaya mencapai standar pelayanan yang lebih baik dan profesional, dua kegiatan strategis telah sukses dilaksanakan sebagai bentuk pencapaian kinerja yang signifikan.



1. Workshop Keprotokolan Se-Regional Sulawesi dan Kalimantan Timur Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keprotokolan, Biro Administrasi Pimpinan menyelenggarakan Workshop Keprotokolan Se-Regional Sulawesi dan Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pejabat dan staf keprotokolan dari berbagai daerah untuk memperdalam

pemahaman mengenai tata cara dan standar keprotokolan yang sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, workshop ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani kegiatan resmi pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, workshop ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas-tugas keprotokolan.



2. Rapat Koordinasi Forum Biro Administrasi Pimpinan Bersama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Se-Sulawesi Tengah Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal administrasi pimpinan serta komunikasi kebijakan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Biro Administrasi Pimpinan Bersama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Se-Sulawesi Tengah. Forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendukung tugas-tugas pimpinan daerah. Rakor ini juga menjadi momentum penting dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pemerintahan daerah, sekaligus memastikan kelancaran arus informasi dan komunikasi antara pimpinan daerah dengan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan kedua kegiatan ini mencerminkan komitmen Biro Administrasi Pimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi pemerintahan. Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM dan sinergi yang lebih erat antar unit kerja terkait, diharapkan tata kelola administrasi pimpinan di Provinsi Sulawesi Tengah semakin profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun ketiga Renstra hampir tidak ada kendala sehingga program dan kegiatan bisa dikatakan mengalami keberhasilan, maka tujuan dan sasaran Biro Administrasi Piminan Setda Prov. Sulteng dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan adalah:

- Melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik di semua tingkat pimpinan atau pejabat daerah guna mendukung tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng
- Melakukan peningkatan kapasistas sumber daya manusia dengan cara melakukan kegiatan – kegiatan pendukung teknis seperti bimtek, pelatiahan – pelatihan dan melalui forum diskusi yang melibatkan daerah lain.
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung Kinerja yang lebih baik.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya Biro Administrasi Pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Tujuan / Sasaran	Kinerja			Anggaran			Efesiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Kepegawaian Lingkup SETDA	88.50	80.09	90.50	1,199,999,877	11,980,088,354	99.00	**-9.14**

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi anggaran dan capaian kinerja pada tahun berjalan, tingkat capaian anggaran Biro Administrasi Pimpinan mencapai **99,00%** dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp1.199.999.877**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp1.198.008.854**. Sementara itu, capaian kinerja yang berhasil direalisasikan sebesar **90,05%**, yang menunjukkan bahwa masih terdapat selisih antara target yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Dengan menggunakan perhitungan efisiensi anggaran, diperoleh nilai sebesar -**9,14%**, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya efisien. Hal ini disebabkan oleh capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran yang hampir mencapai 100%. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan efisiensi di tahun mendatang, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih selaras dengan pencapaian target kinerja, termasuk dengan melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja serta strategi peningkatan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

G. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Biro Admimistrasi Pimpinan Setda Prov. Sulteng pada tahun anggaran 2024 melaksanakan Program/Kegiatan dengan sasaran Meningkatnya layanan keprotokolan, materi dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan administrasi kepegawaian yang terdiri dari layanan kepada KDH/WKDH/Setda serta tamu pimpinan, layanan operasional perkantoran, dan kegiatan-kegiatan pembinaan dalam hal pengelolaan adrninistrasi serta sarana dan prasarana.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realiasi		Capaian (%)	
					Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Kepegawaian Lingkup SETDA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.5	11,999,998,774	80.09	11,980,088,354	90	100
2	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**57,832,000**	**100%**	57,806,500	100	100
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	57,832,000	3.05	57,806,500	102	100
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**865,830,000**	**100%**	865,386,000	100	100
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	865,830,000	1.00	865,386,000	100	100
6	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**233,643,600**	**100%**	232,749,800	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realiasi		Capaian (%)	
					Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	172,012,600	3.74	171,710,000	37	100
8	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	61,631,000	9.90	61,039,800	99	99
9	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**1,126,991,980**	**100%**	1,125,441,950	100	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	32,600,030	6.67	31,050,000	95	95
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1,094,391,950	1	1,094,391,950	100	100
12	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**560,110,500**	**100%**	559,020,500	100	100
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	560,110,500	1	559,020,500	100	100
14	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100%**	**1,246,080,000**	**100%**	1,243,161,122	100	100
15	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1,246,080,000	5	1,243,161,122	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realiasi		Capaian (%)	
					Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target
16	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**		**Persentase Fasilitasi Materi, Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan**	**Persen**	**100%**	**4,938,444,444**	**100%**	4,933,402,305	100	100
17	Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen (Bahan Materi)	96	726,953,000	56	726,706,040	58	100
18	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan (630Naskah Sambutan, 12 Juru Bicara, 720 Informasi/rillis)	630	3,573,398,450	629	3,568,979,067	100	100
19	Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan (kali)	792	638,092,994	792	637,717,198	100	100
20	**Fasilitasi Keprotokolan**		**Persentase Fasilitasi Keprotokolan KDH,WKDH, SEKDA dan Asisten**	**Persen**	**100%**	**2,971,066,250**	**100%**	2,963,120,177	100	100
21	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan (kali)	720	487,352,000	711	481,317,004	99	99
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan (kali)	72	1,586,202,000	85	1,586,034,993	118	100
23	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan (kali)	840	897,512,250	838	895,768,180	100	100

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai target.

2. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Adanya keterbatasan dan kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait sehingga menyebabkan beberapa agenda dalam pencapaian target.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kompetensi SDM dimaksud kurang optimal.

REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun 2024, persentase realisasi anggaran kumulatif yang dicapai oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 99,83%. Rincian angka riil dan persentase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**11,999,998,774**	**11,980,088,354**	**99.83**
2	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**57,832,000**	**57,806,500**	**99.96**
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**57,832,000**	**57,806,500**	**99.96**
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**865,830,000**	**865,386,000**	**99.95**
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**865,830,000**	**865,386,000**	**99.95**
6	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**233,643,600**	**232,749,800**	**99.62**
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**172,012,600**	**171,710,000**	**99.82**
8	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	**61,631,000**	**61,039,800**	**99.04**
9	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**1,126,991,980**	**1,125,441,950**	**99.86**
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**32,600,030**	**31,050,000**	**95.25**

11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**1,094,391,950**	**1,094,391,950**	**100.00**
12	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**560,110,500**	**559,020,500**	**99.81**
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**560,110,500**	**559,020,500**	**99.81**
14	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,246,080,000**	**1,243,161,122**	**99.77**
15	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**1,246,080,000**	**1,243,161,122**	**99.77**
16	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**4,938,444,444**	**4,933,402,305**	**99.90**
17	Penyiapan Materi Pimpinan	**726,953,000**	**726,706,040**	**99.97**
18	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**3,573,398,450**	**3,568,979,067**	**99.88**
19	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	**638,092,994**	**637,717,198**	**99.94**
20	**Fasilitasi Keprotokolan**	**2,971,066,250**	**2,963,120,177**	**99.73**
21	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	**487,352,000**	**481,317,004**	**98.76**
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	**1,586,202,000**	**1,586,034,993**	**99.99**
23	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	**897,512,250**	**895,768,180**	**99.81**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Biro Administrasi Pimpinan sebesar **Rp11.999.998.774**, dengan realisasi anggaran mencapai **Rp11.980.088.354**. Tingkat realisasi anggaran tersebut mencapai **99,83%**, yang menunjukkan bahwa serapan anggaran telah berjalan dengan sangat optimal. Persentase ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dirancang, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi. Keberhasilan pencapaian ini diharapkan dapat menjadi

dasar bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya, dengan tetap memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara tepat guna dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

INOVASI

Dalam menghadapi tantangan era digital dan tuntutan keterbukaan informasi publik, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menghadirkan inovasi yang mendukung efektivitas kerja serta transparansi dalam pelayanan. Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kinerja birokrasi, kami menghadirkan dua inovasi strategis, yaitu **Real Time Pers & Protokol** dan **Menata Kawan SETDA**.

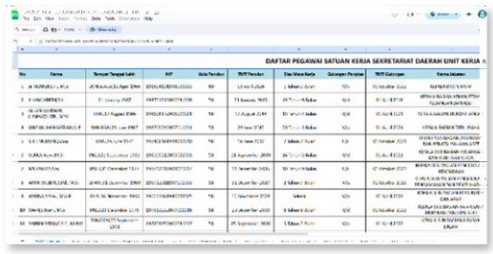


Real Time Pers & Protokol merupakan sebuah platform berbasis web yang berfungsi sebagai jembatan keterpaduan antara agenda, rilis berita, dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Inovasi ini hadir untuk memastikan bahwa koordinasi agenda pimpinan berjalan lebih efektif, informasi dapat diperbarui secara real-time, serta publikasi kegiatan pimpinan lebih sistematis dan transparan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan komunikasi dan distribusi informasi antar unit kerja serta kepada masyarakat luas menjadi lebih efisien dan akurat.



Sementara itu, Menata Kawan SETDA merupakan sistem database kepegawaian berbasis web yang memungkinkan pengelolaan data kepegawaian secara real-time. Melalui sistem ini, berbagai proses administrasi kepegawaian, seperti pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, berkas pensiun, dan penghargaan Satya Lencana dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.





Kami berharap bahwa kehadiran inovasi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan berbasis teknologi informasi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi inovasi ini. Semoga langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah.

PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum mendapatkan.

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO HUKUM



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari institusi masing-masing kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instrument pembantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum yang kemudian menjawab visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah lewat program kegiatan serta kinerja yang dapat diukur pencapaiannya melalui pelaporan akuntabilitas kinerjanya sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan Biro Hukum dalam mencapai target-target strategis yang ditetapkan pada Renstra Setda 2022-2026.

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Biro Hukum tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Biro Hukum tahun 2024 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumus yang digunakan ialah:

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Target) x 100%

Berikut adalah tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Biro Hukum tahun 2024. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum:

Tabel.
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,50	85,56	97	Sangat Tinggi
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	60	87,9	147	Sangat Tinggi

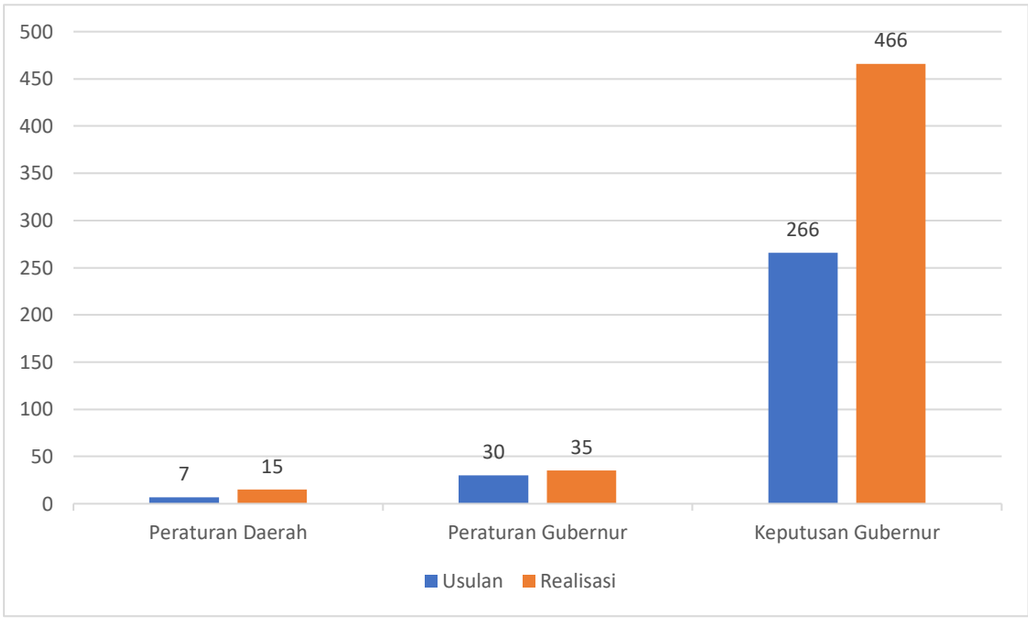
Dari data ini, terlihat bahwa kedua program tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat pencapaian yang tinggi, khususnya pada Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang melampaui target yang ditetapkan.

Permasalahan pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan pembangunan di bidang hukum merupakan bagian penting dalam permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah di bidang hukum sebagai perbedaan pencapaian antara kinerja Biro Hukum yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi pada saat ini.

Dari realisasi Indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat disampaikan bahwa pencapaian indikator khususnya pada Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi oleh kualitas draft atau usulan baik dari OPD pengusul maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang berdampak langsung pada efisiensi waktu pelayanan produk hukum seperti yang tertera pada aplikasi **E PERDA** yang merupakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi ruang kontrol baik dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri RI dalam efisiensi pengajuan usulan, fasilitasi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah.

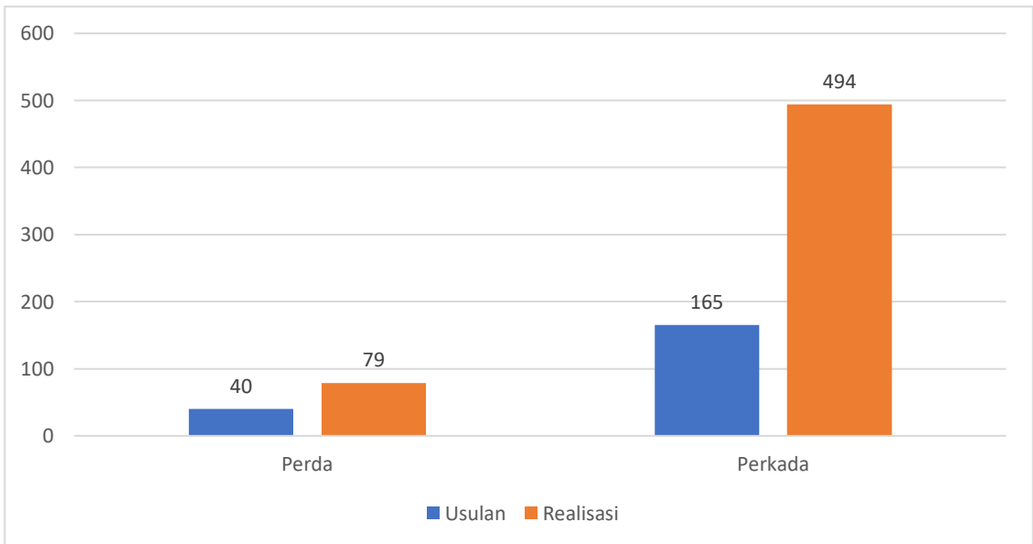
Pada Bagian Produk Hukum Daerah Provinsi dari usulan Peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah masing-masing 7 Peraturan Daerah, 30 Peraturan Gubernur, dan 266 Keputusan Gubernur. Dari usulan masing – masing sebagai berikut: 15 Peraturan Daerah, 35 Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur 466 dengan realisasi pada akhir tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 7 Peraturan Daerah atau sebesar 214 % dan untuk Peraturan Gubernur dengan usulan sebanyak 30 dengan realisasi sebesar 35 Peraturan Gubernur atau sebesar 117 % dan sudah melebihim capaian Target Renstra Biro Hukum. Untuk Keputusan Gubernur target pada Renstra Biro Hukum sebesar 266 Keputusan Gubernur realisasi untuk tahun 2024 sebanyak 466 Keputusan Gubernur atau sebesar 175 %. Yang digambarkan dalam grafik berikut ini:

Diagram.
Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi



Pada Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dari keseluruhan baik pada Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III dengan masing-masing indikator yang masuk pada aplikasi E – Perda yang menjadi acuan usulan Perda dan Perkada dan dapat diproses pada tahapan fasilitasi dan evaluasi sebesar: 40 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 79 Peraturan Daerah dan untuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan target: 165 Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota realisasi: 494 Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau sebesar 100 %. Yang disajikan dalam grafik berikut ini:

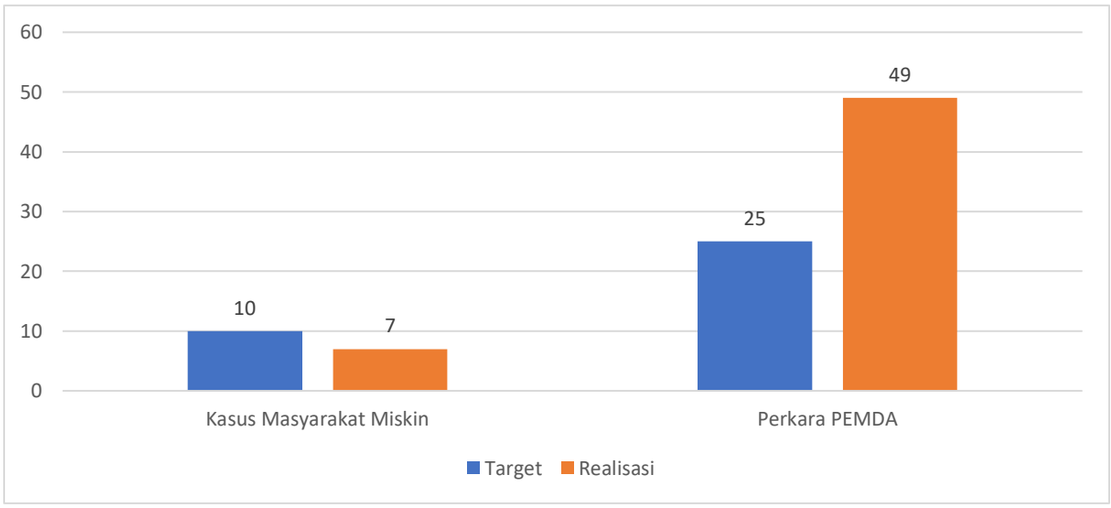
Diagram.
Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota



Sementara untuk pencapaian kinerja penangan kasus/perkara di lingkungan pemerintahan daerah provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2024 dari target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Biro Hukum sebanyak: 25 Kasus/Perkara dengan penjelasan sebagai berikut: 7 kasus

masyarakat miskin, 49 perkara Pemerintah daerah yang ditangani oleh Sub. Bagian Litigasi Biro Hukum, dengan realisasi pada Bagian Bantuan Hukum sebesar 56 Kasus/Perkara atau sebesar 224 %, realisasi tersebut digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut:

Diagram.
Bagian Bantuan Hukum (Sub Bag. Litigasi)



Dari penyajian target kinerja dapat disampaikan dalam pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum pada masing-masing bagian sesuai yang tertera dalam dokumen rencana kerja Biro Hukum untuk tahun 2024 dapat dikatakan ***baik***.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan Bidang Hukum tahun 2024 sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021 - 2026, Maka dilaksanakan kinerja sesuai target yang disampaikan pada tabel berikut:

Tabel.
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Lalu

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,00	86,65	1,11	80,00	89,16	1,11	88,50	85,56	0,97
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	-	-	-	50	95	1,9	60	87,9	1,465

Ada dua program utama yang diukur dengan rentan waktu 2022 hingga 2024 berdasarkan tabel capaian kinerja. Pertama, **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan **Indeks Kepuasan Masyarakat** menunjukkan pencapaian yang stabil, dengan capaian di atas target pada 2022 dan 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024 (97%). Kedua, **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dengan **Indeks Reformasi Hukum**

menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada 2023 (190%) dan 2024 (146,5%), mencerminkan efektivitas program dalam pelaksanaannya.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja kedua program mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2024 terdapat sedikit penurunan capaian pada Indeks Kepuasan Masyarakat. Sementara itu, Indeks Reformasi Hukum menunjukkan realisasi yang jauh melebihi target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas program dalam pelaksanaannya.

Perbandingan realisasi Kinerja Biro Hukum dengan target RENSTRA

Pencapaian realisasi kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Hukum untuk dapat memberikan penguatan pada pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Capaian Biro Hukum dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang ada pada dokumen Rencana Strategis, pada masing-masing bagian mendapat nilai yang cukup beragam seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target RENSTRA

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkatan Kemajuan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,56	92	93
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	87,9	68	129,26471

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa persentase capaian jika dibandingkan dengan target yang tertera pada dokumen perencanaan jangka menengah strategis Biro Hukum mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Perbandingan realisasi Kinerja Biro Hukum dengan target NASIONAL

Berikut ini adalah tabel perbandingan capaian dengan standar nasional sebagai acuan dalam menilai realisasi yang telah dicapai:

Tabel
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	%Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,56		
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	87,9		

Dalam tabel ini belum terdapat perbandingan dengan standar lainnya karena adanya kendala berupa ketiadaan data pembanding. Hal ini menyebabkan evaluasi masih terbatas pada data internal yang tersedia. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, diharapkan

data pembanding dapat diperoleh dari Provinsi atau wilayah yang lebih maju. Pemilihan ini didasarkan pada keunggulannya sebagai acuan wilayah yang lebih baik, sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kualitas yang lebih optimal.

Dalam pencapaian target-target strategis, program penunjang memberikan kontribusi positif dalam mendukung 3 bagian: Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/kota dan Bagian Bantuan Hukum yang pada akhirnya masing-masing berdampak pada pencapaian indikator kinerja utama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

Analisis peningkatan/penurunan kinerja pada Biro Hukum

Dalam pencapaian kinerja sesuai dengan perencanaan pelaksanaan program kegiatan pada Biro Hukum yang dilaksanakan pada tahun 2024 secara menyeluruh dianggap baik namun masih menyisakan beberapa hal yang dianggap perlu mendapat perhatian untuk dibenahi.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pencapaian kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam implementasi dan evaluasi menajemen kinerja internal agar senantiasa melakukan upaya inovasi sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan pada lingkungan Biro Hukum;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan melakukan penyelarasan antar dokumen perencanaan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD 2021-2026 yang memenuhi kriteria SMART;
3. Perlu adanya penyempurnaan pada pohon kinerja sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan berpedoman pada proses bisnis organisasi serta narasi yang menunjukkan upaya untuk mewujudkan kinerja;
4. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
5. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja;
6. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan menajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja;

Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntanbilitas kinerja berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Biro Hukum.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun faktor penghambat kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dapat diidentifikasi menjadi 2 faktor yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal:
    a. Kualitas draft/usulan produk hukum baik dari Perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah daerah kabupaten/kota belum sepenuhnya mengarah perundang-undangan.
    b. Kompleksitas permasalahan hukum baik yang sifatnya litigasi maupun non litigasi serta HAM yang dihadapi oleh pemerintah daerah
    c. Jangka waktu penyelesaian produk hukum yang difasilitasi masih bergantung pada hasil evaluasi Kementerian dan Perangkat Daerah teknis terkait.
2. Faktor Internal:
    a. Jumlah SDM yang mengkaji produk hukum pada masing-masing sub bagian belum memadai jika dibandingkan dengan volume draft/usulan produk hukum yang masuk.
    b. Perubahan regulasi menuntut kemampuan dan kompetensi ASN dalam meningkatkan produktifitas dan kedisiplinan serta etos kerja yang berorientasi pada kinerja yang terukur.
    c. Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Perancang Perundang-undangan yang dilaksanakan baik oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih terbatas.
    d. Belum optimalnya penerapan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur.
    e. Peluang tenaga teknis dalam pengelolaan Informasi dan Teknologi/Digitalisasi.

Dalam konteks pencapaian kinerja Biro Hukum, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang turut memengaruhi keberhasilan program dan kegiatan. Analisis efisiensi ini tidak hanya mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana strategi pengelolaan sumber daya telah diterapkan dengan baik. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data mengenai efisiensi sumber daya dan realisasi anggaran.

Tabel.
Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	SATUAN	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5-8)
				Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	%Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,50	85,56	0,97	2.684.615.700	2.514.493.509	0,94	0,03
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	60	87,9	1,465	2.495.384.300	2.374.806.922	0,95	0,51

Efisiensi penggunaan sumber daya dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel di atas berperan penting dalam pencapaian kedua indikator ini. Pengelolaan anggaran yang tepat guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak maksimal dalam peningkatan reformasi hukum serta kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, efisiensi dalam pengelolaan anggaran tidak hanya berdampak pada keberhasilan program, tetapi juga berperan dalam pencapaian indikator. Hal ini dipengaruhi oleh tata kerja serta tata cara pelaksanaan yang mendukung tercapainya indikator tersebut.

Indikator **Reformasi Hukum** diukur berdasarkan efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta keterjangkauan dan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan capaian indikator ini meliputi kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi, tingkat kepatuhan terhadap standar hukum, serta efisiensi dalam penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, untuk indikator ini dinilai dengan 4 variabel yaitu:

I. Variabel **Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** dalam **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** memiliki bobot **25%** dan berfokus pada efektivitas koordinasi dalam harmonisasi serta penguatan regulasi. Penilaian ini didasarkan pada dua indikator utama, yaitu **koordinasi dalam harmonisasi regulasi**, yang mengukur sejauh mana Kementerian Hukum dan HAM dapat menyelaraskan berbagai aturan hukum untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, serta **penguatan regulasi**, yang menilai upaya dalam memastikan peraturan yang diterbitkan lebih konsisten dan berdampak positif melalui sinergi dengan kementerian/lembaga terkait. Koordinasi yang baik dalam kedua aspek ini menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

II. Variabel **Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan** memiliki **bobot 25%** dalam **Indeks Reformasi Hukum (IRH)**. Penilaian dalam variabel ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan kapasitas ASN dalam menyusun regulasi yang berkualitas di tingkat pusat. Terdapat dua indikator utama dalam variabel ini, yaitu **kualifikasi dan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan**, yang menilai tingkat pendidikan, keahlian, serta pelatihan yang telah diikuti oleh ASN dalam bidang legislasi, serta **efektivitas penyusunan peraturan**, yang mencerminkan kemampuan ASN dalam menghasilkan regulasi yang jelas, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Peningkatan kompetensi ASN dalam aspek ini sangat penting untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki dampak positif dan dapat diimplementasikan secara efektif

III. Variabel **Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Peraturan Perundang-undangan** memiliki **bobot 35%** dalam **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** dan berfokus pada efektivitas evaluasi serta penyederhanaan regulasi. Tujuan utama dari variabel ini adalah memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap relevan, tidak tumpang tindih, serta mampu mendukung sistem hukum yang lebih efisien. Variabel ini terdiri dari **empat indikator utama**, salah satunya adalah **Penyederhanaan Regulasi pada Setiap Jenjang Peraturan Perundang-undangan**, yang menilai sejauh mana proses deregulasi dilakukan untuk mengurangi kompleksitas aturan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya penyederhanaan regulasi, diharapkan

sistem hukum menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

IV. Variabel **Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Peraturan Perundang-undangan** dalam **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** memiliki **bobot 35%** dan terdiri dari **empat indikator utama**. Salah satu indikator penting dalam variabel ini adalah **Tingkat Keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Hukum dalam Evaluasi Peraturan Perundang-undangan**. Indikator ini mengukur sejauh mana peran serta analis hukum dalam meninjau, menganalisis, dan mengevaluasi regulasi yang berlaku guna memastikan peraturan tersebut tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Keterlibatan aktif analis hukum menjadi krusial dalam mendukung reformasi regulasi, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dihasilkan telah melalui kajian yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Variabel **Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Peraturan Perundang-undangan** dalam **Indeks Reformasi Hukum (IRH)** memiliki **bobot 35%** dan mencakup empat indikator utama. Indikator ini menilai efektivitas **monitoring dan evaluasi hukum**, **proporsi regulasi yang dievaluasi**, **penyederhanaan regulasi**, serta **keterlibatan pejabat fungsional analis hukum** dalam proses evaluasi. Tujuan utama dari variabel ini adalah memastikan regulasi yang lebih sederhana, relevan, dan efektif guna mendukung kepastian serta keadilan hukum.

Sample: Kegiatan Indeks Reformasi Hukum (IRH)

merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan pengawasan dan mengukur tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam pelaksanaan kegiatan IRH, Pemerintah Daerah bertugas mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi variabel penilaian dalam IRH untuk diunggah sebagai data dukung. Proses penilaian IRH melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) serta Pemerintah Daerah, khususnya Biro Hukum.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian IRH, Pemerintah Daerah membentuk dua tim, yaitu **Tim Asesor** dan **Tim Kerja**. Tim Asesor berfungsi untuk melakukan penilaian mandiri terhadap dokumen-dokumen yang telah dipenuhi sebagai persyaratan penilaian IRH sebelum diajukan kepada Kanwil Kemenkumham untuk dilakukan penilaian lebih lanjut di tingkat pusat. Sementara itu, Tim Kerja bertugas melakukan pengumpulan dan pengunggahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penilaian IRH.



Dokumentasi Harmonisasi KumHam

Sementara itu, **Indikator Kepuasan Masyarakat** mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Aspek yang berkontribusi dalam pencapaiannya mencakup kecepatan, ketepatan, aksesibilitas, serta transparansi pelayanan publik. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, adanya mekanisme pengaduan yang responsif, serta alokasi anggaran yang mendukung peningkatan mutu layanan.

Keberhasilan dalam pencapaian **Indikator Kepuasan Masyarakat** sangat dipengaruhi oleh kecepatan, ketepatan, aksesibilitas, transparansi layanan, serta profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif dan dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting dalam memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan seluruh variabel penilaian ini, diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah dapat terus meningkat.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Biro Hukum dalam mencapai tujuan, sasaran dan Indikator Utama dilaksanakan program kegiatan dengan total jumlah **2** Program, **9** kegiatan serta **17** sub kegiatan yang pada tiap program, kegiatan dan sub kegiatan dialokasian anggaran sebagai pendukung pelaksanaannya. Adapun Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum merupakan program teknis yang menjadi penunjang keberhasilan atau kegagalan Biro Hukum dalam pencapaian target pernyataan kinerja seperti yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel.
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**88,50**	**2.684.615.700**	**85,56**	**2.514.493.509**	**97%**	**94%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai**	**100**	**14.605.000**	**100**	**14.605.000**	**100%**	**100%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	14.605.000	7	14.605.000	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**593.400.000**	**100**	**584.796.000**	100%	**99%**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	4	593.400.000	4	584.796.000	100%	99%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**384.487.710**	**100**	**364.953.850**	**100%**	**95%**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	29.390.160	1	29.200.000	100%	99%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Paket	45	303.897.550	425	288.388.750	944%	95%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	51.200.000	4	47.365.100	133%	93%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**1.265.097.590**	**100**	**1.151.420.450**	**100%**	**91%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	340.967.240	4	338.147.450	100%	99%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	52.010.350	2	51.999.500	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	872.120.000	3	761.273.500	100%	87%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**23.320.000**	**100**	**23.320.000**	**100%**	**100%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	23.320.000	1	23.320.000	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**270.705.400**	**100**	**256.405.000**	**100%**	**95%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	270.705.400	4	256.405.000	100%	95%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**133.000.000**	**100**	**118.993.209**	**100%**	**89%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	100.000.000	25	87.508.209	100%	88%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	33.000.000	25	31.485.000	100%	95%
2	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Indeks Reformasi Hukum**	**Nilai**	**60**	**2.495.384.300**	**87,9**	**2.374.806.922**	**147%**	**95%**
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	**Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**Laporan**	**4**	**1.384.171.300**	**4**	**1.326.934.800**	**100%**	**96%**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Kepgub/ Raperda/ Pergub	297	638.491.400	516	607.142.100	174%	95%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	5	215.879.000	5	204.903.500	100%	95%
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Raperda/ Perkada	205	529.800.900	573	514.889.200	280%	97%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	**Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Laporan**	**4**	**1.111.213.000**	**4**	**1.047.872.122**	**100%**	**94%**
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	kasus/ perkara	25	724.591.000	56	678.522.875	224%	94%
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	kasus/ perkara	25	386.622.000	21	369.349.247	84%	96%
	TOTAL				**5.180.000.000**		**4.889.300.431**		

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dicapai melalui koordinasi perencanaan yang matang dan efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pencapaian yang signifikan terlihat dari tersusunnya dokumen perencanaan yang baik serta peningkatan koordinasi dalam pelaporan keuangan. Administrasi keuangan dan kepegawaian juga menunjukkan hasil yang positif berkat pengelolaan yang lebih tertata dan sistem pencatatan yang akurat, sehingga mendukung efektivitas tugas ASN. Selain itu, pengadaan pakaian dinas dan atribut berhasil terlaksana dengan baik karena adanya proses yang transparan dan sesuai kebutuhan. Dalam administrasi data dan informasi pemerintahan, peningkatan integrasi sistem serta pemanfaatan teknologi telah mendukung tersedianya data yang lebih akurat dan mudah diakses. Pengelolaan barang milik daerah juga mengalami perbaikan dengan pencatatan yang lebih baik serta optimalisasi pemanfaatan aset.

Di bidang hukum, peningkatan kesadaran hukum menjadi salah satu capaian penting dalam program ini, melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada berbagai lapisan masyarakat. Adapun program ini mencakup, penyuluhan hukum, seminar, dan penyebarluasan informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Proses penyusunan peraturan

daerah dan kebijakan hukum dilakukan secara lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kepatuhan terhadap regulasi nasional, juga koordinasi yang lebih intensif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta instansi terkait dalam penyusunan regulasi dan kebijakan hukum. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang telah diterapkan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian dengan adanya layanan konsultasi hukum yang lebih mudah diakses juga membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan lebih cepat dan tepat.

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung secara langsung operasional pelaksanaan program kegiatan teknis dengan alokasi anggaran belanja rutin untuk tahun 2024 sebesar Rp. 2.684.615.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.495.384.300,-. Dan jika digabungkan ke dua Program yang ada pada Biro Hukum, maka besaran anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.180.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.889.300.341,-

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan elemen krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan yang terukur, monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta keterbukaan informasi, instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan publik. Melalui pendekatan yang holistik dan perbaikan berkelanjutan, tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dapat diatasi, sehingga pada akhirnya tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas,

Maka perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang disampaikan dengan akhir tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yangdilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Tengah dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%≤100%	**Sangat Baik**
2	76%≤ 90%	**Tinggi**
3	66%≤75%	**Sedang**
4	51%≤ 65%	**Rendah**
5	**≤ 50%**	**Sangat Rendah**

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Pada Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai

TABEL.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET TAHUN 2025
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	INDEKS	88,50	89,00	101%	90
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	NILAI	3,1670	0	0%	3,2500
		Persentase Data Capaian SPM	%	90,65	91	100%	90,68
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	%	100	100	100%	100
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%	100

Dalam mendukung capaian kinerja Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki 4 (lima) Sasaran program dan 5 (lima) Indikator kinerja program Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel ini menunjukkan beberapa sasaran dan indikator kinerja yang ditargetkan untuk tahun 2025, beserta capaian yang sudah diraih tahun 2024. Berikut adalah analisis perbandingan untuk masing-masing sasaran tersebut.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

   Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat
   Target : 88,50
   Realisasi : 89,00
   Capaian % : 101%
   Target Tahun 2025 : 90
   Capaian di atas target menunjukkan pelayanan telah meningkat dan memuaskan masyarakat.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas

Indikator Kinerja : Nilai Kinerja LPPD Provinsi
Target : 3,167
Realisasi 0
Capaian % : 0%
Target Tahun 2025 : 3,250

Capaian di bawah target menunjukkan perlu perhatian lebih untuk peningkatan tata kelola.

3. Meningkatkan Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)

Indikator Kinerja : Presentase Usulan Kajian Akademik DOB
Target : 100%
Realisasi : 91%
Capaian % : 100%
Target Tahun 2025 : 90%

Capaian di atas target menunjukkan kualifikasi usulan yang cukup baik, meskipun ada sedikit penurunan pada target tahun 2025.

4. Meningkatkan Kerjasama Daerah

Indikator Kinerja: Presentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian % : 100%
Target Tahun 2025 : 100%

Capaian ini menunjukkan bahwa semua kerjasama yang ditargetkan berhasil ditindaklanjuti.

Kesimpulan Umum

Capaian Positif : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Kerjasama Daerah menunjukkan hasil yang baik, melebihi atau pada target yang ditentukan.

Perlu Perhatian : Nilai Kinerja LPPD Provinsi membutuhkan perhatian mendalam untuk mencapai target ke depan.

Target Realistis : Beberapa target di tahun 2025 cenderung lebih realistis berdasarkan capaian saat ini.

A. PERBANDINGAN ANTAR TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Sangat Baik
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Masih Menunggu Nilai/Status Kemendagri
		Persentase Data Capaian SPM	90,65	91	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja utama yang telah dijanjikan pada tahun 2024, beberapa indikator kinerja program pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah terealisasikan “Sangat Baik” namun Nilai LPPD Provinsi menunggu hasil keputusan evaluasi MENDAGRI tentang nilai LPPD. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ayat (1) dan ayat (21) yang menerangkan bahwadisampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara Via Daring. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan telah di serahkan pada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemda dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUNINI DENGAN TAHUN LALU DAN TAHUN TERAKHIR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	88,56	114%	80	88,56	111%	88,50	89,00	101%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1145	0	0%	3,1300	3,1145	100%	3,1670	0	0%
		Persentase Data Capaian SPM	90,63	54,3	60%	90,63	90,52	100%	90,65	91	100%
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	0	0%	100	100	100%	100	100	100%
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

Tabel di atas menunjukkan target, realisasi, dan capaian dari beberapa indikator kinerja untuk pelayanan biro pemerintahan dan otonomi daerah. Berikut adalah penjelasan detail berdasarkan kolom dan indikator yang ada.

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

- Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat
- Target Tahun 2022: 78
- Realisasi Tahun 2022: 88,56
- Capaian Tahun 2022: 114% (melebihi target)

2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan

- Indikator Kinerja: Nilai Kinerja LPPD Provinsi
- Target Tahun 2022: 3,1145
- Realisasi Tahun 2022: 0 (belum ada realisasi)

- Target Tahun 2023: 3,1300
- Capaian Tahun 2023: 100%
- Target Tahun 2024: 3,1670
- Realisasi Tahun 2024: 0 (belum ada realisasi)

3 Meningkatkan Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)

- Indikator Kinerja: Persentase Data Capaian SPM
- Target Tahun 2022: 90,63
- Realisasi Tahun 2022: 54,3
- Capaian Tahun 2022: 60% (belum mencapai target)
- Target Tahun 2023: 90,52
- Realisasi Tahun 2023: 100%
- Capaian Tahun 2023: 100% (mencapai target)

4 Meningkatkan Kinerja Daerah

- Indikator Kinerja: Persentase Kinerja yang ditindaklanjuti
- Target Tahun 2022: 100
- Realisasi Tahun 2022: 100
- Capaian Tahun 2022: 100% (mencapai target)

Kesimpulan

- **Kinerja Tercapai:** Meningkatnya Capaian Realisasi Kinerja tiap tahunnya telah tercapai sesuai Target Kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.
- **Kinerja Baik:** Terdapat indikator yang berhasil mencapai atau melebihi target, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Usulan Kajian Akademik DOB pada tahun 2023.
- **Kinerja Menurut**: Beberapa indikator seperti Nilai Kinerja LPPD Provinsi memerlukan perhatian lebih karena tidak ada realisasi.
- **Perbaikan Diperlukan:** Indikator Persentase Data Capaian SPM pada tahun 2022 menunjukkan kurangnya pencapaian yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Tabel ini memberi gambaran yang jelas tentang efektivitas dan efisiensi dari kinerja pemerintah dalam mengelola otonomi daerah.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DI RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TAHUN AKHIR RENSTRA 2026	TAHUN KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00	92	97%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	0	3,3531	0%
		Persentase Data Capaian SPM	91	100	91%
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
    - Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat
    - Capaian 2024: 89,00
    - Target Tahun Akhir Renstra 2026: 92
    - Tahun Kemajuan: 97%
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas
    - Indikator Kinerja: Nilai Kinerja LPPD Provinsi
    - Capaian 2024: 0
    - Target Tahun Akhir Renstra 2026: 3,3531
    - Tahun Kemajuan: 0%
3. Meningkatnya Kualitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)
    - Indikator Kinerja: Persentase Data Capai SPM
    - Capaian 2024: 91
    - Target Tahun Akhir Renstra 2026: 100
    - Tahun Kemajuan: 91%

4. Meningkatnya Kerjasama Daerah
    - Indikator Kinerja: Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti
    - Capaian 2024: 100
    - Target Tahun Akhir Renstra 2026: 100
    - Tahun Kemajuan: 100%

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN RENSTRA

- Sasaran 1: Mencapai hampir target dengan progres yang baik (97%).
- Sasaran 2: Tidak ada pencapaian (0%), perlu perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja.
- Sasaran 3: Menunjukkan hasil yang lebih baik tetapi masih di bawah target (91%).
- Sasaran 4: Sudah mencapai target yang diharapkan (100%).

Ada pencapaian yang baik di beberapa sasaran, namun ada juga yang membutuhkan perhatian khusus untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sulteng memiliki Program dan Kegiatan yang berkaitan Program dan Kegiatan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada penilaian LPPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah masih menunggu hasil dari Kementsrian dalam Negeri tentang hasil Skor Kinerja yang di berikan pada penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju good governance dan clear government serta bercita-cita memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat di berbagai sektor dengan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. terakhir, Gubernur Sulawesi Tengah menekankan agar perangkat daerah serius melakukan perbaikan dengan memperhatikan validitas dan akuntabilitas data agar masyarakat bisa merasakan hasil kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju.

Sementara, Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri “Imelda” menuturkan LPPD merupakan laporan wajib yang setiap tahunnya harus diserahkan oleh seluruh kepala daerah dan hasil EPPD Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dari peringkat ke 29 mencapai peringkat ke 15 secara Nasional.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan meraih peringkat Ke – 3 LPPD 2023 atas penilaian LPPD 2022. Dua Tahun Berturut turut Makasar Kembali masuk dalam kategori 10 besar Penilaian LPPD.

Tabel Berikut menjelaskan Skor Kinerja LPPD Nasional:

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sulteng dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 hampir mencapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun pertama Renstra. Berikut adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja, yang mempengaruhi kinerja :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Dokumen Administrasi Pelayanan Urusan Pemerintahan disusun tepat waktu
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan masih menunggu hasil Nilai Keputusan KEMENDAGRI
		Persentase Data Capaian SPM	100%	91%	110%	Persentase Standar Pelayanan Minimal telah berdasarkan waktu inputan
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100%	100%	100%	Persentase Penyampaian 2 Daerah Pemekaran telah sampai pada Pemerintah Pusat, masih menunggu hasil usulan kajian DOB
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Naska Kerjasama telah ditindak lanjuti

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing-masing indicator pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap tiap indikator kinerja antara lain Naska yang telah ditindaklanjuti, tersusunnya Dokumen LPPD dan SPM, serta Dokumen Administrasi Pelayanan Urusan Pemerintahan yang tepat waktu.

F. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGAKT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,50	89,00	101%	Rp 1.593.418.000	Rp 1.585.351.174	101%	2,01
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	3,1670	0	0%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	101%	1,01
		Persentase Data Capaian SPM	90,65	91	100%	Rp 445.131.266	Rp 439.454.430	101%	2,02
3	Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB	100	100	100%	Rp 317.500.000	Rp 315.837.419	101%	2,01
4	Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Rp 1.077.929.270	Rp 1.046.028.881	103%	2,03

Berdasarkan table diatas disimpulkan bahwa pagu anggaran berapa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 5.852.500.000,- realisasi anggaran atas pencapaian 5 (empat) Sasaran indikator program pada tahun 2024 sebesar Rp 5.770.445.516,- (98,60%). Terdapat efesiensi anggaran sebesar 9,07%.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

NO	PROGRAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		KETERANGAN
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100%	Rp 2.509.448.464	98,60%	Rp 2.500.287.634	99%	100%	MENUNJANG
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Nilai Kinerja LPPD Provinsi	%	100%	Rp 2.903.051.536	97,49%	Rp 2.830.157.882	99%	100%	MENUNJANG
			Persentase Data Capaian SPM								
		Meningkatnya Kaulitas Usulan Kajian Daerah Otonomi Baru (DOB)	Presentase Usulan Kajian Akademik DOB								
		Meningkatnya Kerjasama Daerah	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti								

Berdasarkan table diatas, capaian indikator kinerja sasaran didukung oleh 2 (dua) program dengan 5 (Lima) indikator kinerja program, dengan hasil kegiatan antara lain :

a. Indikator program Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti. Untuk kerja sama dalam negeri diukur dari persentase kesepakatan Bersama yang telah disusun Perjanjian Kerjasamanya, maka pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif.

Indikator program tersebut tercapai melalui Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Kerjasama Daerah Dalam Negeri yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain :

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat

Kabupaten : Sigi, Donggala, Parigi Mautong, Poso, Tojo Una Una, Buol, Banggai, Banggai kepulauan, Banggai Laut

Kota : Palu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin Perjanjian Kerjasama tentang pembangunan, penempatan dan pengembangan transmigrasi di provinsi sulawesi Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 5 (lima) Tahun .

Kemudian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pelayanan Publik selama 5 (lima) Tahun

b. Pada pelaksanakan Sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang ikuti OPD Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menargetkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 masuk 5 besar secara Nasional.



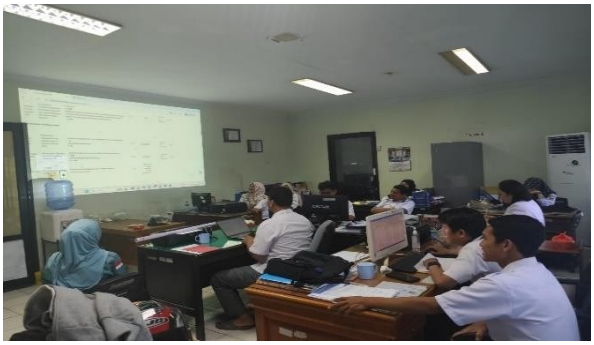
Saat menghadiri kegiatan optimalisasi dan tata kelola Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah yang diinisiasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah diruang Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (11/06/2024).





Pada pelaksanakan Sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang ikuti OPD Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah.





Telah disusun dan disampaiakan kepada Pemerintahmelalui Kementerian Dalam Negeri pada Triwulan 1 tahun2024, sedangkan ringkasan LPPD Tahun 2022 telah disampaiakan kepada Masyarakat.

c. Pada peningkatan Capaian SPM di buatlah Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyusunan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2024. Untuk meningkatkan Indikator Persentase Capaian SPM Provinsi Sulawesi Tengah. Maka pelaksanaan tersebut di Bimbing oleh Pemateri dari Kementerian Dalam negeri.







d. Adapun peningkatan pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan tugas oleh Kepala Daerah dalam menjalankan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dalam meningkatkan Pelayanan Kepuasan Masyarakat pada Rapat Rapat yang berikan tanggungjawab.





e. Dalam penanganan bidang Administrasi Penataan Wilayah dan Pemerintahan Umum yang di tindak lanjuti adalah bagian dari penganan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai berikut :

Hal ini ditunjang Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah serta Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Pada tahun 2024 di adakan Kegiatan Pendatanganan Berita Acara Kesepakatan Tapal Batas Gerbang Bersama Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso yang di hadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah.









REALISASI ANGGARAN

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang memaparkan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Bidang Keuangan yang membandingkan antara Anggaran Dan Realisasi Dari Pencapaian Program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan Akuntabilitas Keuangan yang dikelola oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

TABEL REALISASI ANGGARAN

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
- Jumlah dokumen perancanaan perangkat daerah	28.705.380,00	28.705.250,00	130,00
- jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.239.800,00	14.099.800,00	140.000,00
- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.476.830,00	8.476.650,00	180,00
- Jumlah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48.050.000,00	47.332.000,00	718.000,00
- Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	873.790.604,00	872.574.490,00	1.216.114,00
- Jumlah Laporan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0	0	0
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.233.000,00	443.183.294,00	2.052.706.00

- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	798.597.850,00	796.967.850,00	1.630.000,00
- Jumlah Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	292.355.000,00	288.951.300,00	3.403.700,00
- Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitas Penataan Wilayah	317.500.000,00	315.837.419,00	1.662.581,00
- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemerintahan Umum	445.131.266,00	439.454.430,00	5.676.836,00
- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	345.298.000,00	334.085.472,00	11.212.528,00
- Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan	224.630.000,00	222.204.235,00	2.425.765,00
- Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggara Pemerintahan	492.563.000,00	472.547.445,00	20.015.555,00
- Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah yang Difasilitasi	1.075.503.000,00	1.045.422.626,00	30.080.374,00
- Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	150.030.000,00	149.769.721,00	260.279,00
- Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	292.396.270,00	290.836.534,00	1.559.736,00

Keterangan Tabel:

- Pencapaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target X 100%
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang mendukung indikator

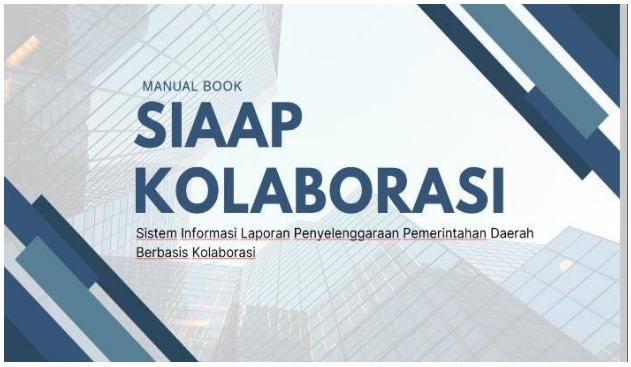
Berdasarkan uraian tabel diatas terlihat bahwa capaian target realisasi anggaran berada rata-rata nilai 98,60%.

INOVASI

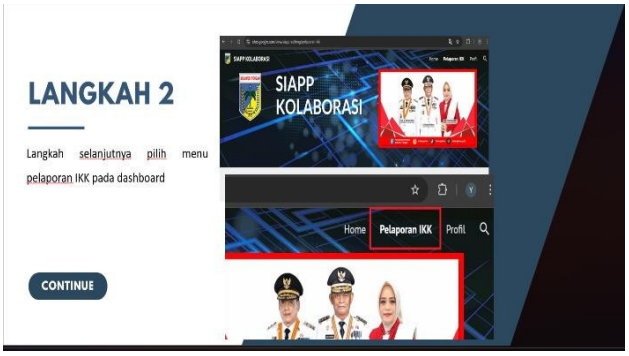
Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam integrasi data melalui sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SILPPD) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dikelola oleh Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan dukungan dari instansi terkait lainnya:

Tabel Daftar Inovasi 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

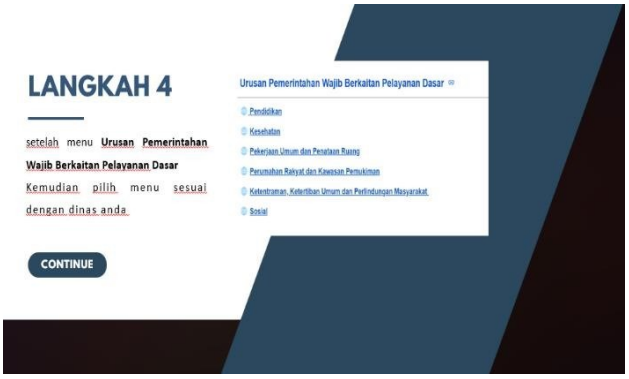
NO	NAMA INOVASI	URAIAN INOVASI	DAMPAK INOVASI
1.	SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SIAPP KOLABORASI)	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaborasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Dengan adanya sistem informasi ini semoga dapat bermanfaat serta membantu Pemerintah dalam mengelola, menyusun dan melaporkan kinerja pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah

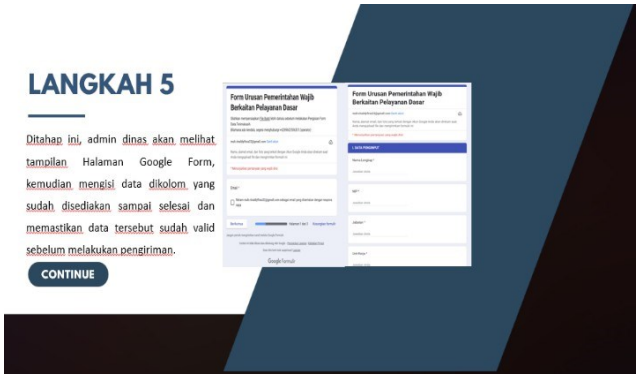


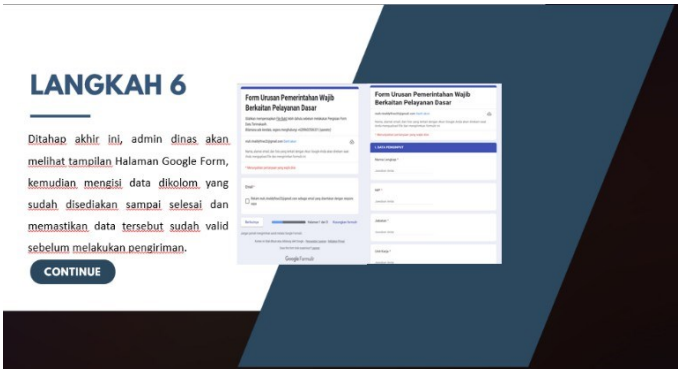












PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum mendapatkan Penghargaan di Tahun 2024.

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO ORGANISASI



AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 9 (Sembilan) indikator target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 secara ringkas ditunjukan oleh tabel berikut ini :

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini

1. Nilai SAKIP Pemda Sulteng pada tahun 2024 komponen pelaporan kinerja mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023, hal tersebut dilihat dari dari realisasi indicator nilai pelaporan kinerja Tahun 2024 sebesar 11,53 poin dan target sebesar 13 poin sehingga capaian kinerja sebesar 88,69 persen menunjukkan realisasi indikator ini belum mencapai target yang direncanakan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Permenpan nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah memperoleh nilai komposit dengan hasil skor 77,43 dari yang ditargetkan sebesar 78 dengan capaian kinerja 98,71%. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi standar dan proses organisasi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tergolong efektif, struktur dan proses organisasi yang ada mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan eksternal organisasi.
3. Salah satu faktor yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan Evaluasi Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota adalah partisipatif aktif dan kualitas dokumen yang disajikan sebagai data dukung pada Pemerintah Daerah. Pemahaman mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi guna meningkatkan kualitas dalam hal kematangan Organisasi pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

4. Capaian penerapan kinerja sistem kerja baru pada perangkat daerah pada tahun 2024 sebesar 100%.
5. Penerapan Budaya kerja perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023,hal tersebut dilihat dari mengevaluasi penerapan nilai budaya kerja tahun 2024
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) di perangkat daerah, telah ditetapkan target capaian kinerja berupa 65% perangkat daerah mendapatkan nilai RB kategori B pada tahun 2024. Namun, hingga saat ini, realisasi dari capaian tersebut belum dapat diukur karena belum adanya hasil indeks nilai RB perangkat daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat.
7. Meningkatnya kualitas PP Perangkat daerah, Indeks pelayanan publik pada tahun 2023 adalah 3.42 (B-) dimana terdapat 3 lokus evaluasi kemenpan RB, terdiri dari Dinas Sosial dengan IPP 3. 88, RSUD Undata dengan IPP 3.78 dan Samsat wilayah 11 sigi dengAN IPP 2,59 (C). ditahun 2025 Indeks Pelayanan publik meningkat mejadi 4,34 (A-) dimana RSUD undata IPPnya meningkat menjadi 3.97, Dinas Sosial 4.46 (A-) dan Samsat Sigi 4.59 (A).
8. Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Publik Pada tahun 2023 nilai Kepatuhan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Oleh OMBUDSMAN RI Berada pada kategori B di Zona Hijau dengan Nilai kepatuhan 81.37 **(kualitas tinggi)** pada evaluasi kepatuhan atas pelayanan publik ini terdapat 4 Lokus evaluasi yang terdiri dari RSUD undata dengan indeks kepatuhan 74.77, Dukcapil dengan nilai 80.96, DPMPTSP dengan nilai 86,26 dan Dinas Pendidikan dengan nilai 83.5. Pada tahun 2024 indeks Kepatuhan pelayanan publik Pemda Provinsi Sulawesi Tengah Oleh OMBUDSMAN RI mengalami peningkatan Berada pada kategori di Zona Hijau dengan Nilai kepatuhan **(kualitas tertinggi)** berada di peringkat ke 6 nasional dari 34 provinsi Se indonesia. pada evaluasi kepatuhan atas pelayanan publik ini terdapat 5 Lokus evaluasi yang terdiri dari Dinas Sosial dengan Nilai 97.07, RSUD undata meningkat dengan indeks kepatuhan 97,38 , Dukcapil meningkat dengan nilai 92.80 , DPMPTSP dengan nilai 97.89 dan Dinas Pendidikan dengan nilai 95.72.

9. Dengan ketiadaan data realisasi, capaian kinerja tidak dapat dihitung untuk sementara waktu. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap kemajuan dan pencapaian target tersebut perlu dilakukan setelah hasil indeks nilai RB tersedia. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 mengalami penurunan 0,54 poin dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024, Biro Organisasi meraih nilai 89,54 sedangkan pada tahun 2023 memperoleh nilai 90,08. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan antara lain kuisioner yang telah terisi pada tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2023 sehingga hasil kuisioner kurang efektif dan tidak merata di semua bidang pelayanan.

TABEL

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja	13	11.53	88.69
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan kelembagaan Provinsi	Nilai Kelembagaan Dimensi Struktur	78	77	98,71
3.	Terwujudnya Organisasi yang tepat Fungsi, Tepat Proses dan tepat Ukuran	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	35	32.05	91.58
4.	Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	100	100	100
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak pemda	75	67.10	89.10
6.	Meningkatnya Kualitas RB di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B	60		
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PD	Indeks Pelayanan Publik	4,01	4.34	108.22

8.	Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	88	96.17	109.28
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasaan Masyarakat Biro Organisasi	88,50	89,54	101,175

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan Beberapan Tahun Terakhir:

1. Realisasi nilai pelaporan kinerja Pemda Sulteng kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2023 sebesar 11,45 meningkat 0,02 poin dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 11,43 kemudian di tahun 2024 komponen pelaporan kinerja meningkat 0,08 poin dibandingkan Tahun 2023 terelaisasi sebesar 11,53 poin.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja evaluasi kelembagaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 3 tahun berturut-turut menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2022 target 72 dan realisasi 72 serta capaian kinerja 100%, yang kemudian meningkat pada Tahun 2023 dengan target 75 dan realisasi 75 capaian kinerja 100%. Peningkatan tersebut berlanjut pada Tahun 2024 dengan target 78 dan realisasi 77 capaian kinerja 98,71%. Dengan selisih 1 poin dari target, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target namun angka tersebut masih mencerminkan kinerja yang baik. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan Tahun 2024 kinerja lembaga secara keseluruhan tetap menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dengan capaian yang hampir selalu mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga, serta kemampuan untuk terus meningkat.
3. Telah dilaksanakan upaya dalam rangka Pembinaan guna mendorong pelaksanaan ketatalaksanaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh Sulawesi Tengah. Nilai yang dihasilkan semuanya berdasarkan data-data yang dihimpun searah pelaksanaan evaluasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengoordinasian yang baik pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terhadap 11 Variabel yang akan diukur menyebabkan Perangkat

Daerah pada Kab/Kota dapat memahami apa yang harusnya disiapkan dan dilaksanakan pada saat penilaian Evaluasi. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menjalankan Roda Organisasi dengan efektif dan efisien.

4. Realisasi Nilai Penerapan Sistem kerja Baru Perangkat daerah Sulawesi Tengah baru dengan indikator kinerja tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai direalisasikan tahun 2024 sebesar 100%.
5. Realisasi penerapan budaya kerja Perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan peningkatan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 58,10% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 67,10%
6. Pada tahun 2022, meskipun terdapat usaha untuk meningkatkan kualitas RB, realisasi masih berada di bawah target yang ditetapkan dengan capaian hanya 69.4% dari target.
    - Hingga saat ini data realisasi untuk tahun 2023 dan 2024 belum tersedia, pengukuran capaian belum dapat dilakukan karena hasil indeks nilai RB perangkat daerah belum diterbitkan oleh Inspektorat. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penilaian RB perangkat daerah untuk tahun 2023 yang dilakukan secara n tahun + 1. Jadi untuk tahun 2023, hasil penilaian baru akan tersedia pada tahun 2024. Dan untuk tahun 2024, hasilnya masih menunggu penyelesaian dari Inspektorat.
    - Perlunya percepatan proses pelaporan data indeks nilai RB agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara tepat waktu dan mendukung perbaikan di masa mendatang.
7. Pada tahun 2022 indeks pelayanan publik pemda sulteng Oleh kemenpan RB RI berada pada nilai 3.54 dengan kategori (B) dimana ditahun ini masih terdapat 2 Lokus evaluasi Pelayanan Publik yakni DPMPTSP dengan IPP 4.08 (A-) dan Samsat Wil 1 (Samsat Kota Palu) dengan IPP 2,99 (C). Tahun 2022 merupakan tahun ke 2 dengan Indeks pelayanan publik yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sebelumnya di tahun 2021 Indeks pelayanan publik pemda Sulteng berada di kategori (B-) dengan nilai 3,41. Dimana DPMPTSP memperoleh nilai IPP 4.08 (A-) dan Samsat Kota Palu 2,73 (C).

Pada tahun 2023 terget IPP mengalami penurunan menjadi 3.42 dengan kategori (B-) dengan alasan ditahun 2023 lokus evaluasi pelayanan publik berubah dan bertambah menjadi 3 lokus evaluasi yang sebelumnya DPMPTSP dan samsat Wilayah 1 kota palu menjadi Dinas sosial, RSUD undata dan samsat Wilayah 11 (sigi). Selain itu juga factor lainnya terdapat perubahan instrument penilaian evaluasi pelayanan publik yang berbeda dari tahun 2022. Dengan jumlah SDM yang masih kurang dan adanya instrument baru yang harus di sosialisasikan dan dilakukan pendampingan pada 3 lokus evaluasi provinsi ada 3 lokus evaluasi pada 13 kabupaten kota atau 39 lokus kabupaten/kota juga merupakan salah satu faktor menurunnya target di tahun 2023.

8. Sementara nilai kepatuhan pelayanan publik oleh ombudsman RI pada tahun 2022 masih terdapat 2 lokus evaluasi yakni Dinas Pendidikan dengan nilai kepatuhan pelayanan publik pada kategori (A) dengan nilai 88,69 dan DPMPTSP dengan nilai 62,79 dengan nilai kepatuan pelayanan publik 75.74 kategori (C) pada zona kuning. (penjelesan untuk target tahun 2023 -2024 ada pada table 3.1.a)
9. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan penurunan yang tidak cukup signifikan. Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2023 meningkat 6,75 poin dibandingkan tahun 2022 dan pada tahun 2024 turun 0,54 poin dari tahun 2023. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2023 naik cukup signifikan dari tahun 2022 dengan gap capaian kinerja sebesar 5,77 poin dan gap penurunan pada tahun 2024 sebesar 11,43 poin.

TABEL

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BEBERAPA TAHUN

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
(1)	(2)	(3)	Target	Realisas	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja	11,30	11,43	101,15	12	11,45	95,41	13	11,53	88,69
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan kelembagaan Provinsi	Nilai Kelembagaan Dimensi Struktur	72	72	100	75	75	100	78	77	98,71
3.	Terwujudnya Organisasi yang tepat Fungsi, Tepat Proses dan tepat Ukuran	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	25	21.03	84.13	30	27.03	90.10	35	32.05	91.58
4.	Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	0			0			100	100	100
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak pemda	0			75	58.10	75	80	67.10	89.47
6.	Meningkatnya Kualitas RB di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B	50			60			65		
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PD	Indeks Pelayanan Publik	3.54	3.54	100	3.42	3.42	100	4,01	4.34	108.22
8.	Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	78	75.74	97.10	80	81.37	101.71	88	96.17	109.28
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasaan Masyarakat Biro Organisasi	78	83,33	106,83	80	90,08	112,6	88,50	89,54	101,17



C. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi:

1. Dilihat dari perspektif target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026, realisasi Realisasi SAKIP Pemda Sulteng komponen pelaporan kinerja sebesar 11,53 poin dari target sebesar 14 poin dengan capaian kinerja sebesar 82,35 persen.
2. Berdasarkan target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026 evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berada pada peringkat komposit (P4) sebesar 78 dan realisasi pada Tahun 2024 sebesar 77 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,71%.
3. Telah dilaksanakan upaya-upaya dalam rangka pembinaan terkait mendorong partisipasi aktif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota baik dalam bentuk rapat fasilitasi maupun rapat koordinasi. Sehingga pada saat pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan pada tahun-tahun berikutnya dapat mencapai target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD.

4. Dilihat dari perspektif target akhir tahun rencana strategi (Renstra) Tahun 2026,realisasi penerapan sistem kerja baru pada perangkat daerah pada tahun 2024 mencapai 100 %.
5. Dilihat dari perspektif target akhir tahun rencana strategi (Renstra) Tahun 2026,penerapan budaya kerja perangkat daerah di tahun 2024 sebesar 67,10 dari target 90 poin.
6. - Untuk mengukur pencapaian terhadap target jangka menengah (2026), diperlukan data realisasi yang valid hingga tahun 2024.
   - Belum adanya hasil indeks nilai RB perangkat daerah dari Inspektorat menjadi tantangan dalam mengevaluasi tingkat kemajuan dan menentukan strategi akselerasi yang diperlukan.
   - Diperlukan percepatan proses pelaporan dan evaluasi indeks nilai RB perangkat daerah untuk memastikan keselarasan dengan target Renstra dan optimalisasi pencapaian tujuan strategis organisasiGggg
7. Capaian Indek Pelayanan Publik Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 4.34 dengan kategori (A-) di tahun 2024 sangat meningkat bahkan melebihi target capaian restra pada biro orgnisasi yang ditargetkan di tahun 2026 yang di targetkan di nilai 4.01
8. Sama halnya dengan dengan nilai kepatuhan pelayanan publik ditahun 2024 juga mencapai target dengan nilai 96.17 zona hijau kualitas tertinggi dengan kategori (A),sementara target nilai kepatuhan yang ditetapkan pada Restra Biro Organisasi pada tahun 2026 dengan capaian nilai 90
9. Dilihat dari perspektif target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,50 poin dari target sebesar 88,50 poin dengan capaian kinerja sebesar 101,17 persen.

Tabel

Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja	11,53	14	82,35
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan kelembagaan Provinsi	Nilai Kelembagaan Dimensi Struktur	77	78	98,71
3.	Terwujudnya Organisasi yang tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	32.05	45	71.22
4.	Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	100	77	129.89
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak pemda	67.10	90	74.55
6.	Meningkatnya Kualitas RB di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B		70	
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PD	Indeks Pelayanan Publik	4.34	4,01	1.08
8.	Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	96.17	90	1,06
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasaan Masyarakat Biro Organisasi	89,54	88,50	101,17

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

1. Jika dibandingkan dengan daerah lain realisasi nilai SAKIP Pemda Sulteng komponen pelaporan kinerja Tahun 2024 lebih rendah 0,44 poin dari realisasi Kab. Banggai sebesar 11,97 poin. Nilai SAKIP Pemda Kab. Banggai mengalami fluktuatif selama 3 tahun terakhir.
2. Berdasarkan target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026 evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berada pada peringkat

komposit (P4) sebesar 78 dan realisasi pada Tahun 2024 sebesar 77 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,71%.

3. Telah dilaksanakan Evaluasi dalam rangka Pembinaan kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibeberapa Kabupaten dengan hasil yang lebih baik disetiap tahunnya walaupun masih dibawah standar nasional. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran untuk melaksanakan Evaluasi kematangan di Kabupaten/Kota dan juga perlu dilakukan perbaikan sistem informasi yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga diharapkan realisasi disetiap tahunnya mendapat nilai yang tinggi dan dapat mencapai nilai yang sesuai dengan Standar Nasional.
4. Jika dibandingkan dengan daerah lain capaian kinerja penerapan sistem kerja baru pada pemda sulteng sudah menerapkan 100% dari 37 Perangkat daerah yang suda memberlakukan sistem kerja baru dan 3 perangkat daerah yang belum terdampak sekretariat daerah, sekretariat dewan dan polisi pamong praja , untuk pemkot Palu sudah menerapkan 100 %
5. Penerapan budaya kerja pemda provinsi dan daerah lain yaitu sama bahwa pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai berAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari.
6. Pelaksanaan Penilaian Reformasi Setiap perangkat daerah (misalnya pemerintah provinsi, kabupaten/kota) biasanya memiliki anggaran dan program yang berbeda. Membandingkan persentase RB masing-masing perangkat daerah dengan nilai RB pada tingkat nasional berarti melihat bagaimana tingkat efisiensi belanja pada masing-masing perangkat daerah dibandingkan dengan tingkat nasional secara keseluruhan dengan pengukuran perangkat daerah dengan nilai B.
7. Capaian Indek Pelayanan Publik Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 4.34 dengan kategori (A-) barada pada **posisi ke 11 nasional dari 34 provinsi** di indonesia dimana ditahun sebelumnya pada tahun 2023 provinsi Sulawesi tengah memperoleh peringkat ke 25 dari 34 provinsi dengan nilai IPP 3.42 kategori (B-).
8. Sementara nilai kepatuhan pelayanan publik ditahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai 96.17 zona hijau **kualitas tertinggi** dengan **kategori (A)** berada pada **peringkat ke 6** nasional dari 34 provinsi di Indonesia .dimana ditahun 2023 indeks

kepatuhan pelayanan publik pemerintah provinsi sulawesi tengah berada pada **peringkat ke 24** Nasional dengan nilai kepatuhan 81.37 kategori (B) pada zona hijau kulitas tinggi

9. Jika dibandingkan dengan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat Provinsi Tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi Tahun 2024 lebih tinggi 6,89 poin dari realisasi IKM Provinsi yang sebesar 82,65 poin. Nilai IKM Provinsi Tahun 2024 mengalami penurunan dari IKM Tahun 2023 sebesar 1,59 poin dari realisasi 84,24

Tabel
Perbandingan Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja	11,53	11,97	96
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan kelembagaan Provinsi	Nilai Kelembagaan Dimensi Struktur	77	78	98.71
3.	Terwujudnya Organisasi yang tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota	32.05	45	71.22
4.	Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	100	77	129.89
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Indeks Ber-Akhlak pemda	67.10	90	74.56
6.	Meningkatnya Kualitas RB di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B		70	Menungu LHE Inspektorat
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PD	Indeks Pelayanan Publik	4.34	4,3	100.9
8.	Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	96.17	90	106.85
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	Indeks Kepuasaan Masyarakat Biro Organisasi	89,54	82,65	108.37

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN:

- **Indikator Nilai Pelaporan Kinerja**

1. Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator Nilai pelaporan kinerja SAKIP Pemda Sulteng antara lain :
2. Kesulitan menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja jika dihubungkan dengan Perangkat Daerah yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator kinerja. Hal ini dikarenakan oleh informasi dari OPD tersebut masih sedikit/kurang dan belum secara langsung berkaitan dengan pencapaian indikator tersebut.
3. Keterlambatan Perangkat Daerah dalam menyampaikan Laporan Kinerja ke Biro Organisasi
4. Kesulitan mendapatkan data perbandingan realisasi dengan standar nasional

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Secara konsisten meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penanggung jawab capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Melakukan Desk penyusunan Laporan Kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah agar melengkapi 7 informasi capaian kinerja.
3. Mengupload dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai waktu yang telah ditentukan.





a. Indikator Nilai Kelembagaan Dimensi Struktur

Keberhasilan dan Kegagalan pada evaluasi kelembagaan pada instansi pemerintah dalam pencapaian peringkat komposit (P4) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi :

- **Keberhasilan** :
  a. Terlaksananya evaluasi kelembagaan instansi pemerintah provinsi sulawesi tengah dengan baik serta mengalami peningkatan peringkat komposit (P4) yang signifikan dari tahun ke tahun.
  b. Dari sisi standar dan proses organisasi pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tergolong efektif, sehingga struktur dan proses organisasi yang ada mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan eksternal organisasi.
  c. Adanya kerjasama yang solid dalam pelaksanakan komunikasi dan kolaborasi tim dalam memperbaiki strategi dan proses kerja.
- **Kegagalan** :
  a. Kurangnya respon perangkat daerah dalam penyampaian data dukung sehingga mempengaruhi peringkat komposit.
  b. Keterbatasan anggaran sehingga evaluasi hanya dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
  c. Kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.








b. Indikator Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota

Hambatan/permesalahan dalam pencapaian Indeks Kemetangan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain:

1. **Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.**
   Banyak OPD yang menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menghambat implementasi kebijakan yang efektif serta pencapaian tujuan organisasi.
2. **Pembagian Tugas yang Tidak Jelas**
   Struktur organisasi yang tidak jelas dan pembagian tugas yang tidak terdefinisi dengan baik dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar bagian dan ketidakefektifan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3. **Keterbatasan Anggaran**
   Pembiayaan yang tidak memadai menjadi salah satu kendala dalam pengembangan dan peningkatan kinerja OPD. Tanpa anggaran yang memadai, implementasi program-program yang mendukung kematangan organisasi menjadi terhambat.
4. **Keterbatasan dalam Monitoring dan Evaluasi**
   Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, sulit untuk mengetahui apakah program dan kebijakan yang dijalankan oleh OPD berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi.
5. **Kurangnya Komitmen terhadap Reformasi Birokrasi**
   Reformasi birokrasi yang masih setengah hati atau belum sepenuhnya dijalankan menghambat perbaikan sistem yang ada. Tanpa komitmen kuat terhadap reformasi ini, kemajuan menuju OPD yang matang menjadi lebih lambat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai Evaluasi Kelembagaan Kab/Kota Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. **Penyusunan Pedoman Evaluasi Kelembagaan**
   Biro Organisasi telah menyusun pedoman yang jelas dan terstruktur terkait evaluasi kelembagaan, agar proses evaluasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. **Penguatan Pengawasan dan Monitoring**
   Biro Organisasi meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan evaluasi kelembagaan di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan bahwa evaluasi dilaksanakan dengan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
3. **Penyusunan Laporan Evaluasi secara Berkala**
   Menyusun dan mengkomunikasikan hasil evaluasi kelembagaan secara berkala kepada pimpinan daerah dan pihak terkait, guna memperbaiki dan menyempurnakan sistem kelembagaan yang ada.
4. **Koordinasi dan Kolaborasi antar Instansi**
   Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Biro Organisasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan bahwa evaluasi kelembagaan melibatkan seluruh pihak yang relevan, serta mendapatkan dukungan yang lebih optimal.
5. **Evaluasi dan Umpan Balik secara Rutin**
   Melakukan evaluasi secara rutin terhadap hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan sebelumnya, serta memberikan umpan balik yang konstruktif agar dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya.





c. Indikator Imlementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai.

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator Nilai penerapan sistem kerja baru pada perangkat daerah antara lain:

1. Kesulitan menganalisa dalam penerapan sistem kerja baru
2. Keterlambatan perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk peningkatan nilai komponen penerapan sistem kerja baru pada perangkat daerah.

1. Meningkatnya koordinasi dengan perangkat daerah penanggung jawab penerapan sistem kerja baru
2. Melakukan Desk Penerapan Sistem Kerja baru pada perangkat daerah

d. Inikator Indeks Ber- Akhlak Pemda

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah antara lain:

1. Keterlambatan perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen.
2. Keterlambatan Perangkat daerah Dalam Pengisian Link Survei Indeks Ber-AKHLAK

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah dengan Melakukan Desk Penerapan Budaya Kerja Pada Perangkat Daerah









e. Indikator Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai RB B

1. Keberhasilan

a. Telah dimuat indikator pembentuk RB ke dalam arsitektur kinerja OPD Pengampuh RB General Pemda;
b. Adanya kolaborasi antar OPD Pengampuh RB General Pemda yang ditunjukkan dengan terdapat kenaikan nilai dari beberapa indikator pembentuk RB General level Pemda;
c. Peran APIP terhadap pelaksanaan RB yang ditunjukkan dengan dibentuknya satu Inspektur Pembantu yang khusus menangani pengawasan RB Pemerintah Daerah.

2. Kegagalan

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB sering kali dilakukan secara sporadis atau sekadar formalitas, yang berdampak kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan tidak segera teridentifikasi dan diperbaiki.

b. Aparatur sering kali kurang memahami konsep, tujuan, dan langkah-langkah pelaksanaan RB, sehingga Implementasi RB menjadi tidak efektif, karena SDM tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan program secara optimal.

c. Perangkat daerah masih terjebak dalam sistem birokrasi yang rumit, kaku, dan tidak efisien.

Solusi untuk Mengatasi Kegagalan

- **Peningkatan Sistem Pengawasan:** Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
- **Dorongan Inovasi:** Mendorong kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam layanan.







f. Indikator Indeks Pelayanan Publik Pemda

g. Indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan ini antara lain:

- Kepuasan Masyarakat: Salah satu indikator utama adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Survei kepuasan masyarakat sering digunakan untuk mengukur apakah layanan yang disediakan sudah memenuhi harapan atau tidak.
- Aksesibilitas Pelayanan: Aksesibilitas yang mudah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat juga menjadi ukuran penting. Ini termasuk keberadaan layanan di

berbagai lokasi, jam operasional yang fleksibel, serta kemudahan dalam mengakses informasi.

- Transparansi dan Akuntabilitas: Keberhasilan juga dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah bisa menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan akuntabel kepada publik terkait proses dan hasil pelayanan yang diberikan.
- Efisiensi Waktu dan Biaya: Kecepatan dan biaya yang efisien dalam memberikan pelayanan juga menjadi indikator kesuksesan. Pelayanan yang cepat dan tidak memakan biaya tinggi akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat.
- Inovasi dalam Pelayanan: Pemda yang mampu berinovasi dalam menyediakan layanan, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses pelayanan atau penerapan sistem online, sering kali mendapatkan penilaian yang lebih baik.
- Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan publik, melalui forum-forum konsultasi atau mekanisme partisipatif lainnya, juga merupakan tanda keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- Indikator Kinerja Organisasi: Indikator lainnya adalah kinerja unit-unit layanan dalam pemerintah daerah. Ini mencakup produktivitas, kompetensi, serta pelaksanaan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Hambatan untuk indicator pelayanan public dan nilai kepatuhan pelayanan belum ada hambatan karena capaian sudah melebihi target yang ditentukan.

h. Indeks Kepuasaan Masyarakat Biro Organisasi

Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi antara lain :

1. Pengisian Kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat belum efektif dan tidak menyeluruh ke semua bagian Pelayanan Pada Biro Organisasi.
2. Kurangnya pengetahuan responden terhadap pentingnya pengisian Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasil kuisioner kurang objektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Pembagian kuisioner dilakukan secara merata kesemua bagian pelayanan dengan menunjuk 1 koordinator untuk mengawasi dan mengumpulkan kuisioner

- **Analisis atas Efisiensi pengunaan sumber daya:**

Tabel

Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Tingkat Efisiensi (5-8)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja	13	11,53	88,69	417.588.000	409.456.740	98.05	-1.47
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan kelembagaan Provinsi	78	77	98.71	266.487.700	261.213.036	98.02	-9.70
3.	Terwujudnya Organisasi yang tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	35	32.05	91.58	882.035.600	857.434.635	97.21	-5.63
4.	Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	100	100	100	187.350.250	182.531.460	97.43	2.57
5.	Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Perangkat Daerah	75	67.10	89.10	83.190.000	82.388.840	99.04	-9.94
6.	Meningkatnya Kualitas RB di Perangkat Daerah	60			584.720.725	544.911.081	93.19	
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik PD	4,1	4.3	104	200.000.000	187.475.916	93.73	10.27
8.	Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	88	96.17	109	154.449.650	144.449.650	93.52	15.48
9.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi	88.50	89.54	101	2.434.501.465	2.411.201.890	99.04	1.04

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan kinerja**

Tabel
Analisis Program/kegiatan Yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian peryataan kinerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
1	2	3	4		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Biro Organisasi**	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	Indeks	90	2,434,501,465	89,54	2,411,201,890	90	99.04
1	**Perencanaan,Pengganggaran dan evalusi kinerja perangkat daerah**	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Organisasi	Nilai SAKIP Biro Organisasi Target Nilai 84	Nilai	84	64,840,950	83.55	64,418,150	90	99.35
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup Biro	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Yang Disusun	Dokumen	7	64,840,950	7	64,418,150	100	99.35
		Tersusunnya Pelaporan Kinerja Lingkup Biro	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Yang Disusun	Dokumen	6		6		100	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase pengelolaan Keuangan yang terpenuni sesuai ketentuan	Persentase	100	361,590,000	100	360,252,000	100	99.63
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya Gaji Non ASN dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Jumlah SPM Pencairan Gaji dan Tunjangan ASN/Non ASN yang tepat waktu	Dokumen	14	361,590,000	11	360,252,000	78	99.63
		Diterbitkannya SPM Tepat Waktu	Jumlah SPP/SPM yang Diterbitkan Tepat Waktu	Dokumen	250		241		96	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase pegawai yang memperoleh layanan kepegawaian	Persentase	100	446,813,000	100	442,871,660	100	99.12
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Lembar	57	38,540,000	57	38,473,000	100	99.83
2	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	orang	15	408,273,000	15	404,398,660	100	99.05

		Tersusunnya Data Kepegawaian Biro Organisasi	Jumlah Data Kepegawaian yang disusun	Dokumen	6		6		100	
		Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan SKJ Biro Organisasi yang disusun	Dokumen	3		3		100	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pelayanan Administrasi kantor yang tersedia dan terpenuhi	Persentase	100	1,200,831,415	100	1,190,098,130	100	99.11
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	582,304,365	6	580,190,150	100	99.64
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	29,999,950	2	29,912,575	100	99.71
3	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya Pelaksanaan Organisasi di Tingkat Provinsi Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten / Kota Yang Terkoordinasi	Kab/kota	14	588,527,100	11	579,995,405	100	98.55
		Tersusunnya Dokumen Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Organisasi Yang Disusun	Dokumen	2		2		100	
		Tersusunnya Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	Jumlah Laporan Internalisasi ASN Ber-AKHLAK	Laporan	1		1		100	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Biro Organisasi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terpenuhi	Persentase	100	22,220,000	100	21,000,000	100	94.51
1	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	unit	3	22,220,000	1	21,000,000	33	94.51
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Penataan Kearsipan Biro Organisasi Memenuhi Standar	Persentase Pelayanan Kearsipan Yang Memenuhi Standar	Persentase	100	23,676,100	100	23,278,550	100	98.32
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasikannya Surat Masuk dan Surat Keluar	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Teradministrasi	Persentase	100	23,676,100	100	23,278,550	100	98.32

		Tertatanya dan Tersimpannya Arsip	Persentase Arsip yang Tertata Sesuai Ketentuan	Persentase	100		100		100	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Pemeliharaan Barang dan Aset Biro	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara dan terinventarisasi	Persentase	100	314,530,000	100	309,283,400	100	98.33
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	Unit	22	257,900,000	22	252,653,400	100	97.97
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	Unit	50	56,630,000	50	56,630,000	100	100.00
II	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Meningkatnya kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi pelaporan kinerja	Nilai pelaporan kinerja	Nilai	13	2,875,821,925	11.53	2,769,861,358	89	96.32
		Terwujudnya Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota	Indeks	35		32.05		91.58	
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Nilai Kelembagaan Dimmensi Struktur	Nilai	78		77		98.71	
		Penerapan Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Persentase	100		100		100	
		Meningkatnya penerapan budaya kerja pada perangkat daerah	Indeks Ber-AKHLAK Pemerintah Daerah	Indeks	75		67.10		89.47	
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi Minimal "B"	Persentase	60		60		100	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4		4.34		108.23	
		Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	88		96.17		109.28	

1	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	Terwujudnya Struktur Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Proses dan tepat Ukuran	Peringkat Komposit Perangkat Daerah Provinsi	Persentase	78	1,148,523,300	78	1,118,647,671	100	97.40
		Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	Presentase Rekomendasi Penataan Kelambagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan	Persentase	100		100		100	
			Persentase Kab/Kota dengan Indeks Kematangan Organisasi kategori sedang	Persentase	100		90		90	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Jabatan	Persentase SKJ Yang Sesuai Rekomendasi Permenpan RB, Target	Persentase	100		100		100	
			Persentase Formasi Jabatan Fungsional yang sesuai Rekomendasi PermenpanRB	Persentase	100		100		100	
			Persentase Rekomendasi Hasil Validasi Evaluasi Jabatan oleh Kementrian PAN RB	Persentase	100		100		100	
1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya evaluasi Kelembagaan Povinsi	Laporan hasil evaluasi Kelembagaan Provinsi	Laporan	1	266,487,700	1	261,213,036	100	98.02
		Terlaksannya penataan kelembagaan perangkat daerah	Jumlah penataan kelembagaan perangkat Daerah	Dokumen	1		1		100	
2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terbitnya Dokumen Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota yang diterbitkan	Persentase	100	242,312,050	100	222,636,120	100	91.88
		Terevaluasinya Kelembagaan Kabupaten / Kota	Jumlah Kab/Kota yang mencapai Indeks Kematangan Kategori Sedang	Kab/kota	13		11		85	
3	Penataan Analisis Jabatan	Tersussunya Standar Kompetensi Jabatan Struktural	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang tersusun	Dokumen	50	639,723,550	50	634,798,515	100	99.23
		Tervalidasinya Standar Kompetensi Jabatan Struktural perangkat daerah	Jumlah SKJ yang mendapatkan Rekomendasi	Dokumen	1	113,562,850	1	113,562,850	100	100.00

		Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	50	140,256,600	50	139,056,000	100	99.14
		Tervalidasinya Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan yang tervalidasi	Dokumen	1	31,680,000	1	31,680,000	100	100.00
		Terverifikasinya Dokumen Usulan Formasi Jabatan Fungsional dari Perangkat Daerah	Persentase Usulan Permohonan Jabatan Fungsional yang terverifikasi	Persentase	100	127,315,000	100	123,590,565	100	97.07
		Terbitnya Pertimbangan Teknis (PERTEK) Penyusunan Tusi Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah	Persentase PERTEK Tusi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase	100	106,811,500	100	106,811,500	100	100.00
		Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	50	120,097,600	50	120,097,600	100	100.00
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Persentase Kebijakan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang diinternalisasikan	Persentase	100	1,727,298,625		1,651,213,687		95.60
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Informatif dan Bermanfaat	Persentase LKIP Pemerintah daerah dan LKIP Perangkat Daerah yang memenuhi 7 Informasi	Persentase	70.00	240,451,300	69.38	233,323,040	99	97.04
		Meningkatnya kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase	100	177,136,700	100	175,933,700	100	99.32
		Meningkatnya Penerapan sistem kerja baru pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kerja baru	Persentase	85.00		85.00		100	
		Meningkatnya Kualitas Peta Proses Bisnis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyesuaikan Proses Bisnis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru	Persentase	100		100		100	

		Meningkatnya Implementasi Budaya Kerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja berAKHLAK	Persentase	100		100		100	
		Meningkatnya Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3.01	446,399,650	4.34	424,175,566	144.19	95.02
			Persentase Kab/Kota dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Baik	Persentase	70	4,800,000	92	4,500,000	131.43	93.75
		Meningkatnya Kepatuhan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Ombudsman Yang Meningkatkan Kepatuhan Pelayanan Publik	Persentase	100	3,250,000	100	3,250,000	100	100
1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terinternalisasinya Road Map reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Perangkat Daerah yang di internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi	Perangkat Daerah	40	584,720,725	40	544,911,081	100	93.19
		Termonitoringnya Pelaksanaan Dokumen Renacana Aksi RB Pemda	Jumlah Dokumen Rencana Aksi RB Pemda yang di monitoring	Laporan	40		40		100	
		Tersusunya Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan RB perangkat Daerah Pemda Provinsi	Jumlah dokumen rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan RB perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Dokumen	40		40		100	
2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya LKIP Pemerintah Daerah	Jumlah LKIP Pemerintah Daerah	Dokumen	1	417,588,000	1	409,456,740	100	98.05
		Terverifikasinya LKIP Perangkat Daerah	Jumlah LKIP Perangkat Daerah yang Terverifikasi	Perangkat Daerah	50	125,251,300	50	120,028,040	100	95.83
		Tersusunnya IKU dan Perjanjian Kinerja revisi Pemerintah Daerah	Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja revisi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	157,729,600	2	156,526,600	100	99.24

		Terverifikasinya IKU Revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah IKU revisi dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang terverifikasi	Perangkat Daerah	50	19,407,100	50	19,407,100	100	100.00
		Terverifikasinya LKjIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Laporan	1	115,200,000	1	113,295,000	100	98.35
3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Survei Internal Ber-AKHLAK Pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Survei Internal Ber-AKHLAK pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	83,190,000	1	82,388,840	100	99.04
		Terdampinginya Perangkat Daerah dalam menerapkan budaya kerja berAKHLAK	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi budaya kerjanya	Perangkat Daerah	40	83,190,000	40	82,388,840	100	99.04
4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terbinanya Perangkat Daerah tentang pelaksanaan Sistem Kerja baru	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	Perangkat Daerah	40	187,350,250	40	182,531,460	100	97.43
		Terevaluasinya Perangkat Daerah yang menerapkan pelaksanaan sistem kerja baru	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	Perangkat Daerah	40		37		93	
		Terdampinginya Perangkat Daerah dalam Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah sesuai Sistem Kerja Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusunan Proses Bisnis dan SOP sesuai Sistem Kerja Baru	Perangkat Daerah	40		40		100	
		Tersusunnya Proses Bisnis Pemerintah Daerah sesuai Sistem Kerja Baru	Jumlah dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah sesuai Sistem Kerja Baru	Dokumen	1		0		0	
5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terbinanya Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang dibina pelayanan publiknya	Perangkat Daerah	50	454,449,650	50	431,925,566	100	95.04
		Terimlementasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daeah yang menyusun dan mengimlementasikan Standar Pelayanan	Persentase	100	205,289,650	100	187,120,666	100	91.15

		Terdampinginya Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Aplikasi SKM Online	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik	Perangkat Daerah	50	4,800,000	49	4,500,000	98	93.75
		Terbinanya Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Pelayanan Publik Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Kab/Kota yang di bina Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Lokus Kab/kota	39	241,110,000	39	237,054,900	100	98.32
		Terdampinginya Perangkat Daerah Lokus Evaluasi dalam Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah Lokus Evaluasi Yang Didampingi dalam Kepatuhan Pelayanan Publiknya	Perangkat Daerah	5	3,250,000	5	3,250,000	100	100.00
						5,310,323,390		5,181,063,248	129,260,142	97.57

REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024, anggaran pendukung sebesar Rp. 5.310.323.390,- (Lima milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp. 136.800.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.740.560.590,-
   BELANJA OPERASI Rp. 4.877.360.590,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 432.962.800,-
   Total Pagu anggaran Rp.**5.310.323.390,-**

Tabel 3.2

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	3	4	5	6
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**2.434.501.501.465**	**2.411.201.890**	**99.04%**
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64.840.950**	**64.840.950**	**99.35%**
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	64.840.950	64.418.150	99.35%
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**361.590.000**	**360.252.000**	**99.63%**
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	361.590.000	360.252.000	99.63%
3.	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**446.813.000**	**442.871.600**	**99.12%**
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.540.000	38.473.000	99.83%
4.	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	408.273.000	404.398.660	99.05%
4.	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.200.831.415**	**1.190.098.130**	**99.11%**
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	582.304.365	580.190.150	99.64%
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.999.950	296.912.575	99.71%
7.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	588.527.100	579.995.405	98.55%

No	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	3	4	5	6
5.	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.376.100**	**23.278.550**	**98.32%**
8.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	23.376.100	23.278.550	98.320%
6.	**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.220.000**	**21.000.000**	**94.51%**
9.	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.220.000	21.000.000	94.51%
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**314.530.000**	**309.283.400**	**98.33%**
10.	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	257.900.000	252.653.400	97.97%
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.630.000	56.630.000	100%
II	**PENATAAN ORGANISASI**	**2.875.821.925**	**2.769.861.358**	**96.32%**
8.	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**1.148.523.300**	**1.115.647.671**	**97.40%**
12.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	266.487.700	261.213.036	98.02%
13.	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabuapten/kota	242.312.050	222.636.120	91.88%
14.	Penataan Analisis Jabatan	639.723.550	634.798.515	99.23%
9.	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**1.727.298.625**	**1.651.213.687**	**95.60%**
15.	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	584.720.725	544.911.081	93.19%
16.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	417.588.000	409.456.740	98.05%
17.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	83.190.000	82.388.840	99.04%
18.	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	187.350.250	182.531.460	97.43%
19.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	454.449.650	431.925.566	95.04%
	Total	**Rp.5.310.323.390**	**RP.5.181.063.248**	**98%**

Dari tabel 3.2 dapat dilihat, bahwa total anggaran Biro Organisasi tahun 2024 sebesar **Rp.5.310.323.390,-** direalisasikan sebesar **Rp.5.181.063.248,-** dengan persentase **98%,** dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar **2**%. Hal ini dapat tercapai disebabkan oleh adanya komitmen bersama, kerja sama dalam peningkatan SDM pada

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna menunjang keberhasilan Program dan Kegiatan .

Inovasi

Dalam rentang tahun 2024 Pegembangan Sistem Informasi Jabatan Terpadu (Sijabat) untuk membangun Penataan Jabatan Dalam Penataan SDM Aparatur lingkup Provinsi Sulawesi Tengah untuk menintegrasikan Data Anjab, ABK, Peta Jabatan, Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.

Penghargaan

Untuk Biro Organisasi sebagai tim Pendukung untuk mendapatkan penghargaan dalam bidang Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Nilai LAKIP dan Nilai Reformsi Birokrasi atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO ADM PEMBANGUNAN



AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (performance result) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (performance plan) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Pembandingan menghasilkan celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (performance improvement). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan :

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100$$

Capaian kinerja organisasi seperti dimaksudkan di atas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Dalam mengukur kinerja program tersebut, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut itu sendiri didedukikan dari hubungan sebab-

akibat antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input dan indikator kinerja output. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program umumnya dihasilkan dari capaian output kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Dalam mengukur capaian kinerja, pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut dianggap lebih terbebas dari distorsi aritmatis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%. Keberhasilan capaian kinerja diukur dengan dua indikator, yaitu keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) berupa outcome dari pemanfaatan hasil Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan keberhasilan kegiatan yang diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Administrasi Pembangunan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pimpinan sebagaimana pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisa Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 pada dasarnya terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Terwujudnya Penataan keuangan dan Kinerja yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**88.50**	**88.10**	**99.54%**	Sangat Tinggi
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan	**97%**	**84.51%**	**87.12%**	Tinggi

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 99,54% dari target sebesar 88,50 poin dengan realisasi sebesar 88,10 poin, dan Capaian Nilai Kwalitas Kebijakan Bidang Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 87,12% dari target sebesar 97% dengan realisasi sebesar 84,51%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang di laksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan. Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pembangunan.

Indikator capaian kinerja sasaran sangat ditentukan seberapa besar tingkat realisasi capaian keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi capaian keuangan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 menunjukkan bahwa dari sasaran straegis, secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangannya untuk masing-masing kegiatan dikategorikan 70%-100% yang dimaknai sangat berhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Perhitungan persentase capaian kinerja untuk tahun 2024 menunjukan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulaewsi Tengah menurut peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah termasuk kategori sangat tinggi. Capaian kinerja ini tentunya patut untuk diupayakan berada pada persentase yang sama atau lebih baik ditahun selanjutnya. Dengan capaian realisasi keuangan yang secara keseluruhan dikategorikan 70%-100%, sangat berhasil dan sudah menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan. Walaupun secara keseluruhan masih kurang optimal didalam pencapaian realisasi keuangan, ini dikarenakan adanya Sisa Lebih Penyerapan Anggaran (SILPA).

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dan Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel.

Capaian Kinerja beberapa Tahun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Terwujudnya Penataan keuangan dan Kinerja yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**80.00**	**77.87**	**97.33**	**85.00**	**82.16**	**96.65**	**88.50**	**88.10**	**99.54**
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan	**85**	**80.80**	**95.05**	**86.00**	**81.71**	**95.01**	**97**	**84.51**	**87.12**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Biro Administrasi Pembangunan mencatat presentase capaian kinerja hampir mencapai 100%, yaitu pada Tahun 2022 dengan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97.33% dengan realisasi sebesar 77,87 dari target yang telah ditentukan sebesar 80,00 poin. Sementara untuk di Tahun 2023, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat capaian maasih sama yaitu 96,65%, dengan realisasi 82,16, dari target yang telah ditentukan sebesar 85,00. Untuk Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian Sebesar 99,54,

realisasi sebesar 88,10 dari target sebesar 88,50. Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan pada tahun 2022 dengan capaian 95,05 realisasi 80,80 dari target 85,00. Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan pada tahun 2023 dengan capaian 95,01 realisasi 81,71 dari target yang telah ditetapkan yaitu 86.00. Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 87,12, realisasi sebesar 84,51, dari target yang telah di tetapkan sebesar 97.

Dari segi capaian kinerja dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi pada setiap capaian Indeks Kepuasan Masayarakat. Ini dapat dilihat pada tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 97.33% dengan realisasi sebesar 77.87 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 80.00 poin. Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan masyarakat terjadi penurunan capaian kinerja yaitu 96,65%, dengan realisasi sebesar 82,16 poin dari target 85,00. Pada tahun 2024 Indeks Kepuasan masyarakat Kembali terjadi kenaikan capaian kinerja yaitu 99,54%, dengan realisasi sebesar 88,10 poin dari target 88.50 poin.

Untuk capaian Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2022 untuk capaian Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan capaian 95,05%, realisasi sebesar 80,80 poin dari target sebesar 85 poin. Sementara pada tahun 2023 capaian Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan capaian 95,01%, realisasi sebesar 81,71 poin dari target sebesar 86,00 poin. Sementara pada tahun 2024 capaian Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan capaian 87%, realisasi sebesar 84,51 poin dari target sebesar 97.00 poin.

C. Perbandingan Realisasi Tahun ini dan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel. Realisasi Tahun ini dan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 4/5x100*
	Terwujudnya Penataan keuangan dan Kinerja yang baik	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro**	**88.10**	**95**	92.73%
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan	**84.51**	**97**	87.12%

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi tahun ini dengan target akhir Renstra 2026 dapat dilihat dari sasaran terwujudnya penataan keuangan dan kinerja yang baik dengan 2 indikator kinerja yaitu pertama pada Indeks Kepuasan Masyarakat dengan tingkat kemajuan sebesar 92,73% dari target akhir renstra tahun 2026 sebesar 95% yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 88,10% dengan kata lain bahwa selisih tingkat kemajuan sebesar 5%. kedua pada Nilai Kualitas kebijakan bidang pembangunan dengan tingkat kemajuan sebesar 87,12% dari target akhir renstra tahun 2026 sebesar 97% yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 84,51% dengan kata lain bahwa selisih tingkat kemajuan sebesar 3%.

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja tinggi. Sedangkan untuk nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan dalam kategori capaian realisasi kinerja tinggi. Secara keseluruhan, capaian dari kinerja tahun 2024 mencerminkan bahwa pelaksanaan indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dianggap berhasil, beberapa faktor yang mempengaruhi

adalah telah dibentuknya Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang mempunyai tugas mengevaluasi penyerapan realisasi anggaran pada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibentuknya Tim Standar Biaya Umum (SBU) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan tekhnis pembangunan daerah, telah dibentuknya Tim Desk Anggaran APBD, APBN dan Wilayah, serta Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Biro cukup mendukung secara kuantitas.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Standard Nasional Tahun 2024.

Untuk Biro Administrasi Pembangunan tidak memiliki Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Program dan Kegiatan Nasional

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Tujuan dan sasaran Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun pertama Renstra, dengan tercapainya indikator tujuan maupun sasaran sebesar 100%.

Sasaran kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab mengelola dua program yaitu penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dan program kebijakan administrasi pembangunan. Segmen ini akan secara khusus membahas tentang program kegiatan serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran kinerja Biro Administrasi pembangunan. Sesuai dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat
2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah
3. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintah daerah

4. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintah daerah
5. Terwujudnya penataan keuangan dan kinerja yang baik
6. Peningkatan pelayanan publik
7. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan
8. Peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan
9. Peningkatan kualitas SDM aparatur
10. Peningkatan akuntabilitas
11. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
12. Pengendalian pembangunan
13. Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa
14. Peningktana kualitas kinerja BUMD
15. Peningkatan budaya kerja/Etika Birokrasi

Indikator kinerja untuk Biro Adminstrasi pembangunan merupakan adaptasi langsung dari aktivitas masing masing bagian dan sub bagian dalam mengkontribusikan capaian kinerja biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Berikut Kegiatan dan sub kegiatan terkait langsung pencapaian sasaran tahun 2024 pada Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

a) Program kebijakan adminstrasi pembangunan
   - Sub bagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD bertugas untuk Menyusun bahan untuk mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah.

Kegiatan Rapat Desk Realisasi Anggaran APBD





- Sub bagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN bertugas untuk Menyusun bahan untuk mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah.

Kegiatan Rapat Desk Realisasi Anggaran APBN



- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah bertugas untuk menyusun bahan kebijakan pembangunan, menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lainnya, melakukan sosialisasi dan koordinasi, pembinaan dan fassilitasi, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan, melakukan sinergitas program pembangunan , melakukan reformasi birokrasi serta melakukan pengelolaan kearsipan.

Kegiatan Rapat Internal Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah bertugas dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan laporan

pelaksanaan pembangunan, mengelola hasil analisis evaluasi untuk penyiapan laporan pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan aplikasi monev pembangunan unntuk pelaporan serapan anggaran dan progress kegiatan.

Kegiatan Rapat Pimpinan yang dipimpin langsung oleh gubernur Sulawesi Tengah



Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan pekerjaan yang berkualitas serta dengan didukung anggaran yang memadai melalui APBD serta terselenggaranya program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng. Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja Biro

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu dengan adanya aplikasi e-MEP yang bisa memantau langsung kegiatan perkembangan pembangunan. Aplikasi ini dapat mempercepat informasi bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pencapaian kinerja.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun ketiga Renstra hampir tidak ada kendala sehingga program dan kegiatan bisa dikatakan mengalami keberhasilan, maka tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik di semua tingkat pimpinan atau pejabat daerah guna mendukung tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung Kinerja yang lebih baik.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Biro Admimistrasi Pembangunan Setda Prov. Sulteng pada tahun anggaran 2024 melaksanakan Program/Kegiatan dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan serta meningkatnya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan.

Tabel.

Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5-8)
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	Terwujudnya Penataan keuangan dan Kinerja yang baik	**88.50**	**88.10**	99,54%	**1.842.119.742**	**1.735.052.935**	94,18%	5,35 %
		97	**84,51**	87,12	**2.260.211.277**	**2.220.348.584**	98,23%	-11,11

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, capaian anggaran sebesar 94,18% dari total anggaran 1.842.119.742 dengan realisasi sebesar 1.735.052.935. berdasarkan indikator kinerja dengan capaian 99,54% dengan realisasi sebesar 88,10 dari target yang ditentukan sebesar 88,50 dengan tingkat efisisensi sebesar 5,35%. Ini menunjukkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tanpa harus memanfaatkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, capaian anggaran sebesar 98,23% dari total anggaran 2.260.211.277 dengan realisasi sebesar 2.220.348.584. berdasarkan indikator kinerja dengan capaian 87,12% dengan realisasi sebesar 84,51 dari target yang ditentukan sebesar 97 dengan tingkat efisensi sebesar -11,11. Dengan kata lain untuk capaian efisiensi Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 belum mencapai target efisiensi. Efisiensi ini secara kolektif dimungkinkan karena beberapa faktor. Pertama

adalah persepsi positif pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil SKM Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Tingkat kepuasan untuk semua komponen SKM (yang merupakan adaptasi dari jenis layanan yang disediakan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). Kedua adalah sinergi kerja antar sub bagian yang baik. Dalam hal ini, setiap sub bagian dapat secara proaktif berkomunikasi dengan sub bagian tata usaha dalam mencari tahu apa-apa saja yang perlu mereka siapkan terkait pelaksanaan acara mereka. Sub bagian tata usaha, sebagai yang bertanggung jawab dengan pengelolaan internal Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk penyusunan peraturan dan pengelolaan hasil SKM, mendapatkan informasi cepat dengan pola koordinasi seperti ini sehingga persiapan untuk dokumentasi, penyebaran survei, penyiapan kendaraan transportasi dan lain-lain dapat dilakukan sesegera mungkin. Di sisi lain, masing-masing sub bagian juga saling berkoordinasi untuk dapat saling bertukar informasi penting terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian.

Faktor yang mendukung keberhasilan :

1. Perencanaan yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai target.
2. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian/permasalahan yang dihadapi serta penanganannya.

Hambatan :

1. Adanya keterbatasan dan kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait sehingga menyebabkan beberapa agenda dalam pencapaian target.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kompetensi SDM dimaksud kurang optimal.

REALISASI ANGGARAN

Tabel. Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
	• Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.811.888,-	680.878.400,-	188.066.512,-
	• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.290.107.848,-	1.161.241.342,-	-128.866.506,-

No	Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	3	4	5	6
	2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			
	Kegiatan :			
	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	119.701.950,-	163,009,100,-	43.307.150,-
	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	115.462.550,-	161.086.350,-	45.623.800,-
	• Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	414.135.000,-	514.134.950,-	99.999.950,-

	• Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	695.520.070,-	902.415.852,-	206.895.782,-
	• Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	158.420.125,-	168.372.875,-	9.952.750,-
	• Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	233.040.500,-	351.192.150,-	118.151.650,-

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai.

Jika dilihat dari sarana dan prasarana penunjang pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, masih terdapat kekurangan, namun kekurangan ini tidak mengurangi pelayanan kepada pimpinan daerah. Dari segi anggaran, pada Tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4,102,331,019,- *(Empat Miliyar Seratus Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Rupiah),* dimana anggaran tersebut terbagi dalam 2 (Dua) Program, 4 (Empat) kegiatan dan 8 (Delapan) sub kegiatan.

Realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 3,955,401,519,- *(Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)* atau realisai capaian 92,13% dari jumlah total pagu anggaran Perubahan.

INOVASI

Sejak dibentuknya Biro Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah. Biro Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 tidak/belum memiliki inovasi dalm rangka untuk pengembangan dan peningkatan kulitas kinerja.

PENGHARGAAN

Pada tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum mendapatkan.

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO EKONOMI



AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (performance result) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (performance plan) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Pembandingan menghasilkan celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (performance improvement). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan :

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100$$

Capaian kinerja organisasi seperti dimaksudkan di atas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Dalam mengukur kinerja program tersebut, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Capaian absolut itu sendiri dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input dan indikator kinerja output. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program umumnya dihasilkan dari capaian output kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Perekonomian dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2024.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisa Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100%	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

a. Perbandingan antara target dan realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan perekonomian daerah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	65	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	83,73	100%

Tabel diatas menggambarkan bahwa Indikator Kinerja Kunci Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, sudah ada target yang ditetapkan. Tetapi belum ada realisasi dan capaian karena merupakan Indikator Kinerja Kunci termasuk baru di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan belum dapat dihitung untuk sementara waktu. Sedangkan untuk target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83 dan nilai yang diperoleh tahun 2024 adalah 83,73.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Perbandingan realisasi 2 (dua) tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat di Biro Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	80,33	83,73

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 belum ada karena masih

Indikator Kinerja Kunci Baru di Biro Perekonomian, dikarenakan masih baru dan belum ada pembanding dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Perekonomian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan penurunan yang tidak cukup signifikan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Realisasi kinerja tahun 2024 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Perbandingan realisasi kinerja 2024, Jangka Menengah dan Nasional

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	Realisasi Target		
	Realisasi 2023	Target akhir renstra 2026	Tingkat Kemajuan
Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepuasan Masyarakat di Biro Perekonomian	83	92	90,22

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sasaran strategis di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam hal implementasi e-government di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut didukung anggaran yang memadai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal yang lain yang juga mendukung keberhasilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kinerja seluruh ASN dan Non ASN yang berada di lingkup Biro Perekonomian yang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan komitmen dan penuh rasa tanggung jawab sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Kendala-Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pasokan Fluktuaktif Pemahaman Masyarakat Tentang Ekonomi Syariah Masih Kurang
2. Adanya Kelangkaan di sebabkan Penyalaahgunaan BBM bersubsidi dan LPG tabubng 3 Kg
3. Kurangnya data dan informasi dari OPD terkait
4. Terbatasnya fasilitas operasional di lapangan, terbatasnya anggaran operasional yang tersedia
5. Terbatasnya data dan informasi terkait pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Terbatasnya data dan informasi terkait pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Terbatasnya data dan informasi terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tujuan dan Sasaran strategis Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dapat tercapai melalui pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Inflasi Terkendali Kegiatan Ekonomi Syariah mulai tumbuh dan berkembang
2. Terpantaunya Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg
3. Sinkronisasi Data yang akurat
4. Tersedianya Operasional di lapangan
5. Tersedianya anggaran yang cukup
6. Tersedianya Regulasi yang cukup terkait pengelolaan BUMD & BLUD

3.1 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 memaparkan capaian kinerja dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indiktor Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Tingkat Efisiensi
		Target	REALISASI	% Capaian	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*3*	*4*	*5*	*5*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	***100***	**38,870,000**	**38,600,240**	*99.31*	***0.69***
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah dokumen bimtek implementasi peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	38,870,000	38,600,240	*99.31*	***0.69***
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	***100***	**292,316,150**	**281,789,024**	*96.40*	***3.60***
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	292,316,150	281,789,024	*96.40*	***3.60***
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**14 Paket**	**14 Paket**	***100***	**753,298,110**	**746,135,650**	*99.05*	***0.95***
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa pelaksanaan peralatan dan perlengkapan	14 Paket	14 Paket	***100***	753,298,110	746,135,650	*99.05*	***0.95***
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	**Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	***100***	**525,559,500**	**481,673,296**	*91.65*	***8.35***
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	303,859,900	277,003,979	*91.16*	***8.84***
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	221,699,600	204,669,317	*92.32*	***7.68***
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	**Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumberdaya alam**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	***100***	**499,999,950**	**471,522,378**	*94.30*	***5.70***
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	159,876,100	149,855,324	*93.73*	***6.27***
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	179,773,950	170,493,962	*94.84*	***5.16***
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	160,349,900	151,173,092	*94.28*	***5.72***
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	**Jumlah laporan hasil pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	***100***	**660,516,050**	**607,946,720**	*92.04*	***7.96***
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	265,539,600	254,871,720	*95.98*	***4.02***
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	224,145,650	199,016,920	*88.79*	***11.21***
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	***100***	170,830,800	154,058,080	*90.18*	***9.82***

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai.

Pada tahun 2024 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.770.559.760 (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dimana anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) Program, 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.

Realisasi anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 2.632.667.308,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah) atau bisa dikatakan realisasi capaian 95% dari jumlah total pagu anggaran Perubahan.

PENGHARGAAN

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah raih penghargaan dalam ajang TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Award Tahun 2022. Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menerima penghargaan dalam ajang TPID Award Tahun 2022 dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Bertempat, di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tengah. Pada Ajang TPID Award Tahun 2022 kali ini, Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 135 Tahun 2022. Penghargaan TPID Award Tahun 2022 ini diberikan oleh Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto Kepada Gubernur beserta jajarannya yakni ; Pertama, memastikan jumlah pasokan ataupun ketersediaan pasokan bahan pokok yang mana dalam menjaga pasokan ini diperlukan kerja sama bersama Bulog, BUMD, dan pelaku usaha yang ada di pasar. Kedua, memastikan keterjangkauan harga. Hal ini dilakukan untuk memastikan, tidak ada yang mengambil keuntungan dengan menumpuk stok pasokan pangan. Sehingga harga yang dijual, dapat terjangkau oleh masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, memastikan kelancaran pendistribusian pasokan pangan antar daerah tidak terjadi kendala. Keempat, melakukan komunikasi yang efektif seperti menyebar informasi yang tidak menimbulkan kepanikan bagi masyarakat terhadap adanya kenaikan inflasi.

Gambar,Mitra Pengendalian Inflasi Terbaik wilayah Sulawesi Tengah tahun 2022



AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah tidak akan lepas dari proses penetapan indikator kinerja. Proses ini merupakan bagian yang penting bagi setiap instansi pemerintah karena indikator kinerja merupakan komponen utama sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan pada tahun 2024.

CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II. Perjanjian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke 1 (pertama) dari Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan dalam Bab II merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rancangan rencana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun tahunan.

Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2024.

TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	- Meningkatnya Reformasi Birokrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Meningkatnya kepuasan masyarakat	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66,50 Indeks
		- Nilai SAKIP	74 Nilai
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Indeks
2.	- Meningkatnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	- Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	**3%**
		- Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan	8%
		- Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi	100%

Berdasarkan hasil realisasi tabel Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) tersebut, maka prosentase tingkat capaian kinerja >80% berhasil dicapai. Ini menunjukkan hasil pencapaian kinerja berhasil dicapai sesuai dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi .

Keberhasilan yang dicapai dari yang di targetkan di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu :

1. Pengeluaran Perkapita 1.121 & Presentase Lembaga dan Yayasan Keagamaan yang terdaftar diKemenkumham yang diberikan bantuan 3 (%)
2. Presentase Kelembagaan Rumah Ibadah yang diberikan bantuan 8 (%)
3. Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi 100 (%)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Kesejahteraan Rakyat kebijakan Pengendalian Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Pengeluaran Perkapita	PENGELUARAN PER KAPITA SETAHUN / INDEKS HARGA KONSUMEN TAHUN DASAR X 100%	RPJMD 2021-2026, BPS.go.id	BAGIAN KESRA PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG
		Presentase Lembaga dan Yayasan Keagamaan yang terdaftar diKemenkumham yang diberikan bantuan	JUMLAH LEMBAGA DAN YAYASAN KEAGAMAAN YANG DIBERIKAN BANTUAN / JUMLAH LEMBAGA DAN YAYASAN KEAGAMAAN YANG TERDAFTAR X 100%	DATA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH, BIRO KESRA	BAGIAN MENTAL SPIRITUAL BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG
		Presentase Kelembagaan Rumah Ibadah yang diberikan bantuan	JUMLAH RUMAH IBADAH YANG DIBERIKAN BANTUAN / JUMLAH RUMAH IBADAH YANG TERDAFTAR X 100%	DATA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH, BIRO KESRA	BAGIAN MENTAL SPIRITUAL BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG
		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang terfasilitasi	JUMLAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR YANG TERFASILITASI / JUMLAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR YANG DIUSULKAN X 100%	DATA BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG	BAGIAN KESRA PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator capaian kinerja sasaran sangat ditentukan seberapa besar tingkat realisasi capaian keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi capaian keuangan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) sasaran straegis, secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangannya untuk masing-masing kegiatan dikategorikan 70%-100% yang dimaknai sangat berhasil dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Dengan capaian realisasi keuangan yang secara keseluruhan dikategorikan 70%-100%, sangat berhasil dan sudah menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan. Walaupun secara keseluruhan masih kurang optimal didalam pencapaian realisasi keuangan, ini dikarenakan adanya Sisa Lebih Penyerapan Anggaran (SILPA).

Pencapaian realisasi kinerja keuangan untuk masing masing kegiatan yang yang dikategorikan 70%-100% yaitu *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi* dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 97%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 86%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah seb1esar 94%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 95%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 94%

Serta Pencapaian realisasi kinerja keuangan untuk masing masing kegiatan pada program kesejahteraan rakyat yaitu dikategorikan 70%-100% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual sebesar 93%
2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar sebesar 98%
3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar sebesar 97%

TABEL
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100**	100	100	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1			
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Meningkatnya kepuasan masyarakat	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100**	97	97	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2			
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100**	86	86	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3			
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**	94	94	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1			
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100**	100	100	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12			
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100**	95	95	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1			
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100**	94	94	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75			
		Persentase lembaga dan yayasan keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan	**3**			
		Persentase kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan	**8**			
		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar yang terfasilitasi	**100**	98	98	
		Persentase kebijakan dan program non pelayanan dasar yang terfasilitasi	**100**	97	97	
		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	**2**			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	450			
		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	170			
		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan	**3**			

		Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	97	97	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	98	98	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	99	99	
		Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	**3**			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	98	98	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	100	100	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	93	93	

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terkahir

Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 96.426.359.000,- (*sembilan puluh enam milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*)**. Selanjutnya pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 58.472.899.700,- *(Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)***, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp. 35.953.459.300,- (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah)** atau minus 39%.

TABEL
SANDINGAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub	REALISASI					
			2023			2024		
			ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		96.426.379.000	81.504.856.922	85	58.472.900.050	54.711.476.113	94
1	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		2.524.979.955	2.410.085.796	95	2.590.553.100	2.484.617.986	96
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.649.450	28.085.600	92	43.397.500	43.275.000	100
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.025.040.000	1.003.341.000	98	888.050.000	857.038.995	97
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.090.000	62.569.280	63	115.794.000	100.043.309	86
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.452.000	488.870.743	94	504.501.000	475.665.580	94
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	277.709.480	270.237.100	97	586.092.200	583.296.000	100
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.829.025	52.056.610	95	99.508.400	94.478.150	95
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.210.000	504.925.463	98	353.210.000	330.820.952	94
2	Program : Kesejahteraan Rakyat		93.901.399.045	79.094.771.126	84	55.882.346.950	52.226.858.127	93
	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	92.853.239.945	78.059.854.576	84	54.807.847.950	51.178.049.109	93
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang	79.660.836.145	65.055.882.356	82	41.973.448.600	38.423.536.609	92

Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan**	214.175.000	214.175.000	**100**	137.999.800	134.263.466	**97**
Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan**	166.909.550	166.909.550	**100**	124.999.750	123.072.140	**98**
Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial**	167.649.700	167.649.700	**100**	137.999.850	137.262.040	**99**
Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III**	**499.424.850**	**486.182.300**	**97**	**673.499.600**	**654.211.372**	**97**
Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata**	190.665.600	183.285.560	**96**	404.999.900	396.054.320	**98**
Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja**	154.279.300	151.251.630	**98**	130.499.850	130.323.850	**100**
Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan**	154.479.950	151.645.110	**98**	137.999.850	127.833.202	**93**

Berdasarkan hasil sandingan anggaran program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 pada tabel tersebut diatas, mengalami penurunan sebesar **Rp. 35.953.459.300,- (Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah)** atau minus 39%. Penurunan ini disebabkan berkurangnya Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Adapun hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel 6 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dan pada lampiran *tabel 16 Laporan Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024*.

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub	TARGET RPJMD 2024		Anggaran	2024		
						ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4		5	7	8	9
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		-		**36.200.452.587**	**58.472.900.050**	**54.711.476.113**	**94**
1	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		-		1.708.475.617	2.590.553.100	2.484.617.986	96
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	35.000.000	43.397.500	43.275.000	100
	Kegiatan : Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	100	Persen	860.000.000	888.050.000	857.038.995	97
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	60.000.000	115.794.000	100.043.309	86
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	260.000.000	504.501.000	475.665.580	94
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	Persen	70.000.000	586.092.200	583.296.000	100
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	163.475.617	99.508.400	94.478.150	95
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	260.000.000	353.210.000	330.820.952	94
2	Program : Kesejahteraan Rakyat				34.491.976.970	55.882.346.950	52.226.858.127	93
	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial			32.391.976.970	54.807.847.950	51.178.049.109	93
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100	Persen	19.891.976.970	41.973.448.600	38.423.536.609	92
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	100	Persen	12.500.000.000	12.834.399.350	12.754.512.500	99
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial			1.050.000.000	400.999.400	394.597.646	98
	Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	100	Persen	350.000.000	137.999.800	134.263.466	97
	Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	100	Persen	350.000.000	124.999.750	123.072.140	98
	Sub Bagian : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	100	Persen	350.000.000	137.999.850	137.262.040	99
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III		-	1.050.000.000	673.499.600	654.211.372	97
	Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	100	Persen	350.000.000	404.999.900	396.054.320	98
	Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100	Persen	350.000.000	130.499.850	130.323.850	100
	Sub Bagian : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	100	Persen	350.000.000	137.999.850	127.833.202	93

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja dapat kita dihat di table Berikut ini :

Tabel

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Faktor Penghambat Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Adanya SDM yang memadai dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang baik	Koordinasi yang kurang Optimal, TUSI Belum terdistribusi dengan baik	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Adanya SDM yang memadai dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang baik	Koordinasi yang kurang Optimal, TUSI Belum terdistribusi dengan baik	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Adanya peningkatan SDM yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang baik	Koordinasi yang kurang Optimal, TUSI Belum terdistribusi dengan baik	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Koordinasi yang baik antar sekretariat daerah dengan dinas dan lembaga tehnis	Koordinasi yang kurang Optimal, TUSI Belum terdistribusi dengan baik	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelaksanaan Tugas yang lebih baik	Koordinasi yang kurang Optimal, TUSI Belum terdistribusi dengan baik	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelaksanaan Tugas yang lebih baik	Koordinasi yang kurang Optimal, TUSI Belum terdistribusi dengan baik	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya peralatan yang baik dalam membantu pelaksanaan tugas	Koordinasi yang kurang Optimal, TUSI Belum terdistribusi dengan baik	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	**Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga**			
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Terpenuhi administrasi yang baik untuk pelaksanaan pemberian bantuan hinah	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaa	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	**Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial**			
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II**			
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi antar Sekretariat daerah dengan dinas lembaga tehnis lainnya belum optimal	Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai Standar prosedur kerja, Pendistribusian TUSI yang Jelas dan mengoptimalkan Komunikasi dan Koorinasi Internal maupun external

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja maka perlu dilakukan analisa terhadap masalah yang dihadapi dan mencari solusi untuk mengatasinya melalui program kegiatan yang tepat. Berikut tabel permasalahan yang dihadapi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	Realisasi	Faktor Pendukung Keberhasilan	Faktor Penghambat Keberhasilan	Analisis Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	92	Adanya SDM yang memadai dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang baik	Koordinasi yang kurang Optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	98	Adanya SDM yang memadai dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang baik	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang Optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	63	Adanya peningkatan SDM yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang baik	Tidak tersedianya pelaksanaan Bimtek sesuai dengan kebutuhan	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	94	Terlaksananya Koordinasi yang baik antar sekretariat daerah dengan dinas dan lembaga tehnis	Belum optimalnya koordinasi antar sekretariat daerah dengan dinas dan lembaga tehnis	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	97	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelaksanaan Tugas yang lebih baik	Keterbatsan Anggaran yang tersedia	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	95	Terpenuhinya kebutuhan untuk pelaksanaan Tugas yang lebih baik	Keterbatsan Anggaran yang tersedia	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	98	Tersedianya peralatan yang baik dalam membantu pelaksanaan tugas	Masa Guna barang yang ada	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							
Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		**Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan**	**2**	**84**			
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	450	82	Terpenuhi administrasi yang baik untuk pelaksanaan pemberian bantuan hinah	Tidak Lengkap administrasi bagi Penerima Hibah	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	170	99	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaa	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		**Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial**	**3**	**96**			
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	94	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	98	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	97	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		**Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III**	**3**	**97**			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	96	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	98	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	98	Komunikasi dan Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan	Komunikasi dan Koordinasi yang kurang optimal	Program/Kegiatan akan berjalan dengan baik

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulteng tahun 2024 setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 58.472.899.700,-** ***(Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)***, anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Dalam pelaksanaannya Biro Keserjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulteng dana yang terserap atau yang terealisasi sebesar **Rp. 54.698.876.113,- (*Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*)**. Artinya penggunaan atau pemanfaatan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat dapat dilaksanakan secara baik dengan persentase sebesar 93,50% dari pagu anggaran, meskipun masih terdapat Sisa Lebih Penyerapan Anggaran (SILPA) yang tidak digunakan sebesar **Rp. 3.774.023.587**,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) atau sekitar 6,50% dari total anggaran namun, secara keseluruhan hasil yang dicapai dapat dikatakan baik dan memadai serta dapat memenuhi sasaran yang ditargetkan.

Realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA-OPD) Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian pelaksanaan Urusan Wajib pembangunan daerah yang terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan.

Total anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakayat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 202 sebesar **Rp. 58.472.899.700,-** ***(Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)***, yang terdiri dari :

1) Belanja Operasi

a. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 16.781.805.650,- (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Limah Puluh Rupiah)*

b. Belanja Hibah sebesar Rp. 40.886.151.850,- (*Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)*

2) **Belanja Modal**

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 573.092.200,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*)

Dalam pelaksanaannya dana yang terserap atau yang terealisasi sebesar **Rp. 54.698.876.113,- (*Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*)** atau sebesar 93,50%.

Tabel

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Anggaran (Rp)	Tujuan pelaksanaan	Realisasi	Eisiensi	Penyebab Efisiensi Tinggi/Rendah	Rekomendasi Perbaikan
1	2	3	4	5	6	7
1	58.472.899.700	Pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulteng	54.698.876.113	93.50%	Pengelolaan anggaran yang hati-hati, pemantauan real-time	Evaluasi lebih ketat, alokasi yang lebih baik berdasarkan prioritas

INOVASI

Dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel terdapat 2 (dua) inovasi yang telah diempelementasikan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

1. Aplikasi SIMHEGA (Sistem Informasi Hibah Keagamaan). Manfaat aplikasi ini yaitu :
   - Untuk mempercepat proses verifikasi calon penerima hibah, yaitu dengan mengirimkan proposal dan dokumen persyaratan hibah secara digital melalui aplikasi ini.
   - Untuk mencegah penerimaan hibah keagamaan secara berturut-turut, karena penerima hibah telah memiliki akun dan telah masuk dalam data base aplikasi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi asas keadilan dan pemerataan.
   - Penerima hibah tercatat dan teregistrasi melalui aplikasi

2. Aplikasi SI APEL SUPER (sistem aplikasi pelayanan persuratan dan dokumen proposal). Manfaat aplikasi ini yaitu :
    - Sistem ini membantu pengelolaan surat pada instansi dari manual ke digital sehingga efektif, efesien dan cepat.
    - Mengubah penyimpanan data yang berbentuk hardfile menjadi softfile, hal ini memberi kontribusi yang baik bagi tata Kelola surat masuk maupun keluar.
    - Sistem ini befungsi sebagai arsip digital sehingga membantu dalam kendali pengarsipan apabila terjadi kesalahan dalam pengarsipan secara manual

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pengadaan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Biro Pengadaan. Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel

Skala Nilai Peringkat Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Tahun 2024

a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Pencapaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 secara ringkas ditunjukan oleh tabel berikut ini :

Tabel
Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	80.22	100,2	**Sangat Tinggi**
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa	4	3.31	82,75	**Tinggi**

Capaian Indikator Kinerja pada Tabel 3.2 dengan rata-rata kinerja 91,4% menunjukkan kinerja **Sangat Tinggi,** dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Target Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk tahun 2024 adalah sebesar 80 dengan raihan realisasi hasil penilaian dari LKPP RI yakni 80,22, nilai tersebut naik 20,42 poin dari nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa tahun sebelumnya. Pengukuran untuk melihat capaian terhadap Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Tabel

Pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Indikator/ Sub Indikator	Bobot	Kriteria Penilaian	Formula Penilaian	Realisasi
1	**Pemanfaatan Sistem**				
	a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	10%	a. RUP dengan nilai RUP lebih dari sama dengan 50%, diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP; b. RUP kurang dari 50% diberi nilai 0.	Nilai SiRUP = Nilai Indikator SiRUP x 10%	**10**

	b. E-Tendering (Tender/Seleksi/ TenderCepat)	5%	a. menerapkan lebih dari sama dengan 50%, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. Sudah menerapkan kurang dari 50% diberi nilai 0.	Nilai E-Tendering = Nilai Indikator E-Tendering x 5%	**3,76**
	c. E-Purchasing	4%	**E-Katalog :** a. Sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai lebih dari sama dengan 50% pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. Sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai kurang dari 50% pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0.	Nilai E-Purchasing Katalog = Nilai Indikator E-Purchasing Katalog x 4%	**0**
		1%	**Toko Daring :** a. Sudah melakukan E-		**1**

			Purchasing melalui Toko Daring diberi nilai 100%; b. Belum melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 0.		
	d. Non E-Tendering/ Non E-Purchasing	5%	a. menerapkan lebih dari sama dengan 50%, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. Sudah menerapkan kurang dari 50% diberi nilai 0.	Nilai Non / E-Tendering = Nilai Indikator Non E-Tendering x 5%	**3,84**
	e. E-Kontrak	5%	a. Menerapkan lebih dari sama dengan 20%, diberi nilai sesuai persentase capaian; b. Sudah menerapkan kurang dari 20%, diberi nilai 0.	Nilai E-Kontrak = Nilai Indikator E-Kontrak x 5%	**4,29**
2	**Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ**	**30%**	Keterisian JF PPBJ = Jumlah pejabat fungsional PPBJ dibagi dengan jumlah formasi jabatan fungsional	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ = Keterisian JF PPBJ x 30%	**17,33**

			PPBJ sesuai rekomendasi LKPP atau penetapan Kemenpan RB RI		
3	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**40%**	Indikator tingkat kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level pro aktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator.	Nilai tingkat kematangan UKPBJ = Capaian variabel kematangan Proaktif : Jumlah total variabel x Bobot Indikator Hasil perhitungan nilai untuk masing masing capaian variabel kematangan UKPBJ, sebagai berikut: 9/9 = 40,00 8/9 = 35,56 7/9 = 31,11 6/9 = 26,67 5/9 = 22,22 4/9 = 17,78 3/9 = 13,33 2/9 = 8,89 1/9 = 4,44 0/9 = 0,00	**40**

Berdasarkan dari realisasi tersebut diatas sesuai dengan total hasil perhitungan 80,22 dengan predikat baik, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk mencapai target kinerja tahun 2024 membuahkan hasil sehingga mencapai predikat baik. Hasil Indeks Tata

Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat pada https://pmep.lkpp.go.id/itkp .

2. Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa

Nilai Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil evaluasi PEKPPP Mandiri yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai 3,31 dari nilai maksimum 4 atau Predikat B-(Baik). Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

a. Melibatkan para pihak terkait / *stakeholder* dalam proses penyusunan dokumen standar pelayanan sehingga dapat memberikan saran terkait pelayanan yang diberikan;
b. Informasi terkait pelayanan perlu untuk di publikasi lebih banyak lagi melalui berbagai macam media yang dapat di akses masyarakat dengan tampilan yang menarik;
c. Masih kurangnya akses bagi kelompok rentan, lansia dan disabilitas;
d. Perlunya ada petugas khusus yang dapat membantu kelancaran pengguna layanan bagi para kelompok rentan;
e. Pemanfaatan dan mensosialisasikan aplikasi SP4N Lapor dan aplikasi sejenis yang dapat menampung aduan dari pengguna layanan;
f. Inovasi yang sudah ada kiranya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2022 s/d 2024.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	80,22	100.2%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	3,31	82.75%

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa hanya ada di tahun 2024, karena terdapat beberapa perubahan indikator dari tahun tahun sebelumnya sehingga tidak ada gambaran target dan realisasi tahun tahun

sebelumnya. Indikator yang ada di tahun 2024 merupakan hasil rumusan dari arsitektur kinerja yang telah dirapatkan bersama tim pengelola RB internal pemerintah daerah atau yang lebih dikenal dengan Tim STU (*strategic transformation unit*).

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 dengan target Rencana Strategis

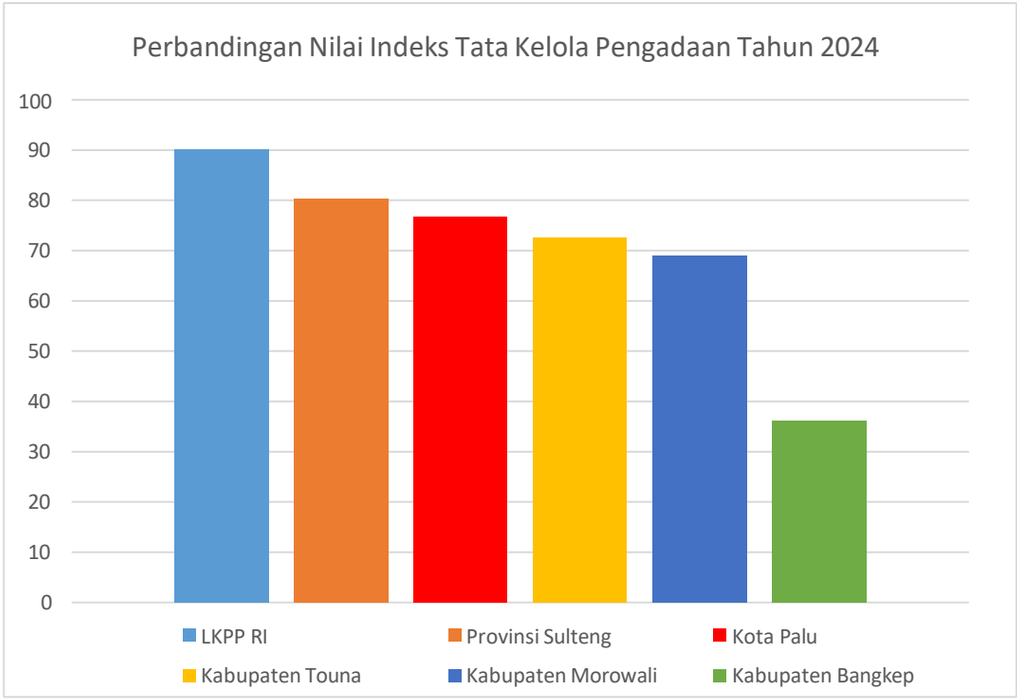
No.	Indikator	Tahun 2024			Targert akhir Renstra (2026)	Capaian 2024 terhadap Akhir Renstra 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	80,22	100.2%	80,75	99,34%
2.	Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa	4	3,31	82.75%	4,01	82,54%

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Sedangkan untuk nilai Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa masuk dalam kategori capaian realisasi kinerja tinggi. Secara keseluruhan, capaian dari kinerja tahun 2024 mencerminkan bahwa pelaksanaan indikator kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dianggap berhasil, meskipun masih ada ruang untuk dapat ditingkatkan lagi pada tahun tahun berikutnya.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Daerah Lain

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan

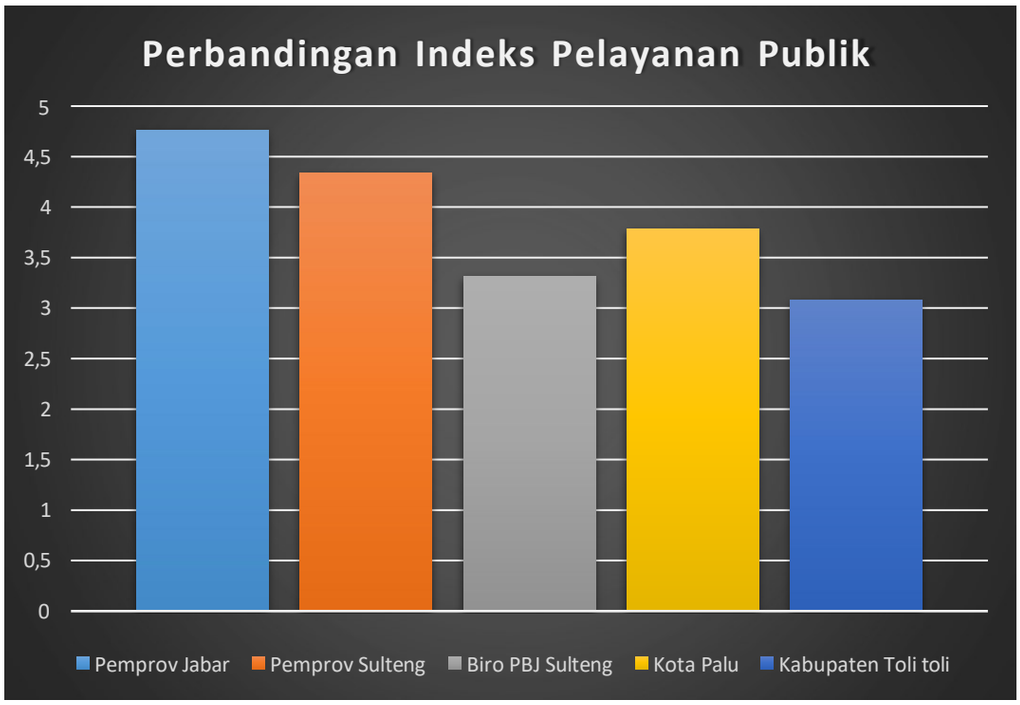
   Capaian realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2024 menunjukan hasil yang baik dimana nilainya meningkat signifikan 20,42 poin ke 80,22 dari penilaian tahun sebelumnya. Berdasarkan data hasil akhir ITKP tahun 2024 yang dirilis oleh LKPP RI pada tanggal 6 Januari 2025, di Sulawesi Tengah terdapat beberapa kabupaten yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Tojo Una Una (86,48), Kabupaten Buol (80,93) dan Kabupaten Banggai Laut (85,51) namun didapati juga kabupaten yang nilai ITKP nya mendapat predikat kurang yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan capaian senilai 36,24.



Sumber : https://pmep.lkpp.go.id/itkp

2. Indeks Pelayanan Publik

   Berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang dirilis pada 30 Desember 2024, kita dapat membandingkan kinerja pelayanan publik pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan kinerja pelayanan publik di daerah lain.



Provinsi Jawa Barat menjadi peringkat 1 dalam hasil evaluasi pelayanan publik dengan perolehan nilai 4,76, sedangkan untuk tingkat provinsi Sulawesi Tengah berada di posisi 11 nasional dengan Indeks Pelayanan

Publik sebesar 4,34. Sedangkan untuk perolehan nilai yang didapatkan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa pada evaluasi kinerja pelayanan publik adalah sebesar 3,31. Hasil ini membuat Biro Pengadaan Barang/Jasa menempati peringkat ketiga dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri tahun 2024. Biro Pengadaan Barang/Jasa merupakan satu-satunya Unit Lokus Evaluasi pada Sekretariat Daerah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja antara lain:

1. Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

   Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa menggambarkan kualitas Tata Keloa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa juga menjadi salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi. Pada tahun 2024 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Faktor pendorong tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

   a. Terpenuhinya bukti dukung level kematangan UKPBJ, sehingga nilai yang didapatkan dari sub indikator pembentuk nilai menjadi maksimal yaitu 40 poin;
   b. Selain itu Pemerintah Provinsi juga melakukan pendampingan (*coaching* clinic) kepada UKPBJ Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang capaian level kematangannya belum mencapai proaktif dengan variabel 9/9;
   c. Terisinya kebutuhan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama sebanyak 16 orang melalui pengangkatan pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TMT 1 Maret 2024, sehingga dapat mendongkrak nilai pada sub indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ;
   d. Meningkatnya kesadaran penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang telah disiapkan oleh LKPP RI. Pada sub indikator pemanfaatan sistem ini terdapat beberapa kategori yang menjadi faktor pendukung meningkatnya nilai indikator pemanfaatan sistem antara lain :
      1. SiRUP

         Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mengumumkan RUP nya pada sistem tepat waktu mencapai 90% sehingga untuk sub indikator SiRUP, Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai maksimal yaitu 10 poin;
      2. E-tendering;
      3. Toko Daring;
      4. Non E-Tendering/non e-purchasing; dan
      5. E-kontrak.

Selain faktor pendorong keberhasilan terdapat beberapa hal juga yang menjadi kendala/hambatan pada penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 antara lain:

a. Masih terdapat perangkat daerah yang tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Aplikasi LPSE dan hasil dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara manual tidak dicatatkan pada pencatatan non tender pada Aplikasi LPSE;
b. Tidak adanya sanksi terhadap perangkat daerah yang tidak melaksanakan pengadaan barang/jasa melalu LPSE dan hasil dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara manual tidak dicatatkan pada pencatatan non tender pada Aplikasi LPSE yang berdampak pada salah salah satu indikator penilaian terhadap ITKP Provinsi Sulawesi Tengah;
c. Terbatasnya kesempatan bagi PNS yang akan beralih ke Jafung PPBJ untuk mengikuti proses sertifikasi atau uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan;

Adapun upaya terkait dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan Desk Pengadaan Barang/Jasa;
2) Melaksanakan Workshop Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
3) Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/jasa;
5) Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan RUP;
6) Menyampaikan Usulan Perpindahan dari Jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional PPBJ kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
7) Memperbaharuan data dukung kematangan UKPBJ.











2. Indikator Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 didapati melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PAN RB melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai evaluatornya. Faktor pendorong capaian Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Telah tersedianya dokumen kebijakan pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat);
b. Penerapan Budaya Pelayanan 5 S dan petugas *Front Office* yang memakai seragam dan tanda pengenal;
c. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan publik telah tersedia (Tempat parkir, Kantin, Fotocopy, Toilet, Ruang Konsultasi dan Ruang Pengaduan)
d. Publikasi terkait pelayanan di berbagi media;
e. Adanya inovasi baru yaitu Sistem Pelayanan di *Front Office*;

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah:

1. Belum dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan pihak terkait dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan;
2. Belum dilakukannya peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan;
3. Belum tersedianya kode etik dan perilaku pelaksana pelayanan;
4. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana bagi kelompok rentan (Lansia, ibu hamil/menyusui, balita dan disabilitas);





f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya. Penggunaan sumber daya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Pengadaan Barang/Jasa didukung oleh 68 orang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja dalam rangka pencapaian organisasi dilakukan penambahan personil melalui pengangkatan tenaga kontrak sebanyak 24 orang.

Pada dasarnya realisasi sasaran strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan kecuali Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa. Adapun Tingkat efisiensi dalam Rupiah adalah sebagai berikut :

Tabel

EFISIENSI SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	80	80.22	100,2	3.222.766.800	3.179.612.864	98,66	1,34%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang/Jasa	4	3.31	82,75	2.375.862.850	2.300.836.279	96.84	3.16%

Sumber : Biro Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, dapat diketahui bahwa didapati efisiensi anggaran dalam setiap sasaran strategis yang hendak dicapai. Adapun efisiensi anggaran ini bersumber dari:

- Sisa Belanja Pengadaan Barang dan Jasa;
- Sisa Belanja Perjalanan Dinas;
- Efisiensi Honorarium Narasumber Kegiatan

  Dalam hal narasumber berasal dari Biro PBJ mendapatkan honorarium 50% dari jumlah yang telah di tetapkan dalam Standar Biaya Umum dan Jabatan narasumber tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai target kinerja, pada tahun 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Berikut akan disajikan data capaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2024.

Tabel

Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target		Realisasi		Capaian	
					Indikator	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
01	1			**Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Indeks Pelayanan Publik** **Indeks Tata Kelola Pengadaan**	**Indeks** **Indeks**	4 Indeks 80 Indeks	3.222.766.800	3,31 Indeks 80,22 Indeks	3.179.607.864	82,75 100,2	98,66
01	1	01		**Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	100 %	6.731.000	100 %	6.630.000	100,00	98,50
01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	6.731.000	4 Laporan	6.630.000	100,00	98,50
01	1	02		**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik**	**Persen**	100 %	674.100.000	100 %	669.793.994	100,00	99,36
01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	674.100.000	1 Dokumen	669.793.994	100,00	99,36
01	1	06		**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik**	**Persen**	100 %	761.298.250	100 %	732.799.953	100,00	96,26
01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2 Paket	54.076.600	2 Paket	54.061.308	100,00	99,97
01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 Paket	197.037.650	6 Paket	196.280.200	100,00	99,62
01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4 Laporan	510.184.000	4 Laporan	482.458.445	100,00	94,57
01	1	07		**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	100 %	553.444.360	100 %	551.164.000	100,00	99,59
01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	553.444.360	10 Unit	551.164.000	100,00	99,59
01	1	08		**Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	100 %	293.779.500	100 %	290.323.588	100,00	98,82
01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	229.429.500	1 Laporan	225.978.588	100,00	98,50
01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	64.350.000	1 Laporan	64.345.000	100,00	99,99

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Target		Realisasi		Capaian	
					Indikator	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
01	1	09		**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	100 %	933.413.690	100 %	928.896.329	100,00	99,52
01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17 Unit	466.260.000	17 Unit	465.041.329	100,00	99,74
01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43 Unit	37.520.000	43 Unit	36.800.000	100,00	98,08
01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehablilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1 Unit	429.633.690	1 Unit	427.055.000	100,00	99,40
07	1			**Prog. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa**	**Persen**	90 %	2.375.862.850	90,00 %	2.300.836.279	100,00	96,84
07	1	01		**Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	90 %	920.566.700	100 %	891.619.156	111,11	96,86
07	1	01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Laporan	287.232.300	1 Laporan	283.038.204	100,00	98,54
07	1	01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4 Laporan	361.295.400	4 Laporan	342.568.500	100,00	94,82
07	1	01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	4 Laporan	272.039.000	4 Laporan	266.012.452	100,00	97,78
07	1	02		**Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Persen**	90 %	765.859.750	100 %	756.150.531	111,11	98,73
07	1	02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1 Laporan	167.671.850	1 Laporan	165.454.644	100,00	98,68
07	1	02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Laporan	408.861.250	1 Laporan	404.716.470	100,00	98,99
07	1	02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1 Laporan	189.326.650	1 Laporan	185.979.417	100,00	98,23
07	1	03		**Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**	90 %	689.436.400	100 %	653.066.592	111,11	94,72
07	1	03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1 Dokumen	155.008.800	1 Dokumen	149.510.434	100,00	96,45
07	1	03	01	Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	10 Orang	350.021.600	10 Orang	344.263.390	100,00	98,35
07	1	03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1 Dokumen	184.406.000	1 Dokumen	159.292.768	100,00	86,38

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kapasitas pemerintahan daerah agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik Pengadaan Barang/Jasa dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.3.222.766.800,- dengan realisasi sebesar Rp.3.179.607.864,- atau 98,66%.

2. **Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam menunjang pencapaian kinerja, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Workshop Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Reviu Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- Desk Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Rapat Koordinasi Teknis Pematangan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Workshop Pengadaan Barang/jasa terhadap pelaku usaha/*Market Sounding*;
- Workshop Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengadaan Barang/jasa Lainnya bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha; dan
- Monitoring, Pemantauan dan Pendampingan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Dalam menunjang pencapaian kinerja, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Sosialisasi SiRUP;
- Pendampingan SiRUP;
- Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan;

- Pendampingan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan
- Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ;

Dalam menunjang pencapaian kinerja, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sulawesi Tengah;
- Bimbingan Teknis Strategi Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Konstruksi dan Non Konstruksi (Negosiasi/Mini Kompetisi) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pelatihan SPSE bagi Pengelola LPSE PBJ;
- Bimbingan Teknis Mini Kompetisi pada E-Katalog Lokal;
- Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan;
- Konsultasi Pengadaan Daring;
- Pembinaan User Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada 49 OPD Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- Pendampingan Manajemen Resiko Paket Strategis Provinsi Sulawesi Tengah.

REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Total belanja langsung program/kegiatan pada Biro Pengdaaan Barang/Jasa yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran sebesar Rp. 5,598,629,650 dan terealisasi sejumlah Rp.5,480,449,143,- atau 97,89%.

Tabel

Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Sisa
	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**3,222,766,800**	**3,179,612,864**		**43,153,936**
	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6,731,000**	**6,630,000**		**101,000**
	4.01.01.1.01.06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6,731,000	6,630,000	98.50	101,000

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**674,100,000**	**669,793,994**		**4,306,006**
	4.01.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	674,100,000	669,793,994	99.36	4,306,006
	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	**761,298,250**	**732,799,953**		**28,498,297**
	4.01.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54,076,600	54,061,308	99.97	15,292
	4.01.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	197,037,650	196,280,200	99.62	757,450
	4.01.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510,184,000	482,458,445	94.57	27,725,555
	4.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**553,444,360**	**551,164,000**		**2,280,360**
	4.01.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	553,444,360	551,164,000	99.59	2,280,360
	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**293,779.500**	**290,328,588**		**6,100,286**
	4.01.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229,429,500	225,978,588	98.50	3,450,912
	4.01.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64,350,000	64,350,000	100	-
	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**1,047,894,980**	**1,032,751,090**		**4,517,361**

	Daerah				
	4.01.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466,260,000	465,041,329	99.74	1,218,671
	4.01.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,520,000	36,800,000	98.08	720,000
	4.01.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	429,633,690	427,055,000	99.40	2,578,690
	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	**2,375,862,850**	**2,300,836,279**		**51,575,849**
	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**920,566,700**	**891,619,156**		**28,947,544**
	4.01.07.1.01.01 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	287,232,300	283,038,204	98.54	4,194,096
	4.01.07.1.01.02 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	361,295,400	342,568,500	94.82	18,726,900
	4.01.07.1.01.03 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	272,039,000	266,012,452	97.78	6,026,548
	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	**765,859,750**	**609,178,925**		**9,709,219**
	4.01.07.1.02.01 - Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	167,671,850	165,454,644	98.68	2,217,206
	4.01.07.1.02.02 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	408,861,250	404,716,470	98.99	4,144,780
	4.01.07.1.02.03 -	189,326,650	185,979,417	98.23	3,347,233

	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				
	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	**689,436,400**	**257,503,756**		**36,369,808**
	4.01.07.1.03.01 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	155,008,800	149,510,434	96.45	5,498,366
	4.01.07.1.03.02 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	350,021,600	344,263,390	98.35	5,758,210
	4.01.07.1.03.03 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	184,406,000	159,292,768	86.38	25,113,232
	TOTAL BELANJA OPERASI	**5,199,505,290**	**5,083,605,143**	**97.77**	**115,900,147**
	TOTAL BELANJA MODAL	**399,124,360**	**396.844,000**	**99.43**	**2,280,360**
	TOTAL BELANJA OPERASI & MODAL	**5,598,629,650**	**5,480,449,143**	**97.89**	**118,180,507**

Sumber : Biro Pengadaan Barang/Jasa

INOVASI

Aplikasi Pelayanan Biro Pengadaan Barang/Jasa, merupakan sistem aplikasi penyelenggaraan pelayanan pada biro pbj berbasis web. Adapun tujuan pembangunan aplikasi terkait yaitu :

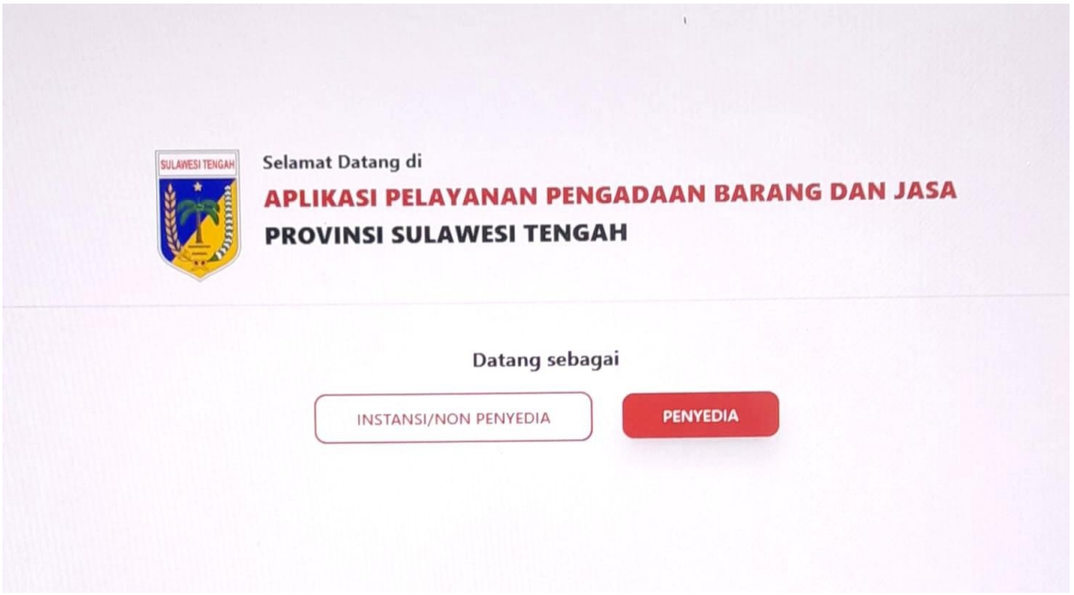
1. Digitalisasi Pencatatan Konsultasi/Pelayanan Pemohon pada Biro Pengadaan Barang Jasa;
2. Manajemen Antrian dan Pemetaan Keperluan Pemohon dengan Bagian Pelayanan terkait, pada Biro Pengadaan Barang/Jasa yang lebih efisien dan akuntabel; dan
3. Sebagai sarana untuk mengukur metrik kualitas pelayanan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk Alur Kerja Aplikasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke kantor Biro Pengadaan Barang/Jasa;
2. FO menerima kunjungan pemohon dan mengkonfirmasi keperluan pemohon ;
   Apabila pemohon yang bersangkutan sudah janjian/komunikasi dengan pihak tertentu dalam Biro PBJ, FO memeriksa apakah pihak tersebut hadir dan bersedia untuk bertemu dengan pemohon.

3. FO mendampingi Pemohon untuk mengisi Form Pelayanan. Jika bagian pelayanan terkait sudah terokupasi / sedang melayani, pemohon diharap menunggu antrian;
4. Pemohon mendapatkan pelayanan pada bagian terkait sesuai keperluannya;
5. Selesai mendapatkan pelayanan, FO mengambil data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai penilaian Pemohon;
6. Pelayanan Pemohon selesai.

Tampilan depan aplikasi pelayanan pengadaan barang dan jasa



PENGHARGAAN

Pada tahun 2024, Biro Pengadaan Barang/Jasa belum mendapatkan penghargaan.

AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BIRO UMUM



AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (performance result) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (performance plan) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Pembandingan menghasilkan celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (performance improvement).

Pencapaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.a Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*100*
	Meningkatnya Kualitas layanan Internal SETDA	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	88,50	86,48	97,72

Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum Tahun 2024 adalah 88,50 sedangkan yang Terealisasi pada tahun 2024 adalah 86,48. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan antara lain hasi kuisioner yang memiliki nilai terendah di tiga unsur antara lain produk pelayanan, kompotensi, persyaratan serta kecepatan waktu pelayanan.

Tabel Perbandingan capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Meningkatnya Kualitas layanan Internal SETDA	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	78	78,44	100,56	80	80,09	100,11	88,50	86,48	97,72

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2023 meningkat 1,65 poin dibandingkan tahun 2022 dan pada tahun 2024 meningkat 6,39 poin dari tahun 2023. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan gap capaian kinerja sebesar 0,45 poin dan gap penurunan pada tahun 2024 sebesar 2,39 poin.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Meningkatnya Kualitas layanan Internal SETDA	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	86,48	92	100

Dilihat dari perspektif target akhir rencana strategis (Renstra) Tahun 2026, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,48 poin dari target sebesar 88,50 poin dengan capaian kinerja sebesar 97,52 persen.

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Meningkatnya Kualitas layanan Internal SETDA	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	86,48	92	100

Jika dibandingkan dengan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat Provinsi Tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum Tahun 2024 memiliki nilai indeks sebesar 86,48 sedangkan nilai lindeks kepuasan masyarakat standar nasional memiliki nilai indeks sebesar 92. Dalam hal ini adanya gap sebesar 5,52.

Tabel Analisis Penyebab Peningkatan atau Penurunan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Target dan Capaian IKU 2024			Keterangan	
		Target	Realisasi	Capaian	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	88,50	86,48	95,45	- Responsif terhadap pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat - Prosedur pelayanan sudah sesuai dengan yang ditetapkan	- Standar pelayanan, kemampuan, persyaratan kecepatan dan kualitas sarana mungkin masih dirasakan lambat dan kurang sehingga konsumen merasakan ketidaknyamanan terhadap pelayanan tersebut - Petugas layanan mungkin belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi

Indeks Kepuasaan Masyarakat Biro Umum Hambatan/permasalahan dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum antara lain : 1. Standar pelayanan, kemampuan, persyaratan kecepatan dan kualitas sarana mungkin masih dirasakan lambat dan kurang sehingga konsumen merasakan ketidaknyamanan terhadap pelayanan tersebut. 2. Petugas layanan mungkin belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi. Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Umum untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 47 1. Meningkatkan standar pelayan dan kompetensi kepada masyarakat denga prosedur yang jelas, mudah dan sederhana dalam pross pelayanan. 2. Mengikuti prosedur sesuai SOP. 3. Meningkatkan kecepatan waktu dan memberikan kenyamanan dalam sarana dan prasarana sehingga menimbulkan rasa puas pada orang yang berkepentingan. 4. Memberikan kejelasan dan kepastian teknis dan administratif pelayanan.

Tabel Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (5-9)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Meningkatnya Kualitas layanan Internal SETDA	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	88,50	86,48	97,72	86.056.095.523,18	82.141.740.497,00	95,45	2,27

Tabel Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
				Kinerja	Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas layanan Internal SETDA	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Umum	88,50	86,48	86.056.095.523,18	82.141.740.497,00

Analisis masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan capaian tahun 2024 tersebut dapat terwujud karena adanya berbagai macam hal yang mendukung. Dilihat dari faktor-faktor penentu keberhasilan, maka dukungan utama terhadap keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Tingginya komitmen tersebut dilator belakangi oleh pemahaman persepsi terhadap tupoksi dan kualitas SDM yang relative tinggi. Faktor penentu keberhasilan lainnya antara lain adanya kerja sama dengan pihak ke 3 (swasta/konsultan/OPD terkait lainnya), yang semakin sinergis. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk peningkatan kinerja instansi pada masa yang akan datang.

Strategi Pemecahan Masalah

Adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam pencapaian sasaran Biro Umum Sekretariat Dearah Propinsi Sulawesi Tengah antara lain:

- **Permasalahan dalam pekerjaan dan pengadaan bangunan fisik adalah:**

1. Pergeseran anggaran dan pengurangan anggaran.
2. Pekerjaan fisik membutuhkan waktu pekerjaan yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pekerjaan.
3. Pekerjaan fisik sebagai pekerjaan pembangunan bangunan dan gedung membutuhkan dana yang besar sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui proses administrasi lelang/tender yang memerlukan waktu yang lama dan dokumen yang lengkap. Sehingga proses tender/lelang waktu berpengaruh terhadap waktu pekerjaan fisik.

Strategi pemecahan adalah:

1. Perubahan dan pengurangan anggaran merupakan kendala ekstrinsik (berasal dari luar organisasi) yang tidak dapat dihindari.
2. Melakukan perencanaan untuk tahun 2024 lebih akurat dan memperhatikan kemampuan, waktu yang tersedia dan keberlanjutan pekerjaan pada masa berikutnya.
3. Melakukan proses administrasi dan tahapan kegiatan lebih awal sehingga tidak mempengaruhi pekerjaan operasional di lapangan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov. Sulawesi Tengah sehingga proses administrasi dan tahapan kegiatan lebih awal sehingga tidak mempengaruhi pekerjaan operasional di lapangan.

5. Lebih mempercepat tahapan awal pekerjaan dan menganggarkan kegiatan fisik yang besar secara bertahap pada setiap tahun anggaran berkenaan.

- **Permasalahan urusan kerumah tanggaan adalah:**

1. Kelebihan personal dibandingkan dengan volume tugas yang ada.
2. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki personality yang dibutuhkan dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang tugas kerumahtanggaan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.

Strategi pemecahan adalah:

1. Melakukan pendataan dan penilaian kembali terhadap keahlian/ketrampilan pegawai/personal yang dibutuhkan disesuaikan dengan bidang tugas kerumahtanggaan.
2. Mengusulkan mutasi pegawai/personal yang berdasarkan penilaian tidak sesuai dengan bidang tugas kerumahtanggaan.
3. Melakukan pembinaan internal.
4. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat, workshop, studi banding atau kegiatan lain yang bersifat peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM.
5. Mengevaluasi kelayakan sarana prasarana pelayanan kerumahtanggaan yang telah ada.
6. Mengusulkan secara bertahap kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

- **Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah:**

1. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi dan kemampuan pengadaan barang dan jasa.
2. Keterlambatan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Keterlambatan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur pengelola Kegiatan dalam memahami proses pengadaanbarang/jasa.

Strategi pemecahan adalah:

1. Mengikutsertakan aparatur pada diklat dan ujian sertifikasi nasional.
2. Meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses pelayanan.
3. Meningkatkan pelayanan dan menerapkanStandar Pelayanan Minimal.

Meskipun pada tahun 2022 memperlihatkan capaian kinerja yang telah baik, namun disadari bahwa pada tahun-tahun yang akan datang akan sangat dipengaruhi dengan perkembangan dan dinamika organisasi. Dengan demikian dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sasaran-sasaran, strategi, kebijakan,

progam dan kegiatan sehingga Biro Umum dapat lebih akomodatif terhadap perubahan dan dinamika daerah yang terjadi di tahun berikutnya. Dengan upaya pengembangan dan peningkatan yang dilakukan secara bertahap diharapkan sasaran-sasaran kinerja Biro Umum dapat bermanfaat bagi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

REALISASI ANGGARAN

Jumlah alokasi dana tahun anggaran 2024 untuk Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari Dana APBD sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp 76.259.895.979,00** yang terdiri dari:

1.	**Dana Belanja Operasi**	**Rp 75.191.924.192,00**
	- Belanja Pegawai	Rp 58.981.335.964,00
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.210.588.228,00
2.	**Dana Belanja Modal**	**Rp 1.067.971.787.00**
	- Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp 1.067.971.787,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0
3.	**Total (1 + 2)**	**Rp 76.259.895.979,00**

(Terbilang: Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh LIma Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)

Pada akhir tahun anggaran mengalami perubahan anggaran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka alokasi anggaran pada Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berubah menjadi **Rp 86.056.095.523,18** dengan perincian sebagai berikut:

1.	**Dana Belanja Operasi**	**Rp 82.654.963.565,55**
	- Belanja Pegawai	Rp 58.004.262.623,55
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 24.650.700.942,00
2.	**Dana Belanja Modal**	**Rp 3.401.131.957,63**
	- Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp 2.043.786.030,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.067.578.335,63
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 289.767.592,00
3.	**Total (1 + 2)**	**Rp 86.056.095.523,18**

(Terbilang: Delapan Puluh Enam Milyar Lima Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Koma Delapan Belas Rupiah)

Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1.	**Dana Belanja Operasi**	**Rp 78.760.339.697,00**
	- Belanja Pegawai	Rp 54.711.084.596,00
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp 24.049.255.101,00
2.	**Dana Belanja Modal**	**Rp 3.381.700.800,00**
	- Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp 2.033.247.800,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.060.692.000,00
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 175.995.000,00
3.	**Total (1 + 2)**	**Rp 82.142.040.497,00**

(Terbilang: Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)

Dengan demikian terdapat sisa pagu sebesar Rp. 3.914.055.026,18 jadi prosentase realisasi keuangan adalah 95,45% dan fisik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 4,55%.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**

Belanja operasi digunakan untuk membayar belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah alokasi dana Belanja Operasi sebesar **Rp 82.654.963.565,55** dengan realisasi sebesar **Rp 78.760.339.697,00** atau realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,29% terjadi efisiensi anggaran 4,71%

2. **Belanja Modal**

Untuk Belanja Modal digunakan untuk membayar Belanja Modal Perlatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah alokasi dana Belanja Modal sebesar **Rp 3.401.131.957,63** dengan realisasi sebesar **Rp 3.381.700.800,00** atau realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,43% terjadi efisiensi anggaran 0,57%.

INOVASI

Inovasi adalah suatu proses pembaharuan/pemanfaatan/pengembangan dengan menciptakan suatu hal baru yang berbeda dengan sebelumnya. Inovasi juga bisa diartikan sebagai penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan sebuah temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Inovasi juga dapat dijelaskan sebagai ide, produk, perangkat, atau hal baru.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu unit yang berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum, berperan dalam rangka peningkatan kepuasan dan kualitas atas pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan kepuasan dan kualitas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2024 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan beberapa inovasi.

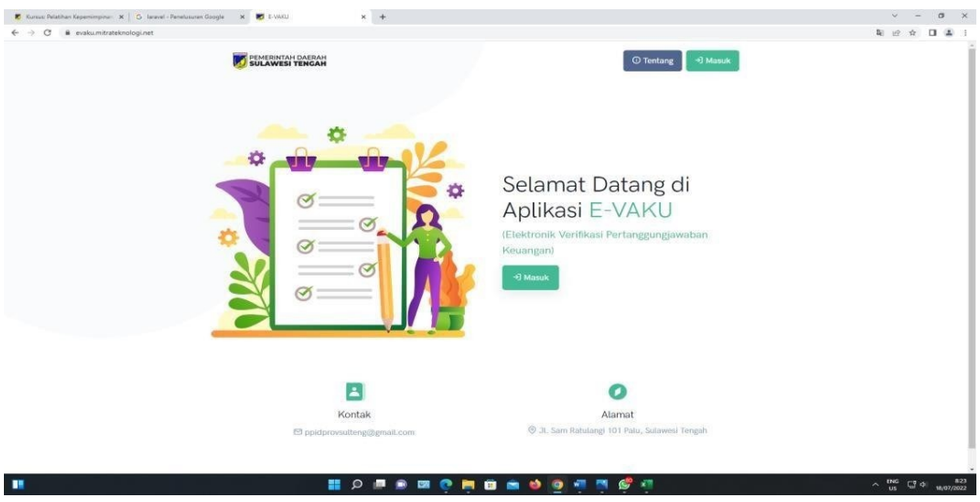
Inovasi yang pertama dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi E-Vaku (Elektronik Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan) yang berbasis Web. Dimana aplikasi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

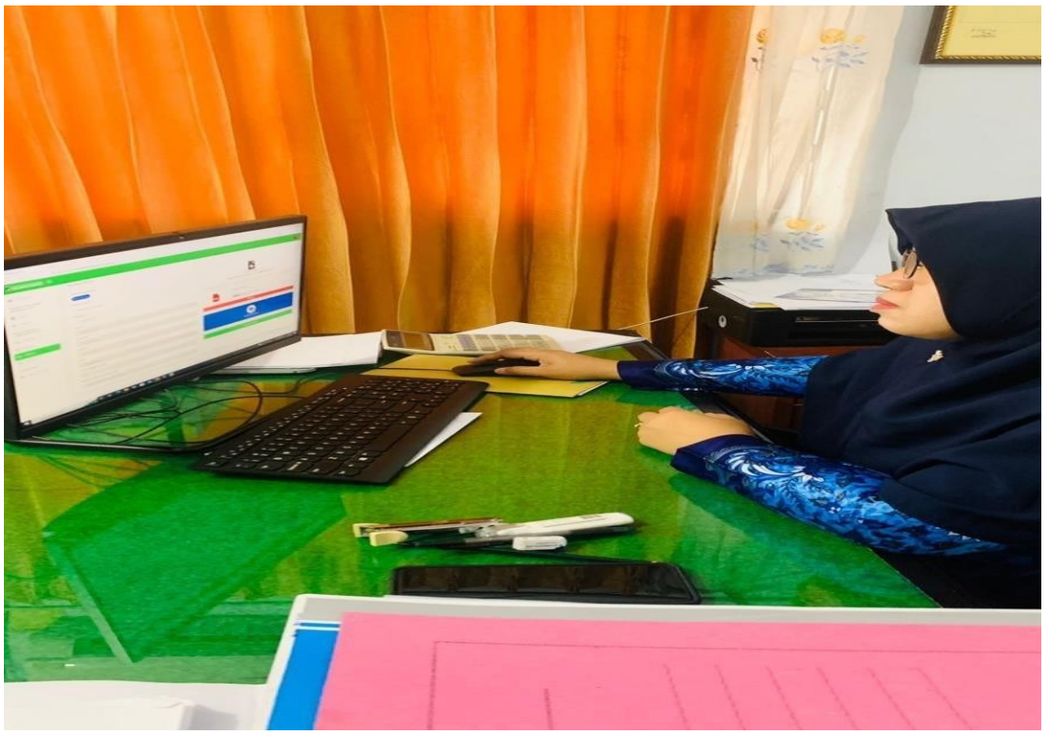
1. Manfaat bagi Peningkatan Kinerja Organisasi (Unit Kerja)
    - Hasil inovasi telah menghasilkan perubahan, dari sistem layanan semula yang bersifat manual yaitu dokumen surat pertangggungjawaban keuangan masih berbentuk fisik (hardcopy) menjadi file scan (softcopy).
    - Hasil Inovasi sangat membantu verifikator dalam melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dengan cepat dan teliti.
2. Manfaat bagi Pengelola Keuangan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
    - Hasil inovasi menghasilkan perubahan, dari sistem layanan langsung keruangan verifikasi menjadi layanan online.
    - Hasil Inovasi sangat membantu pengelola keuangan dalam hal ini bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu lingkup Sekretariat Daerah provinsi Sulawesi Tengah dalam mengajukan surat pertanggungjawaban keuangan untuk diverifikasi lebih cepat.

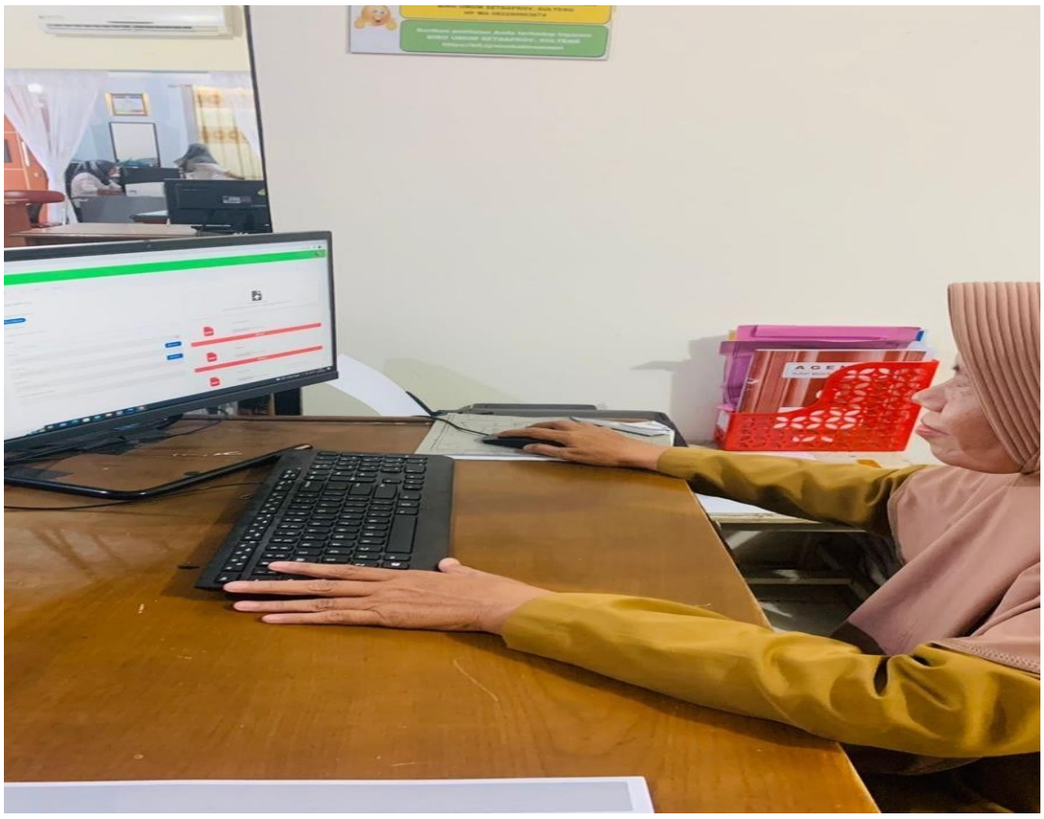
Berikut adalah dokumentasi dari sosialisasi pengenalan aplikasi E-Vaku (Elektronik Verifikasi Pertanggungjawaban keuangan) dan gambaran aplikasinya :











Inovasi yang kedua yang dilaksanakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan menggunakan Aplikasi SI-MADU (Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu). Aplikasi SI-MADU adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk membantu organisasi dalam pengelolaan aset mereka secara efisien dan efektif. SIMADU mengintegrasikan berbagai aspek manajemen aset, termasuk

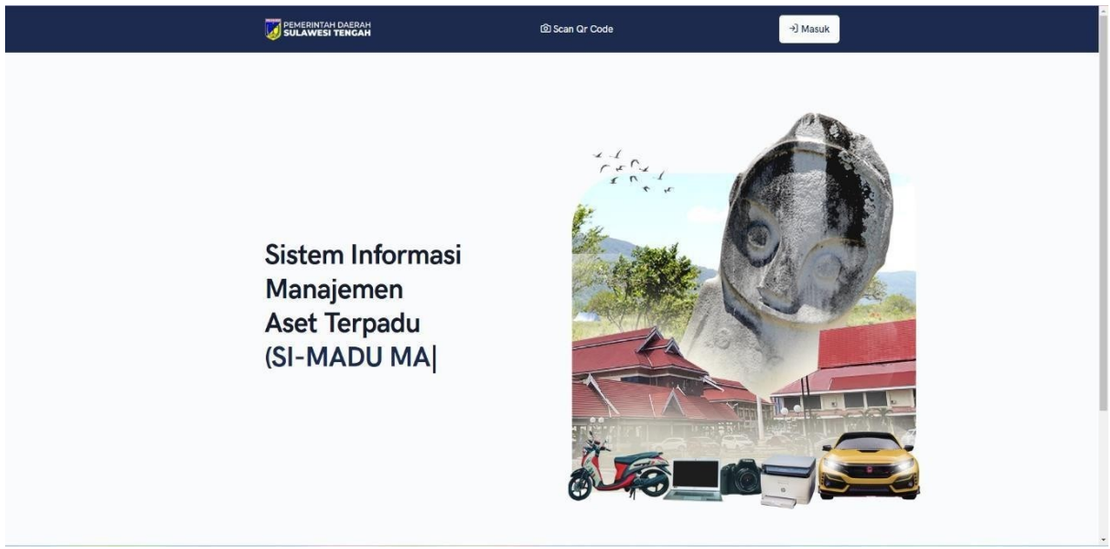
inventarisasi, pemeliharaan, pemantauan, dan pelaporan. Dengan adanya SI-MADU, perusahaan dapat dengan mudah melacak, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaan aset mereka, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. SI-MADU menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan organisasi untuk memantau aset mereka secara real-time, yang memungkinkan pemantauan kinerja dan perawatan yang lebih baik. Selain itu, SI-MADU juga memungkinkan penggunaan data analitik untuk membuat keputusan strategis terkait pengelolaan aset, seperti perencanaan pemeliharaan preventif atau penggantian aset yang sudah tua. Dengan integrasi SI-MADU, perusahaan dapat mengoptimalkan siklus hidup aset mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka.

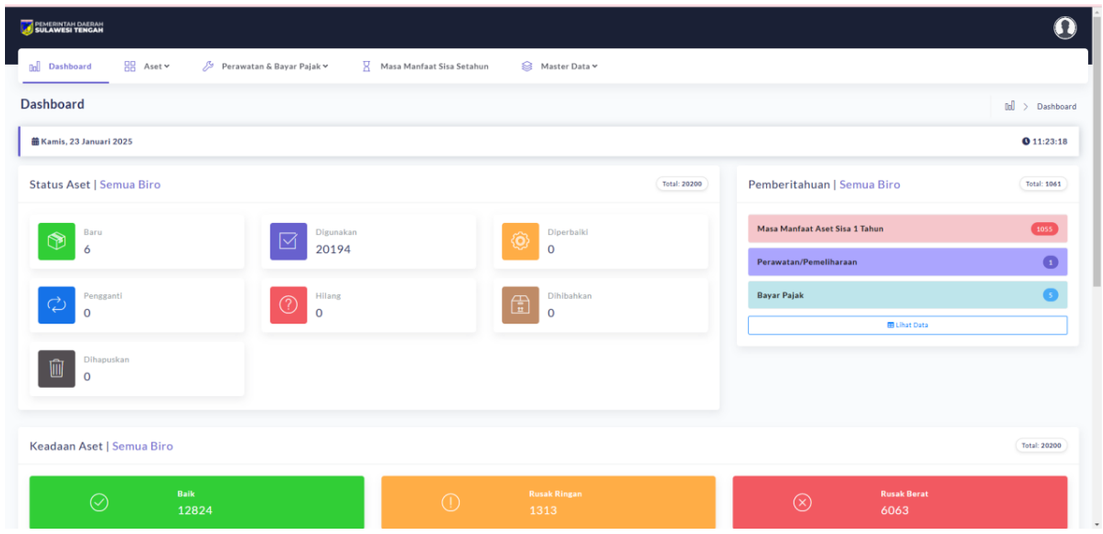
SI-MADU adalah sistem informasi manajemen aset terpadu yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan memantau aset-aset mereka secara efisien. Dengan menggunakan SI-MADU, organisasi dapat melacak aset mereka, termasuk inventaris, properti, dan peralatan, serta mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaannya. Sistem ini biasanya mencakup fitur-fitur seperti pemantauan kinerja aset, pembaruan inventaris secara real-time, dan pelaporan yang dapat membantu pengambilan keputusan strategis terkait aset. Dengan adanya SI-MADU, organisasi dapat mengurangi risiko kerugian aset, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan nilai aset mereka secara keseluruhan.

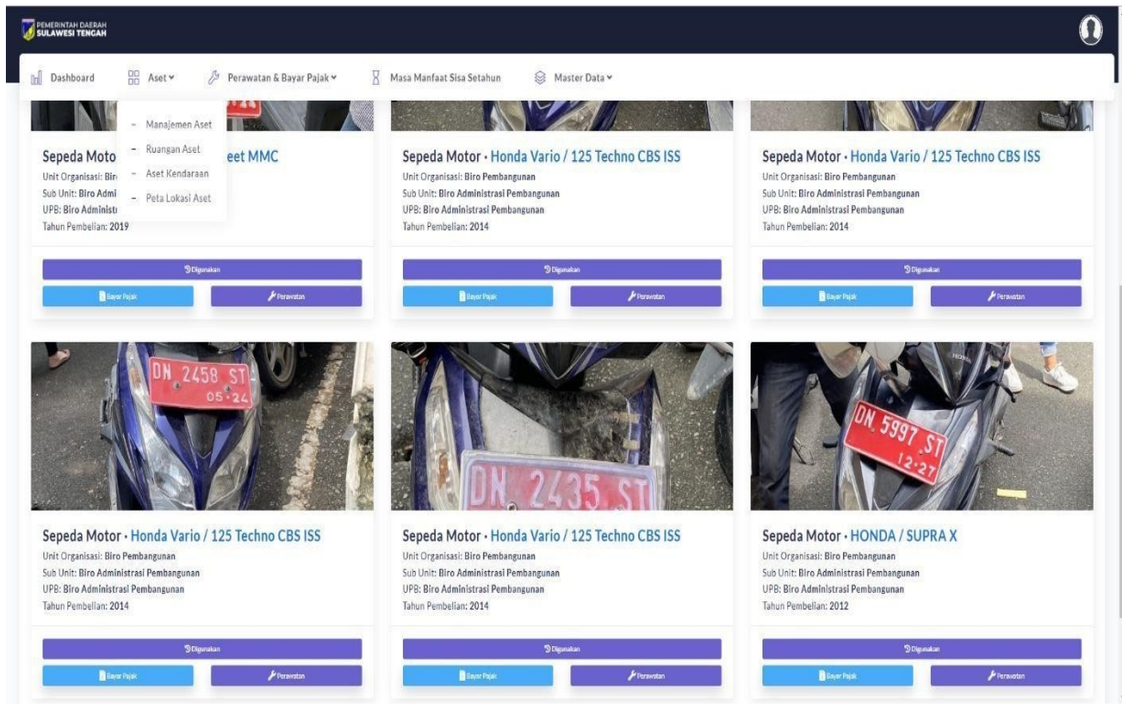
Bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa manfaat yang diharapkan dengan adanya Aplikasi Pengelolaan Pemanfaatan Aset Kantor ini yaitu:

1. Manfaat bagi Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah/pengurus barang (BMD)
    - Memudahkan proses identifikasi dan pengelolaan inventaris aset kantor
    - Meningkatkan kualitas kerja tim, yang efektif dan efisien baik waktu, tenaga maupun beban kerja
2. Manfaat bagi Organisasi Internal
    - Dapat mengurangi alokasi belanja modal yang tidak prioritas
    - Meningkatnya peran serta dalam memberikan informasi terkait aset kantor
3. Manfaat bagi Organisasi Eksternal
    - Membantu Daerah dalam perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berikut adalah gambar aplikasi SI-MADU beserta dokumentasi launchingnya :






PEMERINTAH DAERAH
SULAWESI TENGAH
Dashboard
Aset
Perawatan & Bayar Pajak
Masa Manfaat Sisa Setahun
Master Data
Manajemen Aset
Ruangan Aset
Aset Kendaraan
Peta Lokasi Aset
Sepeda Motor · Honda Vario / 125 Techno CBS ISS
Unit Organisasi: Biro Pembangunan
Sub Unit: Biro Administrasi Pembangunan
UPB: Biro Administrasi Pembangunan
Tahun Pembelian: 2014
Sepeda Motor · HONDA / SUPRA X
Tahun Pembelian: 2012
Digunakan
Bayar Pajak
Perawatan


BIRO UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Launching
APLIKASI
E-vaku & Si Madu





PENGHARGAAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan system pemerintahan, oleh sebab itu, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Biro Organisasi yang berkolaborasi dengan Inspektorat dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, berinisiasi melakukan penilaian sampai pada tahap pemberian penghargaan sebagai dasar harapan atas pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta untuk memperbaiki birokrasi, kerangka kerja dan proses administratif, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada masyarakat di provinsi Sulawesi tengah. Sebagai Perangkat Daerah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Meraih Penghargaan SAKIP dengan Nilai 75.70 dengan Predikat BB.

Berikut dibawah ini dokumentasi pelaksanaan penghargaan SAKIP Award Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.




SULAWESI TENGAH


ASN BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
PEMERINTAH DAERAH
SULAWESI TENGAH
GUBERN
SULAWESI T


SAKIP
AWARDS
2024
ASN BerAKHLAK
DINNER


SAKIP
AWARDS
2024
ASN BerAKHLAK
DINNER

BAB .4

PENUTUP





PENUTUP

LKIP Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi sulawesi Tengah Tahun 2024. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan cukup baik. Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil tercapai target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar Rp213.140.264.732,00. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dra. NOVALINA, MM**
Jabatan : Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi General	61,5 Poin
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Kemiskinan	2. Nilai Sub Komponen Strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Indikator Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,8 Poin
3. Meningkatnya Tata Kelola Kerjasama Daerah	3. Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti	100 %
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Strategi Penanganan Inflasi	4. Nilai Sub Komponen Strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Indikator Inflasi (Rencana Aksi)	0,8 Poin
5. Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan publik	5. Nilai Reformasi Birokrasi General Indikator Pelayanan Publik	4,00 Poin
6. Meningkatya Kualitas Tata Kelola Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah	6. Skor Kinerja LPPD	68,50 Poin
7. Meningkatnta Tata Kelola Persiapan Daerah Otonomi Baru	7. Persentase Draft Kajian Akademik DOB yang disiapkan	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 142.221.810.744,18	APBD P
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.686.075.500,00	APBD P
3	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 55.882.346.600,00	APBD P
4	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 3.343.051.536,00	APBD P
5	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 2.260.211.277,00	APBD P
6	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 2.375.862.850,00	APBD P
7	Program Fasilitasi dan Bantuan Hukum	Rp. 2.495.384.300,00	APBD P
8	Program Penataan Organisasi	Rp. 2.875.521.925,00	APBD P
	JUMLAH	**Rp.213.140.264.732,18**	

Palu, 11 NOVEMBER 2024

PIHAK KEDUA
Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690927 198811 2 001

Dipindai dengan CamScanner

LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah